**ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MERATIFIKASI
KONVENSI INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK
PEKERJA MIGRAN TAHUN 2012**

*The Reason of Indonesian Government to Ratify the International Convention
on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families in 2012*

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ACHMAD ZULFIKAR

20100510137

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2013

HANYA
UNTUK
DIBACA

READ ONLY

**ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI
INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN**

TAHUN 2012

*The Reason of Indonesian Government to Ratify the International Convention
on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families in 2012*

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:
ACHMAD ZULFIKAR
20100510137

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2013**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI
INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN**

TAHUN 2012

*The Reason of Indonesian Government to Ratify the International Convention on
the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families in 2012*

ACHMAD ZULFIKAR

20100510137

Telah di pertahankan, dinyatakan Lulus dan disahkan dihadapan
Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada:

Hari/tanggal : Senin, 16 Desember 2013
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Ruang HI.C

TIM PENGUJI

ttd

Ali Muhammad, S.IP., M.A., Ph.D.

Ketua Penguji

ttd

ttd

Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si.
Penguji Samping I

Ade Marup Wirasenjaya, S.IP., M.A.
Penguji Samping II

Surat Pernyataan Keaslian

Letter of Authenticity Statement

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lain.

I hereby declare that my undergraduate thesis is original and has never been asked to obtain an undergraduate academic degree, both at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and in other universities.

Dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

In my undergraduate thesis there is no publication or opinions that have been written or published by another person, except in writing clearly listed as a reference in the script with the name mentioned and listed in the bibliography.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

I make this statement with truly and if in the future there is untruth in this statement, then I am willing to accept the academic sanction according to the rules at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Desember 2013

ttd

Achmad Zulfikar

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wr wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya kepada era pencerahan dari zaman kejahiliah.

Alhamdulillah, penulis haturkan atas terselesaikannya skripsi strata-1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional berjudul “**Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012**”. Skripsi ini merupakan mahakarya perjalanan akademik yang dilalui oleh penulis selama 3,5 tahun terakhir. Penulis sangat berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bapak Prof. Bambang Cipto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ali Muhammad, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY sekaligus Ketua Penguji yang telah memberikan masukan yang konstruktif terhadap pondasi hingga menjadi bangunan pemikiran yang utuh.
3. Ibu Dr. Nur Azizah selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional UMY yang telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk turut serta berkontribusi kepada jurusan.
4. Ibu Siti Muslikhati, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMY sekaligus Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan motivasi akademik sehingga ananda akhirnya dapat melalui perjalanan studinya dengan baik.
5. Bapak Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk membimbing ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ade Marup Wirasenjaya, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji II, Kepala Laboratorium HI dan juga Dosen Pendamping saat PKM. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini pak, semoga dapat berlanjut di kesempatan yang akan datang.
7. Ibu Rieke Diah Pitaloka selaku Anggota Komisi IX DPR RI terima kasih atas kesempatan wawancaranya di tengah-tengah kesibukannya sebagai corong aspirasi rakyat.
8. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bagian Humas yang telah menerima saya dengan baik dan memfasilitasi dalam pengumpulan data penelitian.
9. Seluruh rekan-rekan civitas akademika HI UMY, bapak dan ibu dosen HI UMY yang telah memberikan ananda pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan studi, administrasi TU HI pak Jumari, pak Ayub, dan pak Waluyo, dan mbak Adya yang membantu proses administrasi di jurusan berjalan lancar, dan teman-teman HI UMY angkatan 2010 yang senantiasa memberikan dukungan sehingga senang dan susah masa studi dapat terlewati.

Mengakhiri kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu banyak masukan dan saran, maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari pembaca melalui email apa@kabarfikar.com. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu alaikum wr wb.

Yogyakarta, 23 Desember 2013

Achmad Zulfikar

*Kudedikasikan mahakarya skripsi ini untuk kedua orangtuaku
dan saudara-saudaraku:*

Bapak Ir. Baharuddin Nur, Dipl. Env.

Ibu Dr. Sitti Rabiah, M.Hum.

Achmad Zulakbar

Achmad Chaedar

Achmad Kautsar

*Akhirnya perjuangan ananda menyelesaikan jenjang strata-1
di Yogyakarta telah mencapai penghujung, namun tentunya
semangat untuk mengejar cita-cita akan terus berlanjut.*

*Ananda berharap mahakarya ini memberikan angin segar bagi
perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang dalam
mewujudkan kejayaan bangsa.*

Ucapan Terima Kasih

Halaman ini didedikasikan oleh penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam perjalanan studi penulis. Semoga sumbangsih bapak/ibu/saudara/saudari/mas/mbak menjadi sarana yang mengantarkan penulis ke gerbang kesuksesan.

- Tentunya yang paling utama kepada ibunda Dr. Sitti Rabiah, M. Hum. dan ayahanda Ir. Baharuddin Nur, Dipl. Env. yang doa-doanya senantiasa mengiringi langkah ananda. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, dan umur panjang yang berkah agar bisa melihat ananda menjadi orang yang sukses.
- Saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dorongan semangat agar kakak bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Akbar, Chaedar, dan Ocha kerjarlah cita-citamu dik, kakakmu akan selalu mendukung apa yang kalian impikan.
- Keluargaku di Jakarta yang juga senantiasa menyemangati studi ananda, Nenek Hj. Kamariah, Mammi Hj. Angku Dg. Pudji, Tante Hj. Najmah, Mbak Novita Fitrianty, dan Mbak Lely Damayanti.
- Bapak Sugito, S.IP., M.A. selaku Kepala Pusat Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PPKM) Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY yang dahulu Sekretaris Jurusan HI dan juga Koordinator PKM di HI. Alhamdulillah pak, ananda sudah selesai dan terima kasih atas kerjasama dan kesempatan bereksplorasi selama ini.
- Rekan-rekan kerja di Jurusan HI UMY, mbak Masyitoh, mbak Adya, dan mbak Febri. Sampai bertemu di dunia kerja yang semakin menantang.
- Rekan-rekan di Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI) UMY periode 2010/2011, 2011/2012, dan 2012/2013. Terima kasih atas kerjasamanya selama menjalankan roda organisasi di tingkat jurusan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua KOMAHI tiga periode, Hadi Sutrisno, Anis Abdillah, dan Reza Fahmi anda calon pemimpin masa depan. Demikian juga dengan Ketua Divisi Pers Mahasiswa tiga periode Dyah Eka Sari, Ibda Fikrina Abda, dan Reynita Hutami Adiningsih semoga sukses meniti karir.

- Rekan-rekan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIPOL) UMY periode 2011/2012. Terima kasih atas kerjasamanya selama menjalani kepengurusan khususnya, Muhammad Sidik selaku Gubernur BEM, dan jajaran pengurus di Divisi Media dan Informasi Desitha, Novita Sari, Leny, Riska Indri, Royki, Nidya, Devi, dan Herlambang.
- Rekan-rekan di UKM Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa 'Nuansa' UMY periode 2011/2012 dan 2012/2013. Terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya. Organisasi inilah yang saya incar sejak masuk UMY, tapi baru kesampaian masuk di tengah-tengah masa studi. Terima kasih terkhusus kepada Ahlul Amalsyah yang telah mempercayakan saya sebagai Sekretaris Umum periode 2012/2013. Semoga bapak Pimpinan Umum segera menyusul menyelesaikan studinya.
- Rekan-rekan di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BEM UMY) periode 2012/2013. Terima kasih atas kesempatan pengabdian untuk mahasiswa UMY secara lebih luas. Terkhusus kepada pak Presiden Mahasiswa Lukman Hakim dan seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informasi yakni Fitri Navisah, Dara, Novita Sari, Fajrini, Cahya Ridlo, Ferryan, Dede, Rihzki, Widia, Vini, Sri Afrianty, dan Yessica terima kasih telah mempercayakan saya memimpin Kementerian ini.
- Rekan-rekan di UKM Paduan Suara Mahasiswa 'Sunshine Voice' UMY periode 2011/2012. Terima kasih atas kesediaannya menerima saya sebagai Tenor. Semoga selalu bersinar sebagaimana namanya.
- Rekan-rekan di Komunitas Blogger Jogja yang telah mempercayakan saya sebagai Sekretaris Umum (2011-2012). Mari kita kembangkan komunitas ini bersama-sama agar memberikan dampak positif bagi konten-konten di dunia maya.
- Rekan-rekan redaktur di Swara Kampus Kedaulatan Rakyat. Khususnya Koordinator Swaka pak Krisno beserta jajarannya pak Bondan, pak Awib, mas Erik, dan mas Nurhadi. Terima kasih atas kesempatannya untuk bereksplorasi melalui tulisan di Swaka. Semoga kedepannya akan terus menjalin kerjasama yang baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK DAN BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	8
Teori Aktor Rasional	8
E. Hipotesa	11
F. Jangkauan Penelitian	12
G. Teknik Pengumpulan Data	12
H. Sistematika Penulisan	13
 BAB II KONDISI KETENAGAKERJAAN INDONESIA	
A. Definisi Konseptual Ketenagakerjaan	15
1. Definisi Umum	15
2. Definisi Konseptual Tenaga Kerja Indonesia	16
3. Definisi Konseptual Tenaga Kerja Asing	21

B. Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	26
1. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	26
2. Gambaran Umum Negara Tujuan TKI	31
3. Permasalahan Umum Tenaga Kerja Indonesia	36
4. Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan TKI	40
C. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan	
Tenaga Kerja Asing di Indonesia	43
1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	43
2. Perkembangan Investasi di Indonesia	45
3. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia	50
4. Karakteristik Negara Asal dan Sebaran TKA	
di Indonesia	52
5. Gaji dan Pola Remitansi TKA di Indonesia	56
6. Pandangan TKA terhadap Indonesia	60
7. Kebijakan bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia	64

BAB III PROSEDUR PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA

A. Definisi Perjanjian Internasional (Konvensi)	68
B. Konsep Pembuatan Perjanjian Internasional	70
C. Prinsip dan Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional	
oleh Pemerintah Indonesia	78
D. Mekanisme Pembuatan Undang-Undang oleh	
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	85
E. Sejarah Pembentukan Konvensi Internasional	
Perlindungan Hak Pekerja Migran	87
F. Perkembangan Konvensi Internasional Perlindungan	
Hak Pekerja Migran	89
G. Ringkasan Konvensi Internasional Perlindungan	
Hak Pekerja Migran	91

BAB IV	ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN	
A.	Kronologi Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran	94
1.	Awal Pembahasan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran	94
2.	Keterlibatan Indonesia dalam Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran	96
B.	Rasionalitas Pemerintah Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran	130
1.	Alasan Ekonomi	132
2.	Alasan Politik	138
C.	Konsekuensi Pemerintah terhadap TKA atas Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran	162
D.	Perbandingan Sikap Negara Pihak Lainnya Merespon Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran	166
	Belajar dari Meksiko	169
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	175
B.	Saran dan Rekomendasi	179
DAFTAR PUSTAKA		180
LAMPIRAN-LAMPIRAN		185
RIWAYAT HIDUP		203

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kerja Luar Negeri Diberangkatkan 2010, 2011 dan 2012	29
Tabel 2.2 10 Negara Tujuan Utama TKI (2011)	32
Tabel 2.3 Jumlah TKI Informal di Luar Negeri	33
Tabel 2.4 Gaji TKI, Menurut Kawasan dan Negara Penempatan	34
Tabel 2.5 Perkembangan Investasi di Indonesia Periode 2000 s.d. Sem I-2009 (%)	46
Tabel 2.6 Realisasi Nilai dan Proyek PMA/PMDN Periode 2000-Feb 2009	47
Tabel 2.7 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2005-2009 (Jun)	51
Tabel 2.8 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2009-2013 (Ags)	51
Tabel 3.1 22 Negara Peratifikasi Konvensi hingga mulai diberlakukan	89
Tabel 3.2 Status <i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>	90
Tabel 3.3 Struktur Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran	92
Tabel 4.1 22 Negara Peratifikasi Konvensi hingga mulai diberlakukan	95
Tabel 4.2 Rasionalitas Politik Pemerintah Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran	160
Tabel 4.3 Perbandingan Waktu Penandatanganan dan Ratifikasi Antar Negara Pihak	168

DAFTAR GRAFIK DAN BAGAN

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	44
Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia vs. 4 Negara ASEAN	45
Grafik 2.3 Perkembangan Jumlah TKA di Indonesia	50
Grafik 2.4 Karakteristik Negara Asal TKA Menurut Kawasan	53
Grafik 2.5 Karakteristik Negara Asal TKA Menurut Negara Non-ASEAN	53
Grafik 2.6 Karakteristik Negara Asal TKA Menurut Negara ASEAN	53
Grafik 2.7 Sebaran Jumlah TKA Menurut Provinsi (orang)	55
Grafik 2.8 Sebaran Gaji TKA per bulan	57
Grafik 2.9 Sebaran Tunjangan Jabatan TKA per bulan	57
Grafik 2.10 Sebaran Gaji TKA Menurut Level Jabatan	58
Grafik 2.11 Sebaran <i>Compensation Salary</i> TKA Menurut Level Jabatan	58
Grafik 2.12 Sebaran Nilai Remitansi	59
Bagan 3.1 Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional Multilateral Murni	77
Bagan 3.2 Pembuatan Perjanjian Internasional Berdasarkan UU Perjanjian Internasional	84
Grafik 4.1 Perkembangan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (2005-2012)	136

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ringkasan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran	185
Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka	202

**Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional
Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012**

*The Reason of Indonesian Government to Ratify the International Convention on
the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families in 2012*

Achmad Zulfikar (apa@kabarfikar.com)

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
International Relations Department
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Migrasi internasional kini telah menjadi fenomena keseharian yang menarik perhatian banyak negara di dunia, baik yang terlibat langsung sebagai negara pengirim, negara transit, negara penerima, dan kombinasi dari ketiganya maupun yang tidak terlibat langsung. Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat langsung dalam berbagai isu migrasi internasional yang membutuhkan penanganan secara taktis dan strategis. Peran ganda Indonesia dalam isu migrasi ini baik sebagai negara pengirim tenaga kerja maupun negara penerima tenaga kerja asing membawa konsekuensi kewajiban pemerintah berdasarkan amanat konstitusi untuk melindungi para pekerja migran Indonesia (TKI), dan para pekerja yang bekerja di Indonesia (TKA). Oleh karena itu menjadi hal yang lumrah bila pemerintah meratifikasi sebuah aturan internasional terkait perlindungan hak pekerja migran, meskipun sempat menimbulkan tanda tanya mengapa harus melalui masa penantian kurang lebih delapan tahun. Melalui penelitian ini, peneliti mengulas alasan dibalik masa penantian tersebut dimana Indonesia baru meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 2012. Penelitian ini berlandaskan pada studi pustaka, dan wawancara dengan narasumber yang relevan termasuk mereka yang terlibat langsung dalam proses ratifikasi tersebut. Penelitian ini secara garis besar menemukan bahwa pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran adalah atas pertimbangan kepentingan ekonomi dan politik. Dari aspek ekonomi, pemerintah Indonesia berupaya memperlihatkan komitmennya untuk menjaga investasi asing di Indonesia melalui perlindungan tenaga kerja asing (TKA) yang merupakan penggerak investasi dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan dari aspek politik, Indonesia berupaya meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) terhadap negara-negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) agar negara-negara tersebut memberikan perlindungan yang maksimal terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Kata Kunci: Pemerintah Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Asing, Konvensi Internasional, Perlindungan Hak Pekerja Migran

Abstract

International migration has now become everyday phenomena that attract the attention of many countries in the world, either directly involved as sending countries, transit countries, recipient countries, and the combination of the three or is not directly involved. Indonesia is one of the countries directly involved in international migration issues that need to be addressed tactically and strategically. Indonesian dual role in this migration issue as both labor-sending countries and receiving countries of foreign labor, bring consequences to the government obligations mandated by constitution to protect Indonesian migrant workers (TKI), and the foreign workers who work in Indonesia (TKA). Therefore become logic when the government ratified an international rules regarding the protection of the rights of migrant workers, although it was highly questionable why go through the waiting period of approximately eight years. Through this study, researchers reviewed the reasons behind the waiting period where Indonesia ratify the Convention in 2012. This study is based on a literature review, and interviews with relevant resource persons, including those directly involved in the ratification process. This research broadly finds that the Indonesian government to ratify the International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers is above the economic interests and political considerations. From the economic aspect, the Indonesian government sought to show its commitment to maintain foreign investment in Indonesia through the protection of foreign workers (TKA) which is driving investment in order to maintain economic growth in Indonesia. As for the political aspect, Indonesia seeks to improve the bargaining position to the countries of destination placement of Indonesian workers (TKI) that these countries provide maximum protection for Indonesian workers overseas.

Keywords: *Indonesian Government, Indonesian Workers, Foreign Workers, International Convention, Protection of Migrant Workers rights.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertengahan tahun 2012 lalu dalam Sidang Umum terkait Migrasi Internasional dan Pembangunan menyatakan bahwa pertumbuhan migrasi internasional sejak tahun 1990-2010 mengalami kenaikan yang signifikan.

More people live outside their country of origin today than at any time in history. The global number of international migrants increased from 155 million in 1990 to 214 million in 2010. During that period, the number of international migrants in the more developed regions, or the North, grew by 46 million, or 56 per cent, while the immigrant population in the South increased by 13 million, or 18 per cent. By 2010, almost 60 per cent of all international migrants in the world were living in more developed countries, compared with 53 per cent in 1990.¹

Data di atas menunjukkan terdapat 155 juta orang melakukan migrasi internasional pada tahun 1990, sedangkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan hingga 214 juta orang. Berarti dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terdapat kenaikan sebanyak 59 juta orang, dan apabila direrata maka terdapat kenaikan jumlah pelaku migrasi internasional hingga 3 juta orang per tahun.

Meningkatnya pelaku migrasi internasional dari tahun ke tahun tentunya menggugah negara-negara di dunia untuk menaruh perhatian pada hal ini, baik sebagai negara pengirim, negara transit, negara penerima, maupun kombinasi dari ketiganya. Termasuk di dalamnya Indonesia yang berperan ganda yakni sebagai negara pengirim, tetapi juga negara penerima.

¹ United Nations, (2012), *Secretary-General's Report on International Migration and Development* - <http://daccess-ods.un.org/TMP/500607.416033745.html>

Terkait dengan migrasi warga Indonesia ke luar negeri. Kepala Desk Diaspora Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia Wahid Supriyadi dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Antara menyatakan bahwa saat ini orang Indonesia yang melakukan diaspora (migrasi internasional) diperkirakan mencapai 8-10 juta di seluruh dunia.² Prakiraan ini termasuk TKI yang bekerja di luar negeri (pekerja migran Indonesia).

International Labour Organization (ILO) mengutip dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam laporannya menyatakan selama periode 2006-2012, jumlah pekerja migran mencapai sekitar 4 juta. Sedangkan jumlah pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi diperkirakan dua hingga empat kali lipat lebih besar.³

Tingginya jumlah orang Indonesia yang melakukan migrasi internasional, demikian juga dengan tingginya angka pekerja migran di luar negeri seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang efektif untuk penanganan sektor tersebut. Namun fakta yang terjadi adalah minimnya kebijakan dan upaya pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran di luar negeri mengakibatkan banyak TKI yang menjadi korban.

Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menunjukkan kasus yang menimpa TKI selama tahun 2010 sebanyak 60.399 kasus dan tahun 2011 sebanyak 44.573 kasus. Sedangkan data LSM *Migrant Care* mencatat sebanyak 5.314 kasus kekerasan yang dialami TKI di luar negeri selama

² Antara News, (2013), *Kemlu bentuk 11 Kelompok Kerja Kongres Diaspora* - <http://www.antaranews.com/berita/384634/kemlu-bentuk-11-kelompok-kerja-kongres-diaspora>

³ International Labour Organization, (2013), *Laporan ILO: 10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia* - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf, h. 3.

kurun 2009-2010 dengan rincian Malaysia sebanyak 1.748 kasus, Arab Saudi 1.048 kasus, Yordania 1.004 kasus, Kuwait 84 kasus, Abu Dhabi 533 kasus, Taiwan 103 kasus, Hong Kong 78 kasus, dan Singapura 16 kasus.⁴

Di sisi lain, Indonesia juga berperan sebagai negara penerima. Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2009 dari Bank Indonesia menyatakan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pada akhir Juli 2009 mencapai 46.476 orang. Meskipun pertumbuhan jumlah TKA agak fluktuatif, namun secara absolut jumlahnya terus meningkat.⁵

Data dari Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja dikutip dalam Tempo menyatakan, pada akhir tahun 2011 terdapat 77.300 pekerja migran asing/tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Mayoritas dari TKA berasal China dan Jepang (10.927), Korea Selatan (6.520), India (4.991), Malaysia (4.957), Amerika Serikat (4.425), Thailand (3.868), Australia (3.828) dan Filipina (3.820). Dalam hal keahlian atau profesi, daftar pertama yakni pekerja profesional sebanyak 34.763 orang, kemudian konsultan (12.761), manajer (12.505), direktur (6.511), teknisi (5.276), pengawas (4.746), dan komisaris (738).⁶

Data di atas menunjukkan jumlah yang cukup signifikan dari TKA di Indonesia. Dari data yang diperoleh oleh Bank Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 46.476, dan Kemenakertrans pada tahun 2011 sebanyak 77.300 orang, menunjukkan kenaikan yang signifikan.

⁴ Antara Jatim, (2012), *Kapan Kekerasan TKI akan Berakhir?* - <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/87574/kapan-kekerasan-tki-akan-berakhir->

⁵ Bank Indonesia, (2010), Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2009, Jakarta: Bank Indonesia. h.12.

⁶ Tempo, (2012), *China Dominates Foreign Worker in Indonesia* - www.tempo.co/read/news/2012/03/07/055388615/China-Dominates-Foreign-Workers-in-Indonesia.

Melihat signifikansi jumlah TKA di Indonesia, maka sebagai negara penerima tenaga kerja/pekerja migran Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pekerja migran tersebut. Di samping itu perlu kita pertimbangkan bahwa TKA di Indonesia merupakan penggerak investasi yang berasal dari berbagai negara di dunia yang memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia.

Dari sisi Indonesia sebagai negara pengirim dan negara penerima, maka Indonesia memegang posisi ganda dalam rangka melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri yang kemudian cukup banyak bermasalah, selain itu menjaga keamanan investasi yang telah dipercayakan melalui TKA di Indonesia. Dalam posisi ini, Indonesia harus mampu menyediakan instrumen yang komprehensif dan cukup kuat untuk mengakomodasi kepentingan dalam negeri, maupun luar negeri. Menjawab tuntutan tersebut maka Indonesia pada tahun 2012 meratifikasi sebuah aturan internasional yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarganya.

Aturan internasional yang dimaksud yakni Konvensi Internasional *Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*. Pengakuan terhadap Konvensi oleh Indonesia ditandai dengan penandatanganan konvensi pada 22 September 2004⁷ oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (2012), *Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 - ON-THE-PROTECTION-OF-THE-RIGHTS-OF-ALL-MIGRANT-WORKERS-AND-MEMBERS-OF-THEIR-FAMILIES-KONVENSI-INTERNASIONAL-MENGENAI-PERLINDUNGAN-HAK-HAK-SELURUH-PEKERJA-MIGRAN-DAN-ANGGOTA-KELUARGANYA*

New York Amerika Serikat. Penandatanganan ini dilakukan pada kesempatan perjanjian tahunan PBB saat Sidang Majelis Umum PBB ke-59.

Namun pembahasan yang sangat menentukan diratifikasinya konvensi ini terjadi saat para pengambil kebijakan (*stakeholder*) pemerintah Indonesia yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan seperti Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai perwakilan legislatif, serta Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan eksekutif mengadakan rapat kerja pada 9 April 2012. Akhirnya setelah rapat kerja, dicapai kata sepakat untuk membawa rancangan ratifikasi atas Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran ini ke sidang pleno. Setelah melewati masa sidang, akhirnya pada 12 April 2012 Konvensi ini resmi menjadi Rancangan Undang-Undang.⁸

Selanjutnya pada 2 Mei 2012 RUU ini disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on the Protection of The Rights Of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pasca diundang-undangkannya, konvensi ini kemudian dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga dalam versi *United Nations Treaty Collection*⁹ mencantumkan bahwa diratifikasinya konvensi ini pada 31 Mei 2012.

⁸ Human Right Watch, (2012), *DPR Setujui Konvensi Buruh Migran*-
<http://www.hrw.org/id/news/2012/04/12/dpr-setujui-konvensi-buruh-migran>

⁹ United Nations Treaty Collection, (2003), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*-
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en

Dari sejumlah data di atas menunjukkan bahwa ratifikasi terhadap Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran merupakan hal yang sangat mendesak bagi pemerintah. Urgensi ini dapat dilihat dari tingginya migrasi internasional (diaspora) warga negara Indonesia ke seluruh dunia, termasuk di dalamnya TKI yang bekerja di luar negeri yang jumlahnya signifikan. Besarnya jumlah TKI di luar negeri ternyata juga dibarengi fakta bahwa permasalahan TKI di luar negeri cukup tinggi, serta memerlukan penanganan serius pemerintah. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga bertanggungjawab TKA di Indonesia yang merupakan penggerak investasi negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia.

Kepastian hukum bagi TKI dan TKA merupakan tanggungjawab pemerintah Indonesia yang tidak bisa ditawar lagi. Namun kenyataannya, regulasi yang sudah ada belum mampu memenuhi tuntutan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Maka, kehadiran Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran yang diratifikasi oleh Indonesia diharapkan mampu untuk menjawab tuntutan tersebut.

Walaupun Konvensi Internasional ini telah diratifikasi, namun proses sejak penandatanganan hingga akhirnya diundangkan yang membutuhkan waktu tunggu selama 8 tahun (22 September 2004-2 Mei 2012) menggugah penulis untuk menelisik lebih jauh alasan pemerintah Indonesia pada akhirnya baru meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 2012. Padahal seperti diketahui sejak 2004-2012 telah terjadi serangkaian peristiwa yang menimpa TKI di luar negeri, begitu juga ketidakpastian yang diterima oleh TKA di Indonesia. Hal ini menjadi

menarik ketika penulis menelusuri kembali peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi. Dari penelusuran awal tersebut, penulis menemukan fakta bahwa proses ratifikasi Konvensi ini secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Dalam posisi ini, pemerintah merasa ‘terdesak’ oleh berbagai tuntutan tersebut, sehingga pemerintah memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ini.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, dan evaluasi bagi pemerintah (*stakeholder*) dan lembaga terkait di bidang ketenagakerjaan dan HAM, yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), *International Labour Organization* (ILO), *International Organization for Migration* (IOM), LSM Migrant Care, *Human Right Watch*, dan lain-lain. Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi para peneliti yang tertarik mengkaji ketenagakerjaan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:
“Mengapa pemerintah Indonesia baru meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran pada tahun 2012 ?”

C. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan skripsi beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran.
2. Berkontribusi terhadap kajian hukum internasional dalam bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penguatan perlindungan hukum TKI di Luar Negeri.
3. Memperkaya kajian Ilmu Hubungan Internasional (HI) dengan mengkolaborasikan pemahaman Ilmu HI dengan Ilmu Hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam membahas permasalahan penelitian sangat diperlukan. Teori maupun konsep yang digunakan dalam suatu penelitian merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara rumusan masalah dengan hipotesa. Dikarenakan teori merupakan generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena, yang dalam menyusun generalisasinya, teori selalu memakai konsep-konsep yang lahir dari pikiran manusia. Oleh karena itu, teori memiliki sifat yang abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai atau digunakan sebagai sarana untuk memahami fenomena atau permasalahan yang ada. Pada penelitian ini akan digunakan teori aktor rasional.

Teori Aktor Rasional

Teori yang berkaitan dengan kebijaksanaan politik luar negeri digagas oleh Graham T. Allison. Dalam kaitan ini Allison (1971) dalam Sitepu mengajukan

tiga model konseptual untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, antara lain: model aktor rasional, model proses organisasi, dan model politik birokratik. Dalam pembahasan ini, peneliti akan menggunakan model aktor rasional.¹⁰

Pembuatan keputusan politik luar negeri pada model ini digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu ini melalui tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada.¹¹

Dengan demikian, maka pemerintah dalam mengambil pilihan-pilihan diasumsikan menelaah terlebih dahulu kepentingan nasional, dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan-perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif tersebut. Dalam memilih pilihan dan alternatif, para pembuat kebijakan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”.¹²

Jika teori ini di aplikasikan dalam kasus ini, maka Indonesia telah memilih suatu pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain, dimana pilihan tersebut harus optimal dan yang paling menguntungkan bagi pihak Indonesia. Dalam kasus ini, alternatif pilihan yang dihadapkan pada pemerintah Indonesia yakni Indonesia bersedia atau menunda meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran. Adapun keuntungan dan kerugian dari keputusan Indonesia dalam menghadapi alternatif tersebut sebagai berikut.

¹⁰ P. Anthonius Sitepu, (2011), *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 94.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid. hh. 94-95.

a. Keuntungan (Bersedia Meratifikasi)

Indonesia akan mengadopsi aturan internasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan dua hal yakni aspek ekonomi, dan juga aspek politik. Peningkatan aspek ekonomi terkait dengan upaya perlindungan TKA di Indonesia yang merupakan penggerak investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan aspek politik, Indonesia meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) terhadap negara-negara tujuan TKI dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri.

b. Kerugian (Menunda Ratifikasi)

Apabila Indonesia menunda untuk meratifikasi Konvensi ini, maka Indonesia akan terus didesak oleh negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap pekerja migran yang telah ditempatkan oleh negara tersebut. Hal ini didasarkan pada kondisi Indonesia yang dinilai rawan dari sisi sosial, maupun politik. Apabila Indonesia kembali menunda ratifikasi, maka investasi yang telah ditanamkan pada Indonesia diancam akan di tarik, sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang selama ini sudah terbukti mampu menghadapi krisis global.

Tuntutan juga datang dari masyarakat sipil (*civil society*) dan organisasi internasional yang menuntut hadirnya instrumen perlindungan hak pekerja migran di Indonesia. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang timbul pada pekerja migran Indonesia di luar negeri yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah, dengan adanya Konvensi yang mengikat maka pemerintah diharapkan dapat

meningkatkan perannya melindungi warga negaranya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Beban yang ditanggung Indonesia sebagai negara penandatangan pada Konvensi ini turut mendorong Indonesia pada akhirnya harus menentukan sikap apakah meratifikasi atau menunda. Dengan konsekuensi bahwa apabila Indonesia tidak meratifikasi maka negara-negara yang telah meratifikasi dapat memberikan tekanan pada pemerintah Indonesia.

Dari kedua alternatif yang ada dapat dibuat suatu perbandingan keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia terkait dengan ratifikasi Konvensi ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, sehingga pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk meratifikasi konvensi ini setelah 8 tahun (2004-2012).

E. Hipotesa

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan hipotesa mengenai alasan mengapa pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran adalah untuk keuntungan ekonomi yakni menjaga investasi asing di Indonesia melalui perlindungan tenaga kerja asing (TKA) yang merupakan penggerak investasi dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

- 2) Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran adalah untuk keuntungan politik yaitu meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia terhadap negara-negara tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Pertama, aspek-aspek yang diteliti meliputi kajian Hubungan Internasional, dan kajian Hukum Internasional. Kedua, peneliti akan memulai penelusuran waktu dimulai pada saat Konvensi ini ditandatangani pada September 2004, sampai ratifikasi Konvensi menjadi Undang-Undang (UU) pada Mei 2012. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan data dan fakta sebelum tahun 2004 sebagai unit eksplanasi yang memperkuat analisis, terutama dalam melihat perkembangan kebijakan pemerintah terkait pekerja migran.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari beberapa sumber yaitu studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, majalah, surat kabar, dan data elektronik (internet) yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Apabila memungkinkan maka peneliti berusaha untuk mencari data primer yakni wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini sebagai konfirmasi atas data sekunder yang telah didapatkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab dua membahas tentang kondisi ketenagakerjaan Indonesia ditinjau dari dua sisi yakni pekerja migran Indonesia/tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan pekerja migran asing/tenaga kerja asing di Indonesia.

BAB III : Bab tiga membahas tentang prosedur pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran oleh Indonesia. Di awal bagian ini dibahas tentang definisi dan pengertian konvensi internasional, prosedur pembuatan perjanjian internasional secara konseptual dan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta mekanisme ratifikasi di parlemen. Sedangkan bagian tentang konvensi internasional dijelaskan sejarah pembentukan, perkembangan, dan ringkasan klausul-klausul yang terdapat dalam Konvensi.

BAB IV : Bab empat membahas tentang alasan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran diawali dengan penjelasan tentang kronologi keterlibatan

pemerintah Indonesia dalam Konvensi tersebut, dilanjutkan dengan rasionalitas yang dibangun pemerintah berdasarkan alasan ekonomi dan alasan politik, ditutup dengan pemaparan konsekuensi pemerintah terhadap TKA sebagai akibat langsung dari Konvensi tersebut, serta perbandingan sikap dengan Meksiko dalam merespon ratifikasi Konvensi tersebut. Pada bagian ini pembuktian-pembuktian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya diulas kembali untuk memperkuat konstruksi pemikiran dan juga argumentasi penulis.

BAB V : Bab lima berisi kesimpulan, yang menguraikan poin-poin penting terkait atas alasan ekonomi dan politik pemerintah Indonesia yang mendasari rasionalitas sehingga meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran. Disertai saran dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya maupun bagi pengambil keputusan (*stakeholder*).

BAB II

KONDISI KETENAGAKERJAAN INDONESIA

A. Definisi Konseptual Ketenagakerjaan

A.1 Definisi Umum

Sebelum lebih jauh membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA), serta perbandingan diantara keduanya. Sebagai pengantar, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian/definisi di bidang ketenagakerjaan.

Pada Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia mendefinisikan ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lebih lanjut dijelaskan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Selanjutnya pada Bab VI Pasal 31 UU No. 13/2003 tentang penempatan tenaga kerja, pemerintah menyatakan bahwa, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 32 menyatakan bahwa: (1) penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi; (2) penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum; serta (3)

penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Pasal 33 menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja terdiri atas: (a) penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan (b) penempatan tenaga kerja di luar negeri. Adapun pembahasan TKI di luar negeri menurut pasal 34 menyatakan bahwa, ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.¹ Sedangkan pembahasan TKA diuraikan dalam UU No. 13/2003 pada bagian lainnya, dilengkapi dengan peraturan menteri sebagai pendukung dan acuan pelaksanaan teknis.

Dalam penyaluran upah (gaji) pekerja migran termasuk TKI di luar negeri, dan TKA di Indonesia maka dilakukan pengiriman gaji melalui berbagai jalur perbankan. Dovelyn dan Ruiz (2007) menyatakan bahwa remitan (*remittance*) adalah transfer uang oleh pekerja asing ke negara dan tempat mereka berasal. Menurut pengertian lain, diartikan sebagai satu pembayaran untuk pembelian barang-barang atau jasa yang ditransferkan terhadap seorang pada jarak jauh. Remitansi merupakan sebagian dari pendapatan pekerja asing (internasional) yang dikirimkan ke negara dan tempat pekerja berasal.

A.2 Definisi Konseptual Tenaga Kerja Indonesia

Sehubungan dengan definisi konseptual TKI, maka perlu diketahui bahwa aturan terkait TKI di luar negeri bernaung di bawah payung hukum Undang-

¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Undang (UU) No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (PPTKILN).

Adapun pasal 1 menerangkan bahwa Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.² Sementara itu, Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) didefinisikan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Masih dalam pasal 1, terkait kegiatan penempatan TKI UU No. 39/2004 ini memaknainya sebagai kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Selanjutnya Perlindungan TKI didefinisikan upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Mekanisme penempatan TKI di luar negeri mengacu pada pasal 10 UU No. 39/2004 menyatakan bahwa pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri atas: (a) Pemerintah dan (b) Pelaksana penempatan TKI swasta. Pada pasal 1 UU No. 39/2004 didefinisikan Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan

² _____, (2010), Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Bandung: Fokus Media. h. 3.

Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri, lebih lanjut dijelaskan bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Penjelasan di atas merupakan pengantar untuk penjelasan teknis terkait pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Terkait syarat TKI untuk bekerja di luar negeri, Pasal 35 UU No. 39/2004 menjelaskan syarat-syarat yang dimaksud antara lain: (1) berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, kecuali bagi calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan/rumah tangga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun; (2) sehat jasmani dan rohani; (3) tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; (4) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP atau yang sederajat; (5) terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan di daerah tempat tinggalnya; (6) memiliki dokumen lengkap.³

Selanjutnya, dokumen yang harus dimiliki oleh TKI/CTKI sebagaimana disebutkan pada poin 6 Pasal 35 UU No. 39/2004 tentang syarat bekerja di luar negeri dijelaskan pada pasal 51 UU No. 39/2004 antara lain: (1) KTP, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; (2) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; (3) surat keterangan izin suami/istri, izin orang tua atau izin wali; (4) sertifikasi kompetensi kerja; (5) surat keterangan sehat berdasarkan hasil

³ Ibid. hh. 16-17.

pemeriksaan kesehatan dan psikologi; (6) paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; (7) visa kerja; (8) perjanjian penempatan TKI; (9) perjanjian kerja; dan (10) KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).⁴

Walaupun proses penempatan TKI dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan pihak swasta (dalam hal ini PPTKIS), namun pada dasarnya masa pra-penempatan, penempatan, hingga purna-penempatan merupakan tanggungjawab Pemerintah atas TKI (yang juga merupakan WNI). Selengkapnya berikut dipaparkan tugas, tanggungjawab, dan kewajiban pemerintah yang terdapat pada Bab II UU No. 39/2004 sebagai berikut:

Pasal 5 UU No. 39/2004 menyatakan (1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 6 UU No. 39/2004 menyatakan Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 7, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban: (a) menjamin terpenuhinya hak hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; (b) mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; (c) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar

⁴ Ibid. h. 20.

negeri; (d) melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan (e) memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Terkait dengan pelaksanaan dari UU No. 39/2004, maka pemerintah membagi tugas, yakni masa pra-penempatan dan purna-penempatan dilimpahkan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan masa penempatan merupakan tanggungjawab Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang bernaung di dalam Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan serangkaian aturan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, beserta penyelenggara penempatannya yang melibatkan pemerintah dan pihak swasta, begitupula dengan upaya penempatan dan perlindungan yang telah disusun secara sistematis. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual pemerintah Indonesia telah memperlihatkan upaya untuk memberikan perhatian kepada TKI, terlepas dari implementasi dan evaluasi di lapangan. Selanjutnya, pembahasan/analisis pada bagian-bagian selanjutnya, acuan yang akan digunakan oleh penulis yakni UU No. 39/2004, namun demikian penggabungan/percampuran data antara TKI yang telah memenuhi kualifikasi dengan TKI yang tidak memenuhi kualifikasi tetap mungkin terjadi.

A.3 Definisi Konseptual Tenaga Kerja Asing

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, definisi konseptual tentang TKA mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri sebagai pendukung dan acuan pelaksanaan teknis.

Definisi tentang tenaga kerja asing terdapat pada Pasal 1 UU No. 13/2003 yang menyatakan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Sedangkan definisi pemberi kerja yang juga terdapat pada pasal 1 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Terkait dengan jalur masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dapat diidentifikasi melalui dua jalur yaitu penugasan dan rekrutmen. Penugasan adalah penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi/jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaannya di Indonesia. Berdasarkan jangka waktunya, penugasan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu contoh penugasan yang bersifat jangka pendek (kurang dari 1 tahun) adalah pemasangan instalasi/mesin/teknologi yang dibeli oleh perusahaan di Indonesia sekaligus melakukan pelatihan kepada pegawai yang akan menanganinya. Sedangkan contoh penugasan yang bersifat jangka panjang (lebih dari 1 tahun) adalah pekerjaan manajerial dan pengelolaan perusahaan.

Lain halnya dengan rekrutmen yakni masuknya TKA melalui jalur penerimaan pegawai baik yang berstatus kontrak maupun tetap. Rekrutmen

tersebut pada umumnya dilakukan oleh perusahaan lokal yang memiliki bisnis berskala global sehingga membutuhkan tenaga kerja asing sebagai upaya menghadapi kompetisi di dunia internasional.⁵ Lebih lanjut pada Bab VIII dibahas tentang penggunaan tenaga kerja asing yang dipaparkan dalam 8 pasal (Pasal 42-49).

Pasal 42 UU No. 13/2003 menyatakan kriteria penggunaan tenaga kerja asing sebagai berikut: (1) setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk; (2) pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing; (3) kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler; (4) tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu; (5) ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri; (6) tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Izin tertulis dari menteri sebagaimana yang dimaksud pasal 42 ayat 1 UU No. 13/2003 secara teknis didukung oleh peraturan pendukung sebagai berikut: (1) Kepmenakertrans No. Kep. 228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; (2) Kepmenakertrans No. Kep. 223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang

⁵ Bank Indonesia, (2010), *Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2009*, Jakarta: Bank Indonesia. h. 11.

dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi; (3) Kepmenakertrans No. kep. 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing; dan (4) Permenakertrans No. Per.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA.⁶

Terkait dengan tatacara administratif penggunaan TKA di Indonesia merujuk pada Kepmenakertrans No. 228/Men/2003 tentang Tatacara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTKA) yang merupakan instruksi teknis pelaksanaan Pasal 43 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003. Pada pasal 3 Kepmenakertrans tersebut menyatakan bahwa: (1) pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing); kemudian (2) RPTKA digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan TKA (IMTA).

Isi RPTKA tersebut berdasarkan Pasal 43 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 sekurang-kurangnya memuat keterangan: (a) alasan penggunaan tenaga kerja asing; (b) jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; (c) jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan (d) penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja.

Melalui situs *tka-online.depnakertrans.go.id*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerangkan hal-hal terkait penempatan tenaga kerja asing di Indonesia yang harus mengikuti prosedur untuk mendapatkan RPTKA dan IMTA, antara lain sebagai berikut: (1) untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi

⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Kemenakertrans, *Peraturan Penggunaan TKA* - <http://hrmkeys.files.wordpress.com/2012/02/peraturan-penggunana-tka.pdf>, slide 3.

kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi alasan penggunaan TKA dengan melampirkan: (a) formulir RPTKA yang sudah dilengkapi; (b) surat izin usaha dari instansi yang berwenang; (c) akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang; (d) keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat; (e) bagan struktur organisasi perusahaan; (f) surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan; (g) copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan; dan (h) rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan. (2) formulir RPTKA dimaksud memuat: (a) identitas pemberi kerja TKA; (b) jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan; (c) Besarnya upah TKA yang persyaratan jabatan TKA; (d) jumlah TKA; (e) uraian jabatan dan persyaratan jabatan dibayarkan TKA; (f) lokasi kerja; (g) jangka waktu penggunaan TKA; (h) penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan; dan (i) Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

Tentang rekomendasi, Kemenakertrans menjelaskan sebagai berikut: (1) pemberian kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA-01) dengan melampirkan: (a) Copy keputusan pengesahan RPTKA; (b) copy paspor TKA yang akan dipekerjakan; (c) daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; (d) copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang

akan dipekerjakan; (e) copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping ; dan (f) pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar; (2) apabila permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, Direktur harus menerbitkan rekomendasi (TA-01) dan menyampaikan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim), Direktorat Jenderal Imigrasi dalam waktu selambat-lambatnya pada hari berikutnya dengan ditembuskan kepada pemberi kerja TKA; dan (3) rekomendasi visa (TA-01) sebagaimana dimaksud diatas berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan.

Terkait IMTA, Kemenakertrans menerangkan sebagai berikut: (1) dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan: (a) copy draft perjanjian kerja; (b) bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; (c) copy polis asuransi; (d) copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa ; dan, (e) Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; (2) dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Direktur menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, dan (3) Jangka waktu berlakunya IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Penjelasan terkait prosedur penempatan tenaga kerja asing seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa birokrasi penempatan tenaga kerja asing di Indonesia cukup baik dan terintegrasi, di lihat dari aturan pada UU No.

13/ 2003 yang diikuti aturan pendukung melalui aturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini juga diikuti juga dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada pemberi kerja untuk mempekerjakan TKA.

B. Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

B.1 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sulit untuk dipastikan. Hal tersebut dikarenakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) tidak mempunyai data pasti jumlah warga Negara Indonesia (WNI) yang juga termasuk di dalamnya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri.

Salah seorang anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bidang Ketenagakerjaan Poempida Hidayatullah pernah mengajukan keberatan berkaitan dengan ketidaktersediaan data TKI di Kemlu. Komplain tersebut kemudian ditanggapi oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Tatang Budie Utama Razak yang membenarkan pernyataan Poempida. Pihak Kemlu memang tidak memiliki data pasti keberadaan WNI di luar negeri, terutama TKI. Hal itu dikarenakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tidak melaporkan data ke Kemlu. Adapun mekanisme pelaporan data WNI yang ada di luar negeri berasal dari data Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang disampaikan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BNP2TKI) lalu dilaporkan kepada perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat.⁷

Dalam sebuah acara seminar di Jakarta, Februari 2012. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Tatang Budie Utama Razak menyatakan bahwa berdasarkan Pusat Data (*Database*) Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Tahun 2011 terdapat 3.091.284 jiwa warga Negara Indonesia di luar negeri. Sedangkan 1.820.077 jiwa diantaranya merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kemudian 253.685 jiwa profesional, 198.428 jiwa ABK, 626.621 jiwa pelajar, dan 192.473 jiwa merupakan WNI yang menikah dengan WNA. Hal ini menunjukkan 60% dari total WNI di luar negeri merupakan TKI.⁸

Lebih spesifik TKI yang berjumlah 1.820.077 jiwa yang merupakan 60% WNI di luar negeri terbagi ke dalam dua kategori yakni TKI sektor formal, dan sektor informal. TKI sektor formal sebanyak 169.303 jiwa, sedangkan sektor informal mencapai 1.650.774 jiwa. Tatang Budie memberikan catatan atas informasi yang diberikan yakni: (1) jumlah TKI di luar negeri kemungkinan lebih besar 2 atau 3 kali lipat, (2) Kemlu RI mendapatkan data dari perwakilan RI berdasarkan hasil pelayanan publik dan *reach out*, (3) sesuai ketentuan seharusnya PPTKIS melaporkan data TKI yang dikirim ke luar negeri ke perwakilan RI, namun tidak dilakukan, dan (4) sebesar 84% (1.386.650 jiwa) dari jumlah TKI informal tersebut merupakan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).⁹

⁷ Kontan Online, (2012), *Kemlu tidak punya data WNI di luar negeri* - <http://nasional.kontan.co.id/news/kemlu-tidak-punya-data-wni-di-luar-negeri>.

⁸ Tatang Budie Utama Razak, (2012), *Penguatan Peranan Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri RI dalam Rangka Meningkatkan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri* pada Seminar “Revisi UU No. 39/2004 sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan TKI di Luar Negeri”, Jakarta, 29 Februari 2012. Slide 2-3.

⁹ Ibid.

Data terbaru dari Kemlu RI melalui Tatang Budie yang disampaikan pada Sesi *Taskforce Migrant Workers* (MW) dalam 2nd *Congress of Indonesian Diaspora* menyatakan bahwa saat ini komposisi TKI di luar negeri mencapai 2.536.429 jiwa yang terdiri atas TKI formal sebanyak 920.621 jiwa, sedangkan TKI informal (domestik) mencapai 1.615.808 jiwa. Dalam keterangannya ini Tatang Budie kembali memberikan catatan bahwa (1) jumlah TKI di luar negeri kemungkinan besar 2 atau 3 kali lipat, (2) Kemlu mendapatkan data dari Perwakilan RI berdasarkan lapor diri dan pembuatan dokumen perjalanan, dan (3) sesuai ketentuan seharusnya PPTKIS melaporkan data TKI yang dikirim ke luar negeri ke Perwakilan RI, namun tidak dilakukan.¹⁰

Kedua data di atas mewakili dinamika pertumbuhan jumlah TKI sejak 2011 hingga pertengahan 2013. Berdasarkan kedua data tersebut dapat dipahami bahwa terjadi pertumbuhan jumlah TKI yang cukup signifikan selama 2 tahun terakhir yakni 1.820.077 jiwa (2011) dan 2.536.429 jiwa (pertengahan 2013), hal ini berarti terdapat kenaikan hingga 716.352 jiwa. Apabila dilihat dari sektor penyalurannya, maka sektor formal yang justru mengalami kenaikan yang drastis hingga 5 kali lipat, sedangkan sektor informal justru mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Namun demikian sektor informal masih tetap mendominasi penyaluran TKI.

Berdasarkan klaim yang telah dinyatakan oleh Tatang Budie terhadap data yang dipublikasikan tersebut, maka dapat diasumsikan beberapa hal: (1) pendataan dari perwakilan RI di luar negeri semakin gencar melakukan verifikasi

¹⁰ Tatang Budie Utama Razak, (2013), *Memaksimalkan Fungsi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sinergitas Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah* pada 2nd *Congress of Indonesian Diaspora*, Jakarta, 19 Agustus 2013. Slide 15.

terhadap TKI, sehingga semakin banyak TKI sektor formal yang terdata, ataukah (2) penyaluran TKI sektor formal mulai meningkat secara signifikan seiring pemberlakuan beragam aturan pembatasan oleh pemerintah terhadap TKI sektor informal.

Selanjutnya data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenakertrans RI) dalam laporan yang dirilis oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi (Pusdatinaker Balitfo) Kemenakertrans RI juga menunjukkan jumlah yang signifikan terkait TKI yang diberangkatkan ke luar negeri pada periode 2010-2012 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kerja Luar Negeri Diberangkatkan 2010, 2011 dan 2012

Tahun Penempatan								
2010		2011			s.d. Nov. 2012			
L	P	L	P	TK	Formal		Informal	
					L	P	L	P
275.454	584.632	210.116	376.137	369	187.484	47.245	7.367	208.505
					234.729		215.872	
860.086		586.802			450.601			

Sumber: Diolah dari Data Pusdatinaker Kemenakertrans (2010¹¹, 2011¹² dan 2012¹³)

Berdasarkan data di atas, pada periode 2010 hingga November 2012 TKI yang diberangkatkan ke luar negeri apabila di akumulasi hampir mencapai 2 juta jiwa, tepatnya 1.897.489 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi

¹¹ Pusdatinaker, (2010), Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun 2010 - <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/katalog/xdownload.php?f=247>.

¹² Pusdatinaker, (2011), Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun 2011 - <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/katalog/xdownload.php?f=265>.

¹³ Pusdatinaker, (2012), Penempatan TKI di Luar Negeri Menurut Negara dan Jenis Kelamin November 2012 - <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/katalog/xdownload.php?f=372>.

penurunan yang cukup signifikan selama 3 tahun terakhir dalam pemberangkatan TKI. Secara lebih spesifik melalui perbandingan gender, terlihat bahwa rasio pemberangkatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) masih menempati posisi dominan atas laki-laki sejak 2010 hingga November 2012.

Data yang menunjukkan klasifikasi lebih spesifik terdapat pada data pemberangkatan November 2012 yang mencantumkan sektor penyaluran yakni formal, maupun informal. Apabila disandingkan dengan data pada tahun 2010 dan 2011 terlihat adanya penurunan TKI yang diberangkatkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh aturan pembatasan penyaluran TKI sektor informal, serta memberikan dampak kepada mekanisme penyaluran TKI sektor informal dari PPTKIS.

Dikarenakan tidak adanya jumlah pasti tentang keberadaan TKI di luar negeri, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat yang merupakan pejabat setingkat menteri dalam salah satu wawancaranya dengan detik Finance (14/3/2013) justru memperkirakan bahwa jumlah TKI pada pertengahan 2013 telah mencapai 6,5 juta jiwa dan TKI tersebut bekerja di 142 negara. Jumhur mengklaim bahwa data tersebut bersumber dari 392 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Padahal menurut Jumhur, Indonesia memiliki 500 Kabupaten/Kota yang berarti prediksi tersebut akan bertambah kemudian.¹⁴

Apabila ketiga data di atas dikomparasikan, maka klaim Tatang Budie tentang kemungkinan jumlah TKI di luar negeri yang dapat mencapai 2 hingga 3

¹⁴ detik Finance, (2013), *Jumlah TKI Capai 6,5 juta, Tersebar di 142 negara* - <http://finance.detik.com/read/2013/03/14/174040/2194313/4/jumlah-tki-capai-65-juta-tersebar-di-142-negara>

kali lipat dari data yang diterima oleh Kemlu RI melalui pernyataan Mohammad Jumhur Hidayat dapat terkonfirmasi. Dengan menggunakan asumsi data terakhir 2.536.429 jiwa (pertengahan 2013) dari Kemlu RI dan prakiraan 6,5 juta jiwa di 142 negara dari Kepala BNP2TKI, maka selisih diantara kedua data tersebut bisa mencapai 3 kali lipat antara data Kemlu RI dengan prakiraan Kepala BNP2TKI.

Paparan di atas sebenarnya ingin menunjukkan bahwa saat ini jumlah TKI di luar negeri masih *unaccountable* (belum di audit), pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI yang mengkonfirmasi kealpaan Kemlu RI dalam pendataan pasti TKI di luar negeri. Hal ini tentunya dapat berdampak terhadap langkah-langkah pembuatan keputusan di bidang ketenagakerjaan yang membutuhkan referensi akurat terkait jumlah TKI di luar negeri. Namun demikian berdasarkan tiga sumber data di atas, yakni Kemlu RI, Kemenakertrans RI, dan BNP2TKI memberikan penulis gambaran jumlah TKI di luar negeri berkisar 2,5 juta jiwa (Kemlu RI) - 6,5 juta jiwa (BNP2TKI).

B.2 Gambaran Umum Negara Tujuan TKI

Negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia (TKI) umumnya adalah negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur dan Timur Tengah, di mana Malaysia dan Arab Saudi merupakan dua negara tujuan utama.¹⁵ Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

¹⁵ International Labour Organization, (2013), *Laporan ILO: 10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia* - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf, h.4.

Tabel 2.2 10 Negara Tujuan Utama TKI, 2011

No	Negara tujuan	2011
1.	Saudi Arabia	137.643
2.	Malaysia	134.108
3.	Taiwan	73.498
4.	Hong Kong	50.283
5.	Singapura	47.781
6.	Uni Emirat Arab (UEA)	39.857
7.	Qatar	16.578
8.	Amerika Serikat	13.746
9.	Korea Selatan	11.390
10.	Brunei Darussalam	10.805

Sumber: ILO & BNP2TKI (2011)

Data di atas menggambarkan kondisi pemberangkatan TKI ke negara tujuan selama tahun 2011. Terlihat bahwa Arab Saudi merupakan negara tujuan utama, diikuti oleh Malaysia di urutan kedua, dan Taiwan di urutan ketiga. Namun demikian data di atas belum menggambarkan sebaran TKI secara keseluruhan di negara tujuan.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya terkait jumlah TKI di luar negeri, Kemlu RI belum dapat memastikan secara pasti. Namun demikian, data ini merupakan gambaran secara umum terhadap karakteristik negara tujuan TKI. Berdasarkan data Kemlu RI tahun 2011 menunjukkan bahwa TKI sektor formal berjumlah 169.303 jiwa, sedangkan TKI sektor informal mencapai 1.650.774 jiwa. Namun demikian, data tersebut hanya merinci karakteristik negara tujuan TKI pada TKI sektor informal. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Jumlah TKI Informal di Luar Negeri

No.	Negara/ Wilayah	Jumlah TKI Informal
1.	Arab Saudi	555.813
2.	Malaysia	347.989
3.	Taiwan	150.768
4.	Hong Kong	147.143
5.	Singapura	105.640
6.	Syria	80.289
7.	Kuwait	76.838
8.	Uni Arab Emirat	78.196
9.	Jordania	30.527
10.	Brunei Darussalam	28.852
11.	Qatar	24.422
12.	Oman	25.103
13.	Bahrain	5.945
14.	Macao	5.630
15.	Mesir	1.159
16.	Yaman	3.181
17.	Libya	198
18.	Tunis	43
19.	Sudan	344
20.	Lebanon	79
21.	Aljazair	35
22.	Afrika Selatan	37
23.	Maroko	120
24.	Iran	15
	JUMLAH	1.650.774

Sumber: Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2011

Data di atas menunjukkan hasil yang relatif sama dengan data negara tujuan utama yang dirilis oleh ILO pada bagian sebelumnya. Dimana, Arab Saudi menempati posisi pertama, disusul Malaysia pada posisi kedua, Taiwan di posisi ketiga, Hongkong di posisi keempat, dan Singapura di posisi kelima.

Namun demikian untuk beberapa negara seperti Amerika Serikat, maupun Korea Selatan yang masuk ke dalam 10 negara tujuan utama pemberangkatan TKI, namun tidak masuk pada daftar di atas dapat disebabkan karena kedua

negara tersebut banyak menerima TKI pada sektor formal, termasuk kalangan profesional, maupun teknisi.

Gaji TKI di Negara Tujuan

Gaji yang diterima TKI cukup bervariasi di tiap negara dan juga ditentukan oleh jenis pekerjaannya (formal atau informal). Khusus untuk pekerja informal di kawasan Timur Tengah, gaji yang diterima TKI berkisar antara Rp. 1,5 juta - Rp. 2 juta per bulan untuk masa kontrak 2 tahun. Sementara di kawasan Asia Pasifik untuk sektor informal berkisar antara Rp. 1,3 juta – Rp5,4 juta/bulan sebagaimana tampak pada tabel berikut.¹⁶

Tabel 2.4 Gaji TKI, Menurut Kawasan dan Negara Penempatan

Kawasan	Negara	Gaji per Bulan	
		Informal	Formal
Timur Tengah	Arab Saudi	USD 150 - 214 / Rp1.5 - Rp2.1 juta	USD 250 - 18,000 / Rp2.5 - Rp180 juta
	Kuwait	USD 150 - 200 / Rp1.5 - Rp2 juta	USD 250 - 18,000 / Rp2.5 - Rp180 juta
	Uni Emirat Arab	USD 150 - 214 / Rp1.5 - Rp2.1 juta	USD 250 - 18,000 / Rp2.5 - Rp180 juta
Asia Pasifik	Hongkong	HKD 3,480 - 3,580 / Rp4.1 - Rp4.2 juta	NA
	Taiwan	NT 18,000 / Rp5.4 juta	NA
	Singapura	SGD 300 - 380 / Rp1.8 - Rp2.3 juta	NA
	Malaysia	MYR500 - 600 / Rp1.3 - Rp1.57 juta	NA

Sumber: BNP2TKI & Bank Indonesia (2009)

Terkait dengan gaji TKI, Pemerintah Indonesia melalui BNP2TKI terus mengupayakan untuk memperoleh kenaikan upah minimum TKI Informal. Berdasarkan informasi upaya tersebut telah berhasil menaikkan gaji minimum TKI di Arab Saudi per Oktober 2007 dari 600 real menjadi 800 real dan di Singapura dari SGD 280 menjadi SGD 350 per Juni 2007. Meskipun demikian, dari hasil pembicaraan dengan beberapa PPTKIS, diketahui bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar atau belum diimplementasikan. Hal ini

¹⁶ Bank Indonesia, (2009), *Laporan Survei Nasional Pola Remitansi TKI Tahun 2008*, Jakarta: Bank Indonesia. h. 17.

dikarenakan pada dasarnya Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur gaji warganegaranya di negara lain.¹⁷

Di negara penempatan dengan mekanisme antar-pemerintah (*government to government/G to G*) seperti Jepang, TKI yang menjadi perawat (Nurse) mendapatkan gaji sebesar 200 ribu yen setara Rp20 juta dan untuk perawat manula (careworker) sebesar 150 ribu yen atau setara Rp15 juta. Sedangkan untuk TKI ke Taiwan (2013), mendapatkan gaji sebesar 19.047 won setara Rp6 juta. Afrika (Geunia Equatorial) mendapatkan USD500-USD1.200 setara Rp4,5 hingga Rp10,8 juta, Zambia mendapatkan USD650 setara Rp6,5 juta, lalu Papua Nugini sebesar USD400-USD2.000 setara Rp3,6 juta hingga Rp18 juta.¹⁸

Selanjutnya, TKI yang bekerja di Myanmar mendapatkan gaji sekitar Rp4 juta hingga Rp10 juta. Kemudian untuk Amerika mendapatkan gaji USD 500-USD 1.900 setara Rp4,5 juta hingga Rp17 juta. Lalu yang ke Eropa dari pihak swasta mendapatkan USD 285 - 2.200 setara Rp2,5 juta hingga Rp18,8 juta dan untuk yang ke Eropa mendapatkan USD 850 - 1.500 setara Rp7,6 juta hingga Rp13,5 juta.¹⁹

Data pertama memang tidak spesifik menunjukkan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh TKI di negara penempatan kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik pada tahun 2007. Sedangkan data berikutnya menggambarkan kondisi kekinian terkait penggajian TKI di negara penempatan Jepang, Taiwan, Afrika, Zambia, Papua Nugini, Myanmar, Amerika Serikat, dan Eropa.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Okezone, (2013), Daftar Gaji TKI di Luar Negeri - <http://economy.okezone.com/read/2013/06/24/20/826788/nih-daftar-gaji-tki-di-luar-negeri>

¹⁹ Ibid.

Data-data yang telah dipaparkan di atas tidak dapat diperbandingkan antara satu negara dengan negara lain, karena ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi jumlah gaji yang diterima TKI, seperti biaya hidup dan jenis pekerjaan yang dijalani di negara penempatan. Namun demikian, dapat dipahami bahwa data tersebut merupakan gambaran umum kondisi penggajian TKI.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diperhatikan beberapa hal: (1) penyaluran TKI terkonsentrasi pada kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Timur Tengah, dan (2) gaji TKI di negara tujuan kerja menunjukkan bahwa profesi TKI di negara tersebut pada posisi berketerampilan rendah. Karakteristik ini akan menentukan rasionalitas pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan pendukung dalam rangka pemenuhan hak-hak TKI selama berada di negara tujuan.

B.3 Permasalahan Umum Tenaga Kerja Indonesia

Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menunjukkan kasus yang menimpa TKI selama tahun 2010 sebanyak 60.399 kasus dan tahun 2011 sebanyak 44.573 kasus. Sedangkan data LSM *Migrant Care* mencatat sebanyak 5.314 kasus kekerasan yang dialami TKI di luar negeri selama kurun 2009-2010 dengan rincian Malaysia sebanyak 1.748 kasus, Arab Saudi 1.048 kasus, Yordania 1.004 kasus, Kuwait 84 kasus, Abu Dhabi 533 kasus, Taiwan 103 kasus, Hong Kong 78 kasus, dan Singapura 16 kasus.²⁰

Data di atas hanya menunjukkan jumlah kasus yang dialami oleh TKI, namun tidak menyebutkan secara detail permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan

²⁰ Antara Jatim, (2012), *Kapan Kekerasan TKI akan Berakhir?* - <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/87574/kapan-kekerasan-tki-akan-berakhir->

hasil penelitian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), berikut permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri pada masa penempatan.²¹

Pada umumnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), di negara-negara tujuan penempatan bekerja pada sektor-sektor pekerjaan yang sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh Warga Negara pemberi kerja karena kondisi kerja yang keras, upah, status rendah dan perlindungan minim. Memperhatikan kondisi demikian, maka TKI menghadapi berbagai permasalahan.

Administrasi Penempatan

Tercatat 12 dari 26 kasus yang dialami TKI di negara penempatan yang berarti hampir sebagian besar permasalahan TKI termasuk dalam kategori administrasi penempatan. Dalam kategori ini sebagian besar pelaku di negara tujuan antara lain: Agensi, majikan/perusahaan, bahkan oknum aparat KBRI/Konjen RI. Selengkapnya dipaparkan berikut: (a) diperjualbelikan antar Agensi di luar negeri, (b) jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja (PK), (c) gaji dipotong oleh PPTKIS bekerjasama dengan Agensi yang besarnya melampaui ketentuan, (d) memperpanjang kontrak kerja tidak ijin dari keluarga dan menggunakan kontrak kerja yang lama, (e) pungutan yang tinggi oleh Agensi saat perpanjangan kontrak kerja, (f) dipulangkan sepihak oleh Agensi setelah usai masa pemotongan gaji oleh Agensi, sehingga tak pernah menerima gaji penuh, (g) gaji tidak dibayar, (h) sikap aparat KBRI/Konjen RI yang tidak mau membela dan menelantarkan, (i) penyelesaian kasus tidak tuntas dan dipulangkan karena

²¹ BNP2TKI - <http://www.bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html>

lamanya proses penyelesaian kasus, (j) dikenai pungutan oleh aparat KBRI/Konjen RI di luar negeri dengan berbagai dalih, (k) ketiadaan dan lambannya informasi untuk keluarga jika mengalami sakit, di penjara atau meninggal dunia, dan (l) sebelum dipulangkan, dipaksa menandatangani surat yang kemudian diketahui isinya adalah pernyataan telah menerima gaji, padahal gajinya belum dibayar/tidak diberikan dan surat pernyataan tersebut ditulis dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh TKI.

Perlakuan oleh Majikan/Perusahaan

Berbeda dengan kategori Administrasi Penempatan, kategori perlakuan di negara penempatan lebih menitikberatkan pada permasalahan yang diterima oleh TKI di negara penempatan dikarenakan oleh aturan yang diberlakukan oleh majikan (bagi TKI di sektor informal) atau perusahaan (bagi TKI di sektor formal) Selengkapnya dipaparkan sebagai berikut: (a) jam kerja melampaui batas, tanpa ada uang lembur, (b) tidak memegang dokumen apapun karena, semua dokumen ditahan majikan, (c) dilarang berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan keluarga, (d) akomodasi dan makanan di rumah majikan tidak memadai, dan (e) dilarang menjalankan ibadah, dipaksa memasak dan makan makanan haram (daging babi).

Kriminalisasi

Lain halnya dengan dua kategori sebelumnya. Kategori kriminalisasi merupakan penggolongan bagi permasalahan yang menimbulkan dampak hukum bagi pelakunya terhadap tindakan yang dilakukan terhadap korbannya (dalam hal

ini TKI). Selengkapnya dipaparkan sebagai berikut: (a) disekap oleh majikan atau Agensi, (b) Di PHK sepihak dan dipulangkan majikan tanpa diberikan hak-haknya, (c) penipuan dengan modus medis yang direkayasa dan akhirnya dipulangkan karena dianggap tidak fit, (d) dijebak menjadi pelacur di daerah transit, (e) disiksa, dianiaya, makan makanan basi dan bekas, diperkosa oleh majikan atau oleh pegawai Agensi, (f) dipenjara dengan berbagai rekayasa tuduhan, (g) bunuh diri atau membunuh atau melakukan tindakan pidana lainnya atau melakukan tindakan pidana lain karena putus asa akibat perlakuan buruk majikan/Agensi, (h) mengadu ke Polisi tetapi dikembalikan kepada Agensi, yang kemudian oleh agensi dipekerjakan secara ilegal, digaji murah atau tidak digaji, bahkan dilacurkan, dan (i) dideportasi tetapi tidak pernah sampai di rumah ditangkap oleh calo kemudian diberangkatkan kembali ke luar negeri secara ilegal.

Identifikasi terhadap 26 kasus yang seringkali dialami oleh TKI di negara penempatan memberikan kepada kita gambaran secara lebih nyata terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri. Tentunya sebuah permasalahan harus dicarikan solusinya. Aturan yang selama ini dijadikan landasan kebijakan Indonesia dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri belum memenuhi standar-standar internasional terkait perlindungan hak-haknya selama berada di negara tujuan. Hal ini disebabkan hukum nasional yang ada tidak dapat mengikat negara penempatan, karena asas berlakunya hanya di dalam yuridiksi negara pengirim, dan bukan negara tujuan kerja.

Maka dari itu, diperlukan suatu aturan yang diakui secara universal/internasional yang dapat menjadi landasan bagi kesepakatan kedua negara untuk merujuk pada aturan yang sama. Upayanya dengan menjadikan Indonesia sebagai negara pihak terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran, sehingga Indonesia bisa menetapkan standar perlindungan bagi TKI di luar negeri melalui harmonisasi dengan hukum nasional tentang perlindungan TKI yang telah ada, maupun menjadikan Konvensi tersebut sebagai posisi tawar (*bargaining position*) dalam negosiasi perlindungan TKI di negara tujuan kerja.

B.4 Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan TKI

Peran Pemerintah dalam Pemenuhan HAM

Jaminan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 Ayat 2. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam UUD 1945 (hasil amandemen kedua) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya dalam pasal 28 I ayat 4 menegaskan bahwa perlindungan (*protection*), pemajuan (*furtherance*), penegakan (*enforcement*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah.

Di samping itu, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang (UU) No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 39 ayat 2 menyebutkan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan

berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”. Sedangkan, dalam pasal 71 mengatur mengenai tanggungjawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik yang diatur dalam undang-undang, maupun hukum internasional.

Pelaksanaan amandemen kedua yakni masuknya nilai HAM pada UUD 1945 merupakan upaya menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga ditetapkannya HAM dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 berusaha untuk menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak-hak asasi tersebut.²²

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari negara/pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi warga negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya. Maka pembentukan aturan-aturan guna mendukung pelaksanaan amanat UUD 1945 tersebut perlu dilakukan.

Urgensi Perlindungan TKI sebagai Undang-Undang

Cikal bakal lahirnya UU yang mengatur tentang penempatan TKI di luar negeri dimulai dari Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Negeri (*Staatsblad* Tahun 1887 No. 8) yang berasal

²² Lalu Husni, (2012), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hh. 10-12.

dari aturan Belanda. Pasca kemerdekaan, aturan tersebut hanya ditambahkan dengan berbagai Peraturan Menteri sebagai petunjuk pelaksanaan. Sehingga jika dibandingkan dengan UU, maka aturan tersebut tentunya memiliki kekuatan hukum yang lemah. Perhatian pemerintah di bidang ketenagakerjaan baru dilakukan sejak reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan hadirnya UU tersebut, maka Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan agar penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam rangka tindak lanjut terhadap amanat UU 13/2003 tersebut, maka pada tahun 2004, disahkan sebuah UU yang mengatur tentang mekanisme penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yakni UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Husni (2012:98) berpendapat bahwa pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri sudah seharusnya diatur dengan undang-undang, karena: (a) bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya; (b) hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; (c) dalam kenyataan selama ini tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia; (d) negara wajib

menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi; (e) penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.²³

C. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Tenaga Kerja Asing di

Indonesia

C.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor, di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, perekonomian Indonesia dalam periode 2004-2008 menunjukkan kinerja yang cukup mengesankan dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5,0%. Bahkan pertumbuhan yang relatif cukup tinggi terjadi dalam 2 tahun terakhir yaitu 6,3% (2007) dan 6,1% (2008) meski dengan trend menurun di 2008 sebagai dampak dari krisis keuangan global.²⁴ Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

²³ *Ibid.*, h. 98.

²⁴ Bank Indonesia, (2010), *op. cit.*, h. 5.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dikutip dalam Bank Indonesia (2010)

Membaiknya kinerja ekspor dan investasi Indonesia menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008-2009 yang bertahan di posisi 4-5%. Dimana negara-negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, dikarenakan terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 yang berdampak pada perekonomian tahun 2009.

Jika dibandingkan dengan empat negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif, walaupun perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia vs. 4 Negara ASEAN

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), CEIC dikutip dalam Bank Indonesia (2010)

Dari grafik di atas dapat dilihat keempat negara ASEAN pada pertengahan 2008 sudah mulai terpengaruh dengan krisis keuangan global, Singapura menjadi negara yang langsung terdampak negatif di Q3 (Kuartal 3), selanjutnya negara ini tetap terdampak hingga Q2 (Kuartal 2). Hal yang sama terjadi pada Malaysia dan Thailand yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di Q4 (Kuartal 4). Lain halnya dengan Filipina dan Indonesia yang tetap bertahan di persentase positif, walaupun pertumbuhan ekonomi Filipina hanya 2%, sedangkan Indonesia mencapai 3,5%.²⁵

C.2 Perkembangan Investasi di Indonesia

Seperti telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa penopang kinerja ekonomi Indonesia di saat krisis keuangan global pada periode 2008-2009 yakni membaiknya sektor investasi. Peran investasi memang diakui sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional, perkembangan investasi di Indonesia juga menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

²⁵ Ibid., h. 6.

Tabel 2.5 Perkembangan Investasi di Indonesia Periode 2000 s.d. Sem I-2009 (%)

Tahun	Jumlah Investasi (Triliun Rp)			PDB Harga berlaku (triliun Rp)	% terhadap PDB Harga Berlaku		
	Pemerintah	Masyarakat	Total		Pemerintah	Masyarakat	Total
2000	39.2	170.8	210.0	1,389.8	2.8	12.3	15.1
2001	48.6	333.3	381.9	1,646.3	3.0	20.2	23.2
2002	52.3	329.9	382.2	1,821.8	2.9	18.1	21.0
2003	62.7	335.2	397.9	2,013.7	3.1	16.6	19.8
2004	68.3	438.9	507.2	2,295.8	3.0	19.1	22.1
2005	83.4	567.4	650.8	2,774.3	3.0	20.5	23.5
2006	102.1	697.2	799.3	3,339.2	3.1	20.9	23.9
2007	131.0	858.5	989.5	3,949.3	3.3	21.7	25.1
2008	153.9	1,223.4	1,377.3	4,954.0	3.1	24.7	27.8
Q2-2009	235.7	591.5	827.1	2,566.1	9.2	23.0	32.2

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dikutip dalam Bank Indonesia (2010)

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2008, total investasi (harga berlaku) di Indonesia mencapai Rp1.377,2 triliun. Angka ini meningkat sekitar 4,5 kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 2000 yang mencapai Rp296,0 triliun. Perkembangan investasi terkini s.d. semester I 2009 menunjukkan bahwa total investasi telah mencapai Rp827 triliun atau 60% dari total investasi keseluruhan tahun 2008. Lebih rendahnya pencapaian realisasi investasi di paruh pertama 2009 ditengarai sebagai imbas dari krisis keuangan global.

Apabila dilihat dari pelaku investasi, secara umum investasi yang dilakukan oleh sektor swasta mempunyai peranan yang lebih besar dibandingkan investasi oleh sektor pemerintah. Rata-rata kontribusi investasi sektor swasta mencapai 88% dari total investasi, sedangkan peranan investasi pemerintah hanya sebesar 12%. Disamping itu, perkembangan investasi sektor swasta dalam periode 2000-2008 mengalami peningkatan pesat yaitu naik 7 kali lipat, sedangkan investasi pemerintah dalam periode yang sama hanya naik 4 kali lipat.

Jika dilihat rasio investasi terhadap PDB (harga berlaku), akan tampak bahwa selama periode 2000- 2009, rata-rata persentase investasi terhadap PDB adalah sebesar 23,4%, dengan persentase investasi sektor swasta terhadap PDB

sebesar 19,7%, yang lebih besar dibandingkan persentase investasi sektor pemerintah terhadap PDB yang hanya sebesar 3,6%. Sehubungan dengan itu, dari perkembangan investasi di atas memberikan gambaran pula bahwa investasi atau penanaman modal khususnya yang dilakukan oleh sektor swasta telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ekonomi nasional dan lokal.²⁶ Selanjutnya, kinerja penanaman modal oleh sektor swasta baik yang dilakukan oleh pihak asing maupun domestik setelah periode krisis cenderung membaik. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk senantiasa memperbaiki iklim investasi yang lebih kondusif.

Minat investasi yang paling menonjol dan menunjukkan peningkatan adalah investasi dalam rangka penanaman modal asing (PMA). Dalam periode delapan tahun terakhir (2000-2008) realisasi PMA menunjukkan trend meningkat baik secara nilai maupun jumlah proyek. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Nilai dan Proyek PMA/PMDN Periode 2000-Feb 2009

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Nilai (Miliar Rp)	Proyek	Nilai (Juta USD)
2000	300	22,038	638	9,877.4
2001	160	9,891	454	3,509.4
2002	108	12,500	442	3,082.6
2003	120	12,247	569	5,445.3
2004	130	15,409	547	4,571.9
2005	215	30,724	907	8,911.0
2006	162	20,649	869	5,991.7
2007	159	34,879	982	10,341.4
2008	239	20,363	1138	14,870.0

Sumber: BKPM dikutip dalam Bank Indonesia (2010)

Pada tahun 2007 realisasi PMA mencapai 982 proyek (13%, yoy) dengan nilai USD10.341 miliar (73%, yoy) dan meningkat lagi di tahun 2008 dengan 1.138 proyek (16%, yoy) dengan nilai USD14.870 miliar (44%, yoy). Sementara

²⁶ Bank Indonesia, (2010), *op. cit.*, h. 8

itu, untuk realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) cenderung berfluktuatif baik dari sisi proyek maupun nilai. Pada tahun 2008, realisasi PMDN meningkat secara signifikan sebanyak 239 proyek (50%, yoy), namun berdasarkan nilainya hanya mencapai Rp20,4 triliun atau turun 42% dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, realisasi PMA pada tahun 2009 (Januari-Februari 2009) mencatat sebanyak 176 proyek atau tumbuh 19% (yoy) dengan nilai mencapai USD1.971 juta (106%, yoy). Sedangkan realisasi PMDN pada periode yang sama menurun baik secara nilai maupun proyek yaitu sebanyak 29 proyek atau turun 3% (yoy) dengan nilai Rp2.628 miliar (-2%, yoy).

Hal ini menunjukkan bahwa investasi asing/penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu faktor pendorong bagi pertumbuhan iklim investasi di Indonesia. Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing tentunya terkait dengan peningkatan perhatian pemerintah pada pihak-pihak yang berkepentingan atas penanaman investasi asing di Indonesia.

Dalam rangka memberikan perhatian khusus terhadap investasi di Indonesia, maka pemerintah pada tahun 2011 meluncurkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Program ini bertujuan mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan.²⁷

²⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (2011), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. h.10

Lebih lanjut perhatian pemerintah terhadap investasi diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dokumen MP3EI yang menyatakan bahwa perbaikan iklim investasi menjadi salah satu agenda utama dalam MP3EI. Untuk itu, dalam jangka pendek akan dilakukan sejumlah perbaikan iklim investasi melalui *debottlenecking*, regulasi, pemberian insentif maupun percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi.²⁸

Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga diungkapkan bahwa pemerintah mengakui tidak dapat sendiri untuk membangun ekonomi Indonesia, disamping itu pihak swasta termasuk didalamnya investor asing bertindak sebagai pemeran utama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan breakthrough yang didasari oleh semangat “*Not Business As Usual*”, melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitas dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.²⁹

Pernyataan tersebut semakin memperkuat pengakuan terhadap pelaku investasi dari pihak swasta dalam menopang pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah dapat mengupayakan berbagai cara untuk memperbaiki iklim investasi, termasuk didalamnya melakukan upaya-

²⁸ *Ibid.*, h. 9

²⁹ *Ibid.*, h. 10

upaya untuk memberikan rasa aman terhadap pihak asing yang akan/telah menanamkan investasinya di Indonesia.

C. 3 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Menurut Survei Bank Indonesia tahun 2009, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia pada akhir Juli 2009 mencapai 46.476 orang. Meskipun pertumbuhan jumlah TKA agak fluktuatif, bahkan sempat mengalami perlambatan selama periode 2007 hingga kuartal I 2008, namun secara absolut jumlahnya terus meningkat. Melambatnya pertumbuhan penempatan TKA ke Indonesia pada periode tersebut terkait dengan diberlakukannya desentralisasi pencatatan perpanjangan izin TKA yang semula hanya dilakukan di Jakarta kini boleh dilakukan di daerah.

Grafik 2.3 Perkembangan Jumlah TKA di Indonesia

Sumber: Kemenakertrans dikutip dalam Bank Indonesia (2010)

Sebagai gambaran, pada Januari 2005 jumlah TKA yang bekerja di Indonesia tercatat sebesar 21.255 orang, namun pada akhir Juli 2009 jumlah TKA meningkat pesat hingga mencapai 46.876 orang, naik 121% dalam kurun waktu 5 tahun atau secara rata-rata tahunan tumbuh sekitar 25%. Hal ini sejalan dengan

terus meningkatnya realisasi PMA baik dari sisi nilai maupun proyek sehingga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja termasuk TKA. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2005-2009 (Jun)

No.	Level Jabatan	2005	2006	2007	2008	2009 (Jun)
1.	Profesional	8	515	15.080	14.437	15.894
2.	Advisor/Konsultan	15.537	21.466	3.449	3.109	3.303
3.	Manajer	2.581	2.572	6.479	8.162	8.438
4.	Direksi/Direktur	7.341	6.975	3.392	3.822	4.025
5.	Supervisor	2	569	3.194	2.984	2.825
6.	Teknisi	329	898	3.572	9.640	11.368
7.	Komisaris	0	9	283	325	373
	Total	25.798	33.004	35.449	42.479	46.226

Sumber: Kemenakertrans dikutip dalam Bank Indonesia (2010)

Tabel 2.8 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2009-2013 (Ags)

No.	Level Jabatan	2009	2010	2011	2012	2013 (Ags)
1.	Profesional	20.771	25.938	34.811	32.285	18.727
2.	Advisor/Konsultan	3.499	7.234	12.726	13.131	9.431
3.	Manajer	8.966	10.503	12.485	11.707	7.456
4.	Direksi	4.202	4.940	6.508	6.448	4.715
5.	Supervisor	3.555	6.393	4.753	4.311	4.241
6.	Teknisi	16.705	9.651	5.271	3.750	2.915
7.	Komisaris	393	497	733	795	517
	Total	58.091	65.156	77.307	72.427	48.002

Sumber: Kemenakertrans dikutip dalam Bisnis.com³⁰

Kedua tabel di atas merupakan kelompok jabatan TKA di Indonesia dalam kurun waktu 9 tahun (2005-2013). Terlihat komposisi kelompok jabatan TKA tiap tahun mengalami pergeseran, seperti konsultan, profesional, teknisi/operator. Jika pada tahun 2005 dan 2006 sebagian besar TKA yang bekerja di Indonesia memiliki jabatan sebagai konsultan dengan jumlah sekitar 15ribu - 21ribu orang, sejak tahun 2007 hingga 2009 berkurang menjadi sekitar 3ribu

³⁰ Bisnis, (2013), Indonesia Segera Batasi Tenaga Kerja Asing - <http://m.bisnis.com/manajemen/read/20130930/56/166147/indonesia-segera-batasi-tenaga-kerja-asing>

orang. Namun tahun 2010-2012 angka konsultan di Indonesia kembali meningkat secara signifikan mengikuti meningkatnya jumlah TKA di Indonesia.

Sebaliknya pada kelompok jabatan profesional dan teknisi/operator mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja asing secara drastis, pada tahun 2005 masih tercatat masing-masing sebanyak 8 orang dan 329 orang, tetapi pada tahun 2009 bertambah menjadi masing-masing 20 ribu dan 16 ribu orang. Kenaikan ini masih terjadi pada jabatan profesional hingga tahun 2012 bahkan mencapai 32.285 orang. Sedangkan jabatan teknisi justru semakin menurun hingga tahun 2012 tinggal 3.750 orang. Terjadinya pergeseran ini diduga disebabkan banyaknya konsultan yang kemudian direkrut oleh perusahaan yang memperkerjakannya untuk dijadikan sebagai profesional. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa minat TKA untuk menjadi konsultan di Indonesia mempengaruhi rasio konsultan yang justru semakin meningkat. Sedangkan rasio teknisi berkurang disebabkan pekerjaannya telah beralih menjadi profesional, dikarenakan kebutuhan tenaga terampil tetap untuk menangani operasional semakin tinggi. Di samping itu, level jabatan yang jumlahnya mengalami pasang surut yakni direksi dan manajer.

C.4 Karakteristik Negara Asal dan Sebaran TKA di Indonesia

Apabila ditinjau dari negara asal TKA, secara umum TKA berasal dari negara-negara di kawasan Asia mencapai 70%, sedangkan lainnya berasal dari negara-negara di luar Asia. Secara spesifik dipaparkan dalam grafik berikut.

Karakteristik Negara Asal TKA

Grafik 2.4 Menurut Kawasan

Grafik 2.5 Menurut Negara Non-ASEAN

Grafik 2.6 Menurut Negara ASEAN

Dikutip dalam Bank Indonesia (2010)

Grafik karakteristik negara asal TKA menurut kawasan menunjukkan negara asal TKA secara umum yakni kawasan Asia non-ASEAN 50%, dan ASEAN 20% sehingga total TKA asal kawasan Asia 70%, diikuti TKA asal Eropa 10%, Australia 8%, Amerika Serikat 8%, dan lain-lain 4%. Lebih spesifik, TKA yang berasal dari negara non-ASEAN utamanya dari RRC sebanyak 9.384 orang, diikuti dari Jepang (4.927 orang) dan Korea Selatan (4.039 orang), sedangkan TKA dari kawasan ASEAN terbesar berasal dari Malaysia (3.355 orang) dan Filipina (2.093 orang). Di luar kawasan Asia, pangsa TKA lainnya

yang cukup besar berasal dari Eropa yang mencapai 10% utamanya dari Perancis sebanyak 991 orang, diikuti dari Jerman (731 orang), dan Belanda (647 orang).³¹

Data terbaru yang diperoleh dari Kemenakertrans tahun 2011 dikutip dalam Tempo menyatakan negara asal TKA mayoritas dari China dan Jepang (10.927 orang), Korea Selatan (6.520 orang), India (4.991), Malaysia (4.957), Amerika Serikat (4.425), Thailand (3.868), Australia (3.828) dan Filipina (3.820).³² Kedua data di atas menunjukkan formasi TKA tidak mengalami perubahan sejak 2009 hingga 2011 yakni menempatkan negara-negara di kawasan Asia seperti China dan Jepang menjadi TKA yang dominan di Indonesia.

Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut sebaran TKA di Indonesia. Berdasarkan survei Bank Indonesia tahun 2009 diketahui bahwa wilayah kerja TKA di Indonesia terkonsentrasi pada pulau Jawa. Selengkapnya pada tabel berikut.

³¹ Bank Indonesia, (2010), *op. cit.*, hh. 12-14

³² Tempo, (2012), *China Dominates Foreign Worker in Indonesia* - www.tempo.co/read/news/2012/03/07/055388615/China-Dominates-Foreign-Workers-in-Indonesia.

Grafik 2.7 Sebaran Jumlah TKA Menurut Provinsi (orang)

No	Propinsi	2005	2006	2007	2008	2009 (Jun)
1.	DKI Jakarta	18,935	22,098	21,803	27,160	29,190
2.	Riau Kepulauan	19	2,191	4,272	3,462	3,282
3.	Jabar	2,464	2,952	2,975	3,502	4,026
4.	Banten	1,223	1,500	1,610	2,152	2,395
5.	Bali	558	782	1,226	1,401	1,588
6.	Jatim	744	815	886	1,155	1,385
7.	Sumut	187	250	508	762	995
8.	Jateng	387	452	515	565	624
9.	Kaltim	270	273	332	420	409
10.	NTB	118	193	228	255	218
11.	Riau	397	873	182	193	253
12.	Kalbar	89	124	111	147	138
13.	Maluku Utara	103	73	104	158	139
14.	Sulsel	23	47	65	124	178
15.	Sumsel	20	44	67	77	82
16.	Sulut	18	24	55	116	158
17.	Sumbar	10	26	65	87	146
18.	Kalteng	16	55	64	64	61
19.	DI Yogyakarta	65	61	67	70	100
20.	Kalsel	21	31	44	58	52
21.	Jambi	31	27	22	37	23
22.	Lampung	23	36	26	48	53
23.	Maluku	5	6	17	44	231
24.	Nanggroe Aceh	0	1	17	102	108
25.	Sultra	13	18	17	93	42
26.	Papua Barat	1	6	26	9	9
27.	Bengkulu	5	3	12	24	23
28.	Irian Jaya Barat	0	0	10	2	3
29.	Bangka-Belitung	0	1	4	24	239
30.	Papua	6	8	8	126	21
31.	NTT	11	3	8	12	22
32.	Aceh	10	6	5	3	3
33.	Sulteng	5	13	36	8	10
34.	Gorontalo	0	0	6	3	4
35.	Lain-lain	0	0	47	2	0
36.	Sulbar	0	0	3	3	3
37.	Papua Tengah	19	10	4	5	6
38.	Papua Timur	2	2	2	6	7
	Lain-lain			47	2	
	TOTAL	25,798	33,004	35,449	42,479	46,226

Sumber: Kemenakertans dikutip dalam Bank Indonesia (2010)³³

Tabel di atas menunjukkan sebaran lokasi TKA yang terkonsentrasi di Pulau Jawa terdapat di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Total TKA yang bekerja di lima wilayah ini pada tahun 2005 sebanyak 92,3% dari total jumlah TKA dan lima tahun berikutnya (2009) menjadi sebanyak 82%. Diantara kelima wilayah sebaran TKA di Pulau Jawa tersebut, sebagian besar TKA berlokasi kerja di DKI Jakarta dengan pangsa 77%. Hal ini

³³ Bank Indonesia, (2010), *op. cit.*, hh. 12-14

merupakan hal yang wajar karena wilayah DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia merupakan sentra lokasi kegiatan sebagian besar kantor pusat, baik perusahaan nasional maupun asing (PMA). Bagi kebanyakan TKA yang bekerja di kawasan industri di sekitar Jakarta seperti di daerah Tangerang dan Bekasi, dapat dipastikan mereka akan lebih memilih tinggal di Jakarta yang memiliki fasilitas infrastruktur lengkap. Sebagai pusat perekonomian, Jakarta juga dijadikan sebagai basis operasional sehari-hari.

Sangat kontras apabila dibandingkan dengan jumlah TKA yang lokasi kerjanya berada di luar Pulau Jawa yaitu wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua. Hal ini terlihat dari jumlah TKA yang bekerja di lima wilayah/pulau pada tahun 2005 tercatat sekitar 7,7% namun lima tahun berikutnya (2009) meningkat menjadi 18%.

C.5 Gaji dan Pola Remitansi TKA di Indonesia

Untuk mengetahui gaji dan pola remitansi TKA, Survei Bank Indonesia tahun 2009 telah dilakukan kepada 365 responden TKA yang mayoritas tersebar di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan lainnya tersebar di beberapa provinsi. Hasil survei tersebut terkait gaji yang diterima TKA di Indonesia pada tabel berikut.

Grafik 2.8 Sebaran Gaji TKA per bulan

Sumber: Survei Bank Indonesia Tahun 2009

Grafik 2.9 Sebaran Tunjangan Jabatan TKA per bulan

Sumber: Survei Bank Indonesia Tahun 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar TKA (38%) menerima gaji yang berkisar antara Rp25 juta0Rp50 juta. Kelompok terbesar berikutnya adalah TKA yang bergaji Rp10 juta – Rp25 juta (23%) dan diikuti oleh kisaran gaji antara Rp50 juta – Rp75 juta (17%). Selain menerima gaji, sekitar 16% responden menyatakan menerima tunjangan jabatan (*compensation salary*) yang sebagian besar berkisar antara Rp10 juta – Rp25 juta (27%).

Grafik 2.10 Sebaran Gaji TKA Menurut Level Jabatan

Sumber: Survei Bank Indonesia Tahun 2009

Grafik 2.11 Sebaran *Compensation Salary* TKA Menurut Level Jabatan

Sumber: Survei Bank Indonesia Tahun 2009

Sebagian besar TKA yang menduduki jabatan sebagai Direktur menerima gaji di atas rata-rata gaji TKA (Rp25 juta – Rp50 juta) yaitu berkisar antara Rp50 juta – Rp75 juta (35%), dan diikuti oleh kisaran gaji sekitar Rp75 juta – Rp100 juta (25%). Bahkan dalam survei tidak dijumpai Direktur yang bergaji kurang dari Rp10 juta (Grafik). Walaupun demikian, apabila dilihat dari sisi jumlah persentase jabatan yang menerima gaji paling tinggi yaitu di atas Rp125 juta paling banyak dijumpai pada TKA profesional (12%) dibandingkan TKA dengan jabatan Direktur sebesar 6%.

Konsisten dengan nilai gaji yang diterima, pada Grafik xx tampak bahwa sebagian besar responden TKA dengan jabatan Direktur juga menerima *compensation salary* tertinggi (35%). Selanjutnya, level jabatan yang juga menerima *compensation salary* yang cukup tinggi adalah Konsultan (14%), serta Profesional (13%). Sementara itu, pada kelompok Konsultan cukup banyak yang menerima *compensation salary* yang rendah (kurang dari Rp5 juta) yaitu sebesar 29%.

Terkait dengan pemanfaatan gaji, sebanyak 49% gaji yang diterima oleh TKA digunakan untuk konsumsi, dan sisanya masing-masing sebesar 31% ditabung dan sebesar 20% untuk dikirim ke negara asal atau remitansi. Adapun jenis pengeluaran konsumsi terbesar adalah makanan, diikuti hiburan, rekreasi dan olahraga. Terkait dengan frekuensi remitansi, sebesar 58% responden melakukan kegiatan remitansi ke negara asalnya, sedangkan 42% lainnya menyatakan tidak. Selain itu, 53% responden menyatakan bahwa melakukan remitansi secara rutin, sedangkan 47% lainnya tidak rutin. Grafik berikut akan menunjukkan nilai remitansi yang dilakukan.

Grafik 2.12 Sebaran Nilai Remitansi

Sumber: Survei Bank Indonesia Tahun 2009

Rata-rata nilai remitansi yang dilakukan responden sebesar kurang dari Rp10 juta (41%). Jika dibandingkan dengan rata-rata gaji TKA sebesar Rp25 juta-Rp50 juta, maka porsi dari gaji yang dikirim ke negara asalnya berkisar antara 20% - 40%.³⁴

C.6 Pandangan TKA terhadap Indonesia

Dalam survei Bank Indonesia tahun 2009 juga menyertakan pandangan TKA terhadap Indonesia meliputi gambaran kondisi kerja Indonesia, keinginan bekerja di Indonesia setelah kontrak selesai, dan harapan TKA terhadap perbaikan kondisi kerja. Terkait gambaran kondisi kerja Indonesia terbagi atas proses perizinan, kejelasan hak dan kewajiban pekerja, perlindungan hukum, dan hubungan kerja selengkapnya pada tabel berikut.

Persepsi responden mengenai proses perizinan untuk bekerja di Indonesia, sebagian besar (40,8%) member nilai dalam kategori “sedang”. Kategori tersebut dapat diartikan ‘netral’ mengingat berada diantara kategori baik dan buruk. Kelompok responden berikutnya (36%), memberi penilaian untuk proses perizinan di Indonesia pada kategori “baik” dan “sangat baik”. Sementara itu, kelompok responden yang menilai proses perizinan di Indonesia “buruk” dan “sangat buruk” jumlahnya relatif rendah yaitu 23%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap proses perizinan di Indonesia adalah tidak buruk.

Sebagian besar responden (47,1%) menilai bahwa kejelasan hak dan kewajiban pekerja di lingkungan kerjanya adalah “sedang”. Sementara kelompok

³⁴ *Ibid.*, hh. 23-29.

yang yang menilai bahwa kejelasan hak dan kewajiban pekerja “baik” dan “sangat baik” juga cukup besar yaitu 42,9%. Jumlah tersebut jauh diatas jumlah responden yang memberi nilai “buruk” dan “sangat buruk” yang hanya mencapai 10%. Sehingga secara umum, kondisi kejelasan hak kewajiban pekerja asing di Indonesia adalah baik. Hal ini diduga terkait posisi tawar TKA yang unggul sehingga mereka mendapatkan maupun mampu menuntut kejelasan dalam hak dan kewajiban mereka di lingkungan bekerja. Apabila dapat diperbandingkan, kondisi tersebut berbeda untuk kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Posisi tawar TKI yang lebih rendah karena kapasitas/perpendidikan yang kurang mendukung menyebabkan TKI sering kali tidak menerima kejelasan dalam hak dan kewajibannya sebagai pekerja.

Mayoritas responden (44,4%) memberi predikat “sedang” pada perlindungan hukum di Indonesia diikuti oleh kelompok responden yang memberi predikat “baik” dan “sangat baik” sebesar 35,3%. Meskipun demikian, terdapat cukup banyak responden (20,3%) yang memberi predikat “buruk” maupun “sangat buruk” yang tentunya perlu menjadi perhatian regulator di Indonesia.

Untuk kondisi hubungan kerja di lingkungan bekerjanya, sebagian besar responden (59,9%) memberi penilaian “baik” dan “sangat baik”. Sedangkan yang menilai “sedang” sebanyak 35,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi hubungan kerja di Indonesia adalah baik. Hanya terdapat sebesar 5% responden yang menilai “buruk” maupun “sangat buruk”.

Terkait keinginan bekerja di Indonesia setelah selesai, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar TKA responden (86%) ternyata menyatakan

ingin kembali bekerja di Indonesia setelah kontrak kerja mereka selesai. Kenginan untuk kembali kerja tersebut disebabkan terutama oleh kecintaan responden terhadap budaya, orang dan alam di Indonesia (50,3%). Alasan lain yang cukup kuat adalah bahwa responden merasa sesuai dengan iklim bisnis di Indonesia (22,2%), dan alasan pribadi yang berhubungan dengan keluarga responden (8%). Sebaliknya, terdapat sebagian kecil responden (14%) yang menyatakan tidak ingin kembali bekerja di Indonesia setelah kontrak kerjanya selesai. Pendapat tersebut disebabkan terutama oleh faktor keluarga (38,3%), dan keinginan responden untuk bekerja di negara lain (31,9%).

Terkait harapan TKA terhadap perbaikan kondisi kerja, responden TKA menyampaikan harapan adanya perbaikan kondisi kerja di Indonesia. Kondisi yang mendapat perhatian terbanyak adalah masalah birokrasi (48%), diikuti oleh kondisi keamanan dan hukum (16%), kualitas pelayanan (15%), infrastruktur (9%), pajak (7%), diskriminasi (3%), sedangkan 2% responden memilih lainnya.

Sebagian besar masukan yang ditujukan untuk perbaikan birokrasi Indonesia adalah agar mempercepat prosesnya (90%) sementara sisanya sebesar 10% adalah agar Indonesia memperbaiki aturan-aturan dalam birokrasi. Sebagian besar saran dalam hal birokrasi ini ditujukan kepada pihak imigrasi, serta kepada instansi terkait lainnya.

Terkait aturan perpajakan di Indonesia, mayoritas saran yang diberikan responden adalah agar pemerintah menurunkan tarif pajak bagi TKA (78%), diikuti oleh perbaikan aturan perpajakan (18%) dan menghapuskan pungutan liar oleh pihak-pihak tertentu di dalam lembaga pemerintah. Sedangkan harapan TKA

terkait kualitas pelayanan di Indonesia sebagian besar (69%) adalah agar dilakukan perbaikan kualitas pelayanan di kantor pemerintah.

Terdapat pula 31% responden TKA yang secara spesifik mengharapkan peningkatan kemampuan dan keramahan staf pemerintah dalam memberikan pelayanan. Beberapa responden TKA yang merasa/pernah mengalami diskriminasi memberi saran adanya perbaikan dalam wujud TKA memperoleh kesetaraan/kesamaan perlakuan dengan penduduk Indonesia dalam proses pengajuan surat/dokumen resmi (38%) dan agar TKA diperlakukan setara dengan penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari (37%). Di samping itu, terdapat juga masukan dari responden agar TKA dapat memiliki properti di Indonesia (13%), serta agar TKA dapat mendapatkan tarif/harga yang sama dengan penduduk untuk transaksi jual/beli di Indonesia.

Sementara itu masukan-masukan mengenai keamanan dan hukum di Indonesia sebagian besar berharap agar pemerintah dapat mengatasi korupsi yang terjadi di Indonesia (48%) disamping juga masukan agar dilakukan peningkatan perlindungan hukum bagi TKA (46%).

Beberapa masukan juga ditujukan untuk perbaikan terkait infrastruktur di Indonesia. Sebagian besar respon TKA mengenai perbaikan infrastruktur di Indonesia adalah agar pemerintah meningkatkan kualitas prasarana transportasi dan pengaturan lalu lintas (66%), diikuti oleh perbaikan kualitas lingkungan (10%) dan peningkatan infrastruktur jasa keuangan (7%).³⁵

³⁵ *Ibid.*, hh. 35-38

C.7 Kebijakan Pemerintah bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan TKA pertama kali diterbitkan tahun 1958 dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing. Lahirnya UU ini dilatarbelakangi oleh pemikiran perlunya perlindungan pasar Tenaga Kerja Lokal (TKL) dari serbuan TKA sebagaimana dinyatakan dalam konsideran UU yaitu bahwa untuk menjamin bagian yang layak dari kesempatan kerja di Indonesia bagi warga Indonesia, perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia. Selanjutnya dalam UU No. 3/1958 ini ditetapkan bahwa setiap majikan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib mengajukan izin terlebih dahulu kepada Menteri.

Semangat dan upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada TKL dan membatasi penggunaan TKA ini juga tercermin dalam UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam UU tersebut disebutkan bahwa “Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia” (pasal 10 dan 11).

Dalam UU No. 1/1967 ini, di samping adanya kewajiban untuk mengutamakan penggunaan TKL, kepada perusahaan juga diwajibkan untuk “menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia” (pasal 12).

Selanjutnya, sejalan dengan UU PMA, ketentuan mengenai kewajiban untuk menggunakan tenaga kerja lokal ini juga diterapkan pada saat diterbitkan UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang salah

satu pasalnya menyebutkan: “Perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia,.....dst (pasal 19).

Ketentuan dan peraturan terkait penggunaan TKA ini kemudian diperbaharui kembali pada tahun 1995 dengan diterbitkannya Keppres No. 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelumnya, semangat dari lahirnya Keppres ini masih sama yaitu dalam rangka melindungi dan memberikan kesempatan kerja kepada TKL. Namun demikian, berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya, dalam Keppres diatur tentang rincian jabatan yang terbuka/tertutup bagi TKA dikaitkan dengan kepemilikan perusahaan penanam modal (pihak Indonesia/asing), kewajiban melaksanakan program penggantian TKA ke TKL, dan adanya kewajiban untuk menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang oleh TKA.

Pada tahun 2000, Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Kepmen No. 173 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Hal pokok yang diatur dalam Kepmen ini adalah bahwa Warga Negara Asing Pendatang dapat bekerja di Indonesia sepanjang atas permintaan pengguna dan atau sponsor yang telah memperoleh izin dari instansi sesuai dengan bidang kegiatannya.

Demikian pula dengan diterbitkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan semakin memperjelas sikap pemerintah dalam merespon kedatangan TKA. UU yang sempat menuai kontroversi karena dianggap terlalu

berpihak pada pengusaha ini secara tegas dan jelas mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam bab tersendiri (Bab VIII). Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

Disamping itu, semangat untuk melindungi pasar tenaga kerja Indonesia dari serbuan pendatang semakin terasa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Di samping itu, semangat untuk melindungi pasar tenaga kerja Indonesia dari serbuan pendatang semakin terasa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Permen ini antara lain disebutkan adanya persyaratan TKA yang akan dipekerjakan yaitu: (1) memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; (2) bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia khususnya TKI pendamping dan; (3) dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.³⁶

Dari uraian di atas tampak bahwa pada dasarnya pemerintah memiliki regulasi/kebijakan dalam rangka menghadapi persaingan global di pasar tenaga

³⁶ *Ibid.* hh. 14-16.

kerja. Sikap selektif pemerintah terhadap tenaga kerja asing seharusnya diikuti dengan upaya peningkatan kemampuan SDM warga negara Indonesia agar ketergantungan terhadap TKA dapat diminimalisasi.

BAB III

PROSEDUR PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA

A. Definisi Perjanjian Internasional (Konvensi)

Konvensi merupakan salah satu penamaan dari perjanjian internasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Brierly (1972: 137) dalam Tsani (1990) yang menyatakan definisi perjanjian internasional sebagai berikut.

*Contractual engagements between states are called by various names-treaties, conventions, pacts, acts, declarations, protocols.*¹ (Perjanjian kontraktual antar negara disebut dengan beberapa nama perjanjian internasional (treaties), konvensi (convention), pakta (pacts), act, deklarasi (declaration), dan protokol (protocol).

Oppenheim (1952: 791, 792) memberi batasan perjanjian internasional sebagai berikut:

*International treaties are conventions, or contracts, between two or more states concerning various matters of interest.*² (Perjanjian internasional adalah konvensi atau kontrak antar dua negara atau lebih mengenai berbagai macam kepentingan)

Selanjutnya definisi perjanjian internasional dapat pula ditemukan dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf a Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah:

*Treaty means an international agreement concluded between states in writer form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular designation.*³ (Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang ditandatangani antar negara dalam bentuk tertulis dan

¹ Mohd. Burhan Tsani, (1990), Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta: PAU- Studi Sosial UGM. h. 65.

² Ibid.

³ Ibid.

diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam wujud satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya).

Kemudian pasal 2 ayat 1a Konvensi Wina 1986 menyatakan batasan perjanjian internasional sebagai berikut:

“Treaty” means an international agreement governed by international law and concluded in written form:

i. between one or more states and one or more international organizations, or

ii. between international organization;

Whether that agreement is embodied in a single instruments or in two or more related instruments and whatever its particular designation.⁴

(Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional, yang diatur dengan hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis:

i. antara satu negara atau lebih dan antara satu organisasi internasional, atau lebih, atau;

ii. antar organisasi internasional;

apakah persetujuan tersebut di buat dalam satu instrumen tunggal, atau dalam dua instrument yang saling berhubungan atau lebih, dan apapun yang menjadi penanda khususnya).

Terkait penamaan konvensi pada perjanjian internasional, Tsani (1990) menjelaskan bahwa istilah konvensi (*convention*) dipergunakan untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal penting tetapi yang tidak bersifat politik tinggi (*high politic*). Kata konvensi juga dipergunakan untuk menyebut persetujuan multilateral formal yang diadakan di bawah wibawa organisasi internasional. Termasuk juga instrumen-instrumen yang dibuat oleh organ-organ lembaga internasional.⁵

⁴ Ibid. h. 66.

⁵ Ibid. h. 69.

B. Konsep Pembuatan Perjanjian Internasional

Langkah-langkah yang biasa ditempuh dalam membuat perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

- a. pemberian kuasa resmi kepada orang yang melakukan negosiasi atas nama negara peserta;
- b. negosiasi dan adopsi;
- c. otentikasi dan penandatanganan;
- d. ratifikasi;
- e. akses dan addesi;
- f. mulai berlakunya perjanjian internasional;
- g. registrasi dan publikasi;
- h. aplikasi dan pelaksanaan perjanjian internasional. (Starke, 1984: 424, Green, 1982:140-141).

a. Pemberian kuasa resmi kepada orang yang melakukan negosiasi atas nama negara peserta

Dalam tahap ini ditunjuk suatu perwakilan untuk melakukan negosiasi. Pemberian kuasa resmi harus dilakukan melalui prosedur yang tepat. Macam kekuasaan yang diberikan adalah:

- a. status resmi sebagai perwakilan;
- b. kekuasaan untuk menghadiri negosiasi;
- c. kekuasaan untuk berpartisipasi dalam negosiasi;
- d. kekuasaan untuk menyetujui teks akhir perjanjian internasional;
- e. kekuasaan untuk menandatangani teks akhir perjanjian internasional.

Dalam praktek perwakilan negara ini dilengkapi dengan suatu instrumen yang sangat formal, yang diberikan oleh kepala negara atau menteri luar negeri. Instrumen ini disebut 'Full Powers'.

b. Negosiasi dan adopsi

Biasanya negosiasi dilakukan:

1. dengan lisan dalam perjanjian internasional bilateral;
2. dengan konferensi diplomatik dalam perjanjian internasional multilateral;

Dalam tahap ini yakni negosiasi dan adopsi para delegasi tetap mengadakan hubungan dengan pemerintah masing-masing. Sebelumnya mereka telah dibekali dengan berbagai instruksi dan konsepsi dari pemerintahnya yang harus mereka pertahankan. Sewaktu-waktu dalam tahap ini mereka bisa berkonsultasi dengan pemerintahnya dan bilamana perlu mendapatkan instruksi-instruksi baru. Praktek pada umumnya menunjukkan bahwa sebelum mereka membubuhkan tandatangannya pada teks final perjanjian internasional, para delegasi benar-benar mendapatkan instruksi baru untuk menandatangani instrumen apakah dengan reservasi ataukah tidak. Negara yang berpartisipasi dalam negosiasi disebut negara peserta '*contracting state*'.

c. Otentikasi dan penandatanganan

Apabila rancangan final perjanjian internasional telah disetujui, berarti instrumen ini telah siap untuk ditandatangani. Sebelum dilakukan penandatanganan, rancangan teks tersebut dapat diumumkan. Tahap penandatanganan biasanya merupakan hal yang paling formal.

Kalau tidak ada persetujuan untuk meniadakan penandatanganan, tindakan penandatanganan merupakan hal yang esensial bagi suatu perjanjian internasional, karena terutama penandatangananlah yang memberi status otentik suatu teks perjanjian internasional. Efek penandatanganan terhadap suatu perjanjian internasional, tergantung pada diperlukan atau tidak diperlukan ratifikasi bagi perjanjian internasional tersebut.

Apabila suatu perjanjian internasional memerlukan ratifikasi, penandatanganan mempunyai arti tidak lebih daripada bahwa para delegasi telah menyetujui suatu teks dan mau menerimanya; dan kemudian akan menyampaikannya kepada pemerintah masing-masing untuk mendapatkan tindak lanjut pemerintah mereka yaitu akan menerima perjanjian internasional, dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan diberlakukannya perjanjian internasional yang bersangkutan. Apabila perjanjian internasional tidak memerlukan ratifikasi, maka kalau tidak ada ketentuan yang menyatakan lain, perjanjian internasional tersebut mengikat semenjak penandatanganan.

d. Ratifikasi

Dalam teori, ratifikasi adalah persetujuan Kepala Negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya yang ditunjuk dengan sebagaimana mestinya. Dalam praktek modern, ratifikasi mempunyai arti lebih daripada sekedar tindakan konfirmasi. Ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menerangkan bahwa:

Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dinyatakan dengan ratifikasi apabila:

- a. perjanjian internasional menentukan demikian secara tegas, atau;
- b. kecuali apabila ditemukan sebaliknya, negara yang mengadakan negosiasi menyetujui bahwa ratifikasi adalah perlu, atau
- c. perjanjian internasional yang telah ditandatangani akan berlaku hanya kalau sudah diratifikasi;
- d. kemauan negara untuk menandatangani perjanjian internasional dengan syarat akan berlaku kalau sudah diratifikasi, nampak dalam instrumen "*full powers*"-nya, atau dinyatakan demikian selama negosiasi.

Dalam praktek ratio ratifikasi adalah sebagai berikut:

1. negara berhak untuk mempunyai kesempatan guna meneliti kembali dan meninjau kembali instrumen yang telah ditandatangani oleh utusannya, sebelum negara menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam instrumen;
2. berdasarkan kedaulatannya suatu negara berhak untuk menarik diri dari partisipasi dalam suatu perjanjian internasional, apabila negara yang bersangkutan menghendaki demikian;
3. sering suatu perjanjian internasional mengundang dilakukannya suatu amandemen atau penyesuaian dalam hukum nasional;

4. karena prinsip demokrasi bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan pendapat umum yang ada dalam parlemen atau di tempat lain, mengenai ada tidaknya keharusan untuk mengkonfirmasi suatu perjanjian internasional.

Pentingnya ratifikasi semakin meningkat sehubungan dengan perkembangan sistem konstitusi pemerintahan, yang memberikan kekuasaan membuat perjanjian internasional kepada berbagai organ selain kepala negara. Di masing-masing negara prosedur ratifikasi yang dianut adalah berbeda-beda. Prosedur ratifikasi tingkat nasional pengaturannya diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara.

Tidak ada kewajiban untuk melakukan ratifikasi bagi negara. Kekuasaan menolak untuk melakukan ratifikasi dianggap merupakan hal yang inheren dengan kedaulatan negara, oleh karenanya menurut hukum internasional tidak ada kewajiban hukum atau kewajiban moral untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional. Yang ada hanyalah kesopanan biasa untuk mengutarakan kepada negara lain yang bersangkutan mengenai alasan-alasan yang dipakai guna menolak melakukan ratifikasi.

Suatu instrumen ratifikasi, kalau tidak ditentukan lain oleh perjanjian internasional yang bersangkutan tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk persetujuan akhir untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Dapat mengikat kalau sudah dilakukan: (1) pertukaran atau penyimpanan instrument ratifikasi atau; (2) pemberitahuan mengenai instrumen ratifikasi kepada negara

lain atau kepada negara-negara yang bersangkutan, dan; (3) penyimpanan perjanjian internasional.

Persyaratan demikian berlaku juga bagi instrumen penerimaan atau persetujuan. Negara yang sudah menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional disebut sebagai negara pihak '*state party*'.

e. Akses dan adesi

Akses dan adesi merupakan cara untuk menyatakan keterikatan negara pada perjanjian internasional yang tersedia bagi negara-negara yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian internasional.

f. Mulai berlakunya perjanjian internasional

Menurut ketentuan pasal 24 ayat 1 Konvensi Wina 1969 berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada: (1) ketentuan perjanjian internasional itu sendiri; (2) atau apa yang telah disetujui oleh negara peserta. Bagi perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan, mulai berlaku sesudah dilakukan pertukaran atau penyimpanan instrument ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan oleh negara penandatangan.

Untuk perjanjian internasional yang tidak memerlukan tiga syarat tersebut mulai berlaku sejak penandatanganan. Sekarang mulai berlakunya perjanjian internasional multilateral biasanya tergantung pada penyimpanan sejumlah instrumen ratifikasi dan persetujuan untuk terikat yang serupa, yang telah disetujui negara peserta.

g. Registrasi dan Publikasi

Pasal 102 Piagam PBB 1945, menentukan bahwa semua perjanjian internasional dan persetujuan internasional yang dibuat oleh anggota PBB harus sesegera mungkin dicatatkan pada Sekretariat PBB dan kemudian akan diumumkan oleh Sekretariat. Akibat hukum ketentuan ini ialah: bagi perjanjian internasional yang tidak dicatatkan tidak bisa dipakai sebagai sandaran hukum di depan PBB maupun organ PBB. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dibuatnya perjanjian-perjanjian rahasia antara negara.

h. Aplikasi dan pelaksanaan

Langkah final proses pembuatan perjanjian internasional adalah penyatuan ketentuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional negara pihak. Kemudian diikuti tindakan aplikasi, tindakan administrasi yang diperlukan dan supervisi organ-organ internasional. (Starke, 1984: 424-439)

Penerapan prosedur pembuatan perjanjian internasional tersebut pada perjanjian internasional bilateral (dua negara peserta) berbeda dengan penerapannya pada perjanjian internasional multilateral murni (lebih dua negara peserta) maupun pada pembuatan perjanjian internasional di bawah wibawa PBB atau organisasi internasional lain.⁶ Untuk memudahkan mengenali prosedur pembuatan perjanjian internasional khususnya multilateral murni digambarkan sebagai berikut.

⁶ Mohd. Burhan Tsani, (1990), *op. cit.*, hh. 75-79

Bagan 3.1 Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional Multilateral Murni

Sumber: Mohd. Burhan Tsani, (1990), op. cit., h. 81

C. Prinsip dan Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Indonesia

Dalam membuat perjanjian internasional perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Lembaga Negara dan lembaga Pemerintah baik Departemen maupun non-Departemen, di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai rencana pembuatan perjanjian internasional disebut, “Lembaga Pemrakarsa”
- Lembaga Pemrakarsa harus berkontribusi dan koordinasi dengan Departemen/Kementerian Luar Negeri (Pasal 5 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional)
- Terdapat beberapa mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yang dilakukan melalui rapat interdep, surat menyurat, dan komunikasi lisan
- Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap (Pasal 6 UU No. 24/2000): (1) penjajagan, (2) perundingan, (3) perumusan naskah, (4) penerimaan; dan (5) penandatanganan.

Terkait dengan tahapan pembuatan perjanjian internasional yang mengacu pada Pasal 6 UU No. 24/2000 dijelaskan sebagai berikut:

(1) Tahap Penjajagan

- Prinsip ‘one door policy’
- Inisiatif pembuatan perjanjian internasional dapat berasal dari Lembaga Pemrakarsa/Mitra Asing

- Lembaga Pemrakarsa mengkoordinasikan rapat interdep dengan departemen-departemen terkait.
- Rapat interdep membahas draf perjanjian internasional guna mendapatkan pertimbangan secara teknis, politis, dan yuridis.
- Rapat interdep juga membahas susunan, pedoman, dan posisi delegasi RI (DELRI) dalam tahap perundingan.
- Draf hasil rapat interdep disampaikan kepada mitra asing melalui Departemen Luar Negeri (komunikasi surat menyurat)

(2) Tahap Perundingan

- Bertujuan untuk mencapai kesepakatan atas materi yang belum dapat disetujui dalam tahap penjajagan (komunikasi surat menyurat)
- Pada perundingan multilateral, dalam “rules of procedures” mensyaratkan adanya surat kepercayaan (Credentials) bagi anggota delegasi yang menghadiri perundingan tersebut.
- Surat kepercayaan menunjukan pejabat – pejabat yang ditunjuk merupakan wakil sah Pemerintah RI.

(3) Tahap Perumusan Naskah

- Rumusan naskah merupakan hasil kesepakatan dalam penjajagan dan perundingan atas materi perjanjian internasional.
- Dalam perumusan naskah, harus memperhatikan elemen – elemen: (1) Judul; (2) Batang Tubuh: (a) Definisi, (b) Tujuan, (c) Lingkup Kerjasama, (d) Hak dan Kewajiban, (e) Pelaksanaan Kerjasama; (3) Penyelesaian Sengketa; (4) Perubahan/Amandemen; (5) Mulai Belaku, Masa Berlaku

dan Pengakhiran; (6) Force Majeur; (7) Ketentuan Penutup; dan (8) Penandatanganan (nama dan jabatan).

(4) Tahap Penerimaan Naskah

- Penerimaan naskah dilakukan dengan pembubuhan paraf yang dilakukan oleh Ketua perundingan masing – masing pihak terhadap rumusan naskah yang telah disepakati dan siap ditandatangani.
- Pembubuhan paraf belum mengikat masing – masing pihak.
- Pembubuhan paraf pada naskah perjanjian multilateral tidak dilakukan, tapi dilakukan penandatanganan hasil akhir (*Final Act*) dan tidak mengikat negara-negara penandatanganan.

(5) Tahap Penandatanganan

- Penandatanganan memerlukan Surat Kuasa (*Full Power*) kecuali Presiden dan Menlu (Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU PI).
- Full Power diperlukan jika: (1) Perjanjian tersebut mensyaratkan Full Power; (2) Perjanjian tidak mensyaratkan Full Power, tapi oleh UU PI mensyaratkan adanya Full Power; dan (3) Perjanjian lain yang menurut Menlu diperlukan Full Power.
- Tidak diperlukan Full Power jika menyangkut perjanjian teknis atau implementasi dari suatu perjanjian payung.
- Penandatanganan dilakukan oleh pejabat setingkat (antar kepala negara/kepala pemerintahan atau tingkat menteri).

(6) Pengesahan Perjanjian Internasional

- Dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut (pasal 9 ayat 2 UU PI).
- Pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan dengan undang - undang atau keputusan presiden (sekarang peraturan presiden)
- Dilakukan dalam bentuk (pasal 1 angka 1 UU PI): (1) Ratifikasi (*ratification*); (2) Aksesasi (*accession*); (3) Penerimaan (*acceptance*); atau (4) Penyetujuan (*approval*).
- Disahkan melalui Undang – undang, apabila berkenaan dengan (pasal 10 UU PI):
 - a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
 - b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah RI;
 - c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
 - d. hak asasi manusia atau lingkungan hidup;
 - e. pembentukan kaidah hukum baru;
 - f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- Disahkan melalui Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden) sepanjang tidak mengatur materi diatas (pasal 11 UU PI).

(7) Pemberlakuan Perjanjian Internasional

- Perjanjian Internasional dapat berlaku pada saat:
 - a. Penandatanganan Perjanjian:

“This Agreement shall enter into force upon signature”

- b. Pada tanggal yang disepakati melalui pertukaran nota (*Exchange of Notes*):

“This MoU shall enter into force on a date to be mutually agreed upon by the parties, which shall be notified through the exchange of diplomatic notes”.

- c. Pertukaran Notifikasi bahwa prosedur internal telah dipenuhi:

“This Agreement shall enter into force on the latter of the date on which the respective Governments may notify each other in writing that formalities constitutionally required in their respective State have been complied with”

- d. Pertukaran Piagam Pengesahan:

“This Agreement shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification”.

- e. Pengesahan:

“This Agreement shall be subject to ratification”.

- f. Cara lain yang disepakati para pihak

(8) Pengakhiran Perjanjian Internasional

- Disepakati oleh para pihak dan diatur dalam perjanjian internasional tersebut.
- Dalam praktek Indonesia perlu diadakan rapat interdep membahas pengakhiran perjanjian internasional.
- Melalui beberapa cara: (1) Penyampaian Instrumen of Termination/ withdrawal /denunciation jika pengikatan pada perjanjian internasional

dilakukan dengan penyampaian *instrument of ratification/accession*; dan
(2) Penyampaian Nota Diplomatik jika pengikatan tidak dilakukan tanpa
penyampaian *instrument of ratification/accession*.⁷

Selengkapnya terkait dengan tahapan pembuatan perjanjian internasional digambarkan melalui bagan yang mengacu pada UU No. 20/2004 tentang Perjanjian Internasional.

⁷ Presentasi Direktur Hukum Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Diar Nurbiantoro “Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional” slide 6-14

Bagan 3.2 Pembuatan Perjanjian Internasional Berdasarkan

UU Perjanjian Internasional

D. Mekanisme Pembuatan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁸

Berdasarkan amanat Pasal 11 UUD 1945, dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional dengan kategori yang dimaksud diperlukan pengesahan melalui UU. Pasal 12 ayat 13 UU No. 24/2000 menjelaskan bahwa prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa RUU sebagai bagian dari proses pengesahan perjanjian internasional berasal dari Presiden.

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (2012), Selayang Pandang Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI Biro Humas dan Pemberitaan. h. 63.

RUU yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan surat pengantar Presiden yang menyebut juga menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan tersebut. Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Selengkapnya diilustrasikan sebagai berikut:

Grafik. Alur Pembuatan UU dari Pemerintah

Selanjutnya pembahasan RUU dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan menteri yang mewakili Presiden, sebagai berikut:

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus; dengan cara: (a) pengantar musyawarah, (b) pembahasan daftar inventarisasi masalah dan (c) penyampaian pendapat mini.
- (2) Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna dengan acara:
 - (a) pengambilan keputusan yang didahului oleh: (1) penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I; (2) pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap

fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan Rapat Paripurna; dan (b) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri.⁹

E. Sejarah Pembentukan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran merupakan luaran dari proses panjang perundingan di forum internasional. Arus manusia menjadi fokus pembahasan pada komunitas internasional dan agensi PBB. *International Labour Organization* (ILO) telah mengelaborasi dua konvensi yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran yakni Konvensi 97 (1949) terkait *Migration for Employment* dan Konvensi 143 (1975) terkait *Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers*. Pada 1970-an, diakui bahwa migran merupakan kelompok rentan dan bahwa pemajuan hak asasi manusia bagi populasi migran ini memerlukan konvensi PBB khusus.

Sebuah kelompok kerja dibentuk pada tahun 1980, diketuai oleh Meksiko guna menyusun *International Convention on Protection of the Rights of All Migrant Workers and members of Their Families*. Konvensi ini lalu dibahas pada sidang pleno Majelis Umum PBB (*UN General Assembly*) tanggal 18 Desember 1990 kemudian didokumentasikan dalam resolusi nomor 45/158.

Sebuah kampanye untuk ratifikasi konvensi mulai diluncurkan pada tahun 1998, menyusul beberapa inisiatif lain dalam mempromosikan ratifikasi

⁹ Ibid., h. 64

Konvensi. *Steering Committee* (Komite Pengarah) Kampanye kemudian dibentuk di Jenewa oleh sebuah LSM *Migrant Rights International* dengan tujuan membangun dasar yang luas untuk kampanye global ratifikasi dan pemberlakuan konvensi.

Kemudian dibentuk Komite Pengarah Kampanye yang terdiri dari 14 organisasi, yakni badan-badan PBB, serikat pekerja, LSM dan organisasi internasional lainnya. Adapun tiga badan PBB yang termasuk dalam Komite Pengarah Kampanye memiliki tugas yang spesifik antara lain: *The United Nations High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR) bertugas untuk membentuk pelapor khusus berkaitan dengan hak asasi migran; *International Labour Organization* (ILO) bertugas untuk melakukan promosi dan kajian terhadap perlindungan standar perburuhan. Seperti hal-hal yang perlu tercantum dalam hak-hak pekerja migran; *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) bertugas untuk fokus terhadap hak-hak pekerja migran dan promosi terhadap integrasi sosial migran yang memiliki budaya yang beranekaragam.

The International Organization for Migration (IOM) juga merupakan anggota Komite Pengarah. IOM adalah organisasi internasional di bidang migrasi yang merupakan sebuah lembaga antar-pemerintah di luar sistem PBB dengan anggota sekitar 100 negara. Organisasi ini berusaha untuk memajukan pemahaman tentang isu-isu migrasi dan mempromosikan manajemen tertib migrasi untuk kepentingan baik pendatang maupun masyarakat.¹⁰

¹⁰ United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, (2003), *United Nations Convention on Migrants' Rights*, New York: UNESCO, h. 2.

Sebelum bisa diberlakukan, konvensi ini membutuhkan minimal 20 ratifikasi. Diratifikasinya konvensi ini oleh Guatemala dan El Salvador pada tanggal 14 Maret 2003 menandai ambang batas pemberlakuan konvensi ini telah tercapai. Sehingga tercatat 22 negara telah meratifikasi Konvensi ini hingga masuk dalam kategori *entry into force* pada 1 Juli 2003. Berikut 22 negara yang telah meratifikasi konvensi ini dengan tahun ratifikasi:

Tabel 3.1 22 Negara Peratifikasi Konvensi hingga mulai diberlakukan

1993	Mesir, Moroko
1994	Seychelles
1995	Kolombia, Filipina, Uganda
1996	Bosnia & Herzegovina, Sri Lanka
1997	Cape Verde
1999	Azerbaijan, Meksiko, Senegal
2000	Bolivia, Ghana, Guinea
2001	Belize, Uruguay
2002	Ekuador, Tajikistan
2003	El Salvador, Guatemala, Mali

Sumber: UNESCO, 2003.

Ratifikasi konvensi oleh negara berarti lembaga legislatif maupun cabang pembuatan undang-undang dari pemerintah telah mengadopsi Konvensi dan berjanji untuk memasukkan Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional.

F. Perkembangan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Setelah konvensi ini secara resmi diberlakukan pada 1 Juli 2003, negara-negara di dunia semakin antusias untuk turut ambil bagian dalam konvensi ini. Hingga September 2012, tercatat 35 negara telah menjadi pihak yang menandatangani konvensi, dan 46 negara telah mengikatkan diri pada konvensi ini

yang berarti sudah menjadi negara yang meratifikasi, termasuk didalamnya Indonesia.

Tabel 3.2
Status International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

<i>Participant</i>	<i>Signature, Succession to signature(d)</i>	<i>Ratification, Accession(a), Succession(d)</i>	<i>Participant</i>	<i>Signature, Succession to signature(d)</i>	<i>Ratification, Accession(a), Succession(d)</i>
Albania.....		5 Jun 2007 a	Lesotho	24 Sep 2004	16 Sep 2005
Algeria		21 Apr 2005 a	Liberia.....	22 Sep 2004	
Argentina.....	10 Aug 2004	23 Feb 2007	Libya.....		18 Jun 2004 a
Azerbaijan.....		11 Jan 1999 a	Mali.....		5 Jun 2003 a
Bangladesh.....	7 Oct 1998	24 Aug 2011	Mauritania.....		22 Jan 2007 a
Belize		14 Nov 2001 a	Mexico	22 May 1991	8 Mar 1999
Benin.....	15 Sep 2005		Montenegro ²	23 Oct 2006 d	
Bolivia (Plurinational State of)		16 Oct 2000 a	Morocco	15 Aug 1991	21 Jun 1993
Bosnia and Herzegovina		13 Dec 1996 a	Mozambique	15 Mar 2012	
Burkina Faso	16 Nov 2001	26 Nov 2003	Nicaragua		26 Oct 2005 a
Cambodia	27 Sep 2004		Niger		18 Mar 2009 a
Cameroon.....	15 Dec 2009		Nigeria		27 Jul 2009 a
Cape Verde.....		16 Sep 1997 a	Palau	20 Sep 2011	
Chad.....	26 Sep 2012		Paraguay	13 Sep 2000	23 Sep 2008
Chile.....	24 Sep 1993	21 Mar 2005	Peru.....	22 Sep 2004	14 Sep 2005
Colombia.....		24 May 1995 a	Philippines	15 Nov 1993	5 Jul 1995
Comoros.....	22 Sep 2000		Rwanda		15 Dec 2008 a
Congo.....	29 Sep 2008		Sao Tome and Principe .	6 Sep 2000	
Ecuador		5 Feb 2002 a	Senegal.....		9 Jun 1999 a
Egypt.....		19 Feb 1993 a	Serbia	11 Nov 2004	
El Salvador.....	13 Sep 2002	14 Mar 2003	Seychelles		15 Dec 1994 a
Gabon.....	15 Dec 2004		Sierra Leone.....	15 Sep 2000	
Ghana	7 Sep 2000	7 Sep 2000	Sri Lanka.....		11 Mar 1996 a
Guatemala.....	7 Sep 2000	14 Mar 2003	St. Vincent and the Grenadines		29 Oct 2010 a
Guinea.....		7 Sep 2000 a	Syrian Arab Republic....		2 Jun 2005 a
Guinea-Bissau.....	12 Sep 2000		Tajikistan	7 Sep 2000	8 Jan 2002
Guyana.....	15 Sep 2005	7 Jul 2010	Timor-Leste		30 Jan 2004 a
Honduras.....		9 Aug 2005 a	Togo.....	15 Nov 2001	
Indonesia.....	22 Sep 2004	31 May 2012	Turkey	13 Jan 1999	27 Sep 2004
Jamaica.....	25 Sep 2008	25 Sep 2008	Uganda.....		14 Nov 1995 a
Kyrgyzstan.....		29 Sep 2003 a	Uruguay		15 Feb 2001 a
			Venezuela (Bolivarian	4 Oct 2011	

Menurut UNESCO, sejauh ini negara yang telah meratifikasi konvensi mayoritas berasal dari negara asal pekerja migran (seperti: Meksiko, Moroko, dan Filipina, termasuk Indonesia). Bagi negara-negara tersebut, konvensi ini memiliki arti penting sebagai sarana untuk melindungi warganegaranya yang tinggal di luar negeri. Di Filipina misalnya, ratifikasi konvensi berlangsung dalam konteks yang

didasarkan pada beberapa kasus pekerja Filipina di luar negeri mengalami penganiayaan, sehingga mendorong pemerintah Filipina untuk meratifikasi konvensi ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara ini juga merupakan negara transit dan negara tujuan, bersamaan dengan hal tersebut maka konvensi ini juga mengamanatkan tanggungjawab bagi negara yang telah meratifikasi untuk melindungi hak-hak migran di wilayah mereka.¹¹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini. Sehingga Indonesia termasuk di dalam golongan negara-negara yang terikat dengan konsekuensi atas ratifikasi/pengikatan diri melalui UU yang telah dilakukan.

Penjelasan sebelumnya terkait potret Filipina yang juga merupakan negara pengirim pekerja migran memiliki implikasi yang sama terhadap Indonesia yakni tanggungjawab yang diemban terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran yang berada di wilayah Indonesia.

G. Ringkasan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) merupakan suatu perjanjian internasional yang terdiri dari pembukaan/preamble, 9 bagian, dan 93 pasal. Namun dikarenakan pasal/artikel yang terlalu banyak untuk dipaparkan satu per satu, maka ringkasan konvensi ini akan dipaparkan

¹¹ *Ibid.*, h. 3.

berdasarkan bagian-bagiannya. Ringkasan selengkapnya dipaparkan dalam Lampiran 1. Berikut dipaparkan struktur Konvensi agar memudahkan dalam memahami keseluruhan pembahasan Konvensi ini.

Tabel 3.3 Struktur Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Bagian	Pembahasan	Struktur
I	Ruang lingkup dan definisi	6 pasal / pasal 1-6
II	Non-diskriminasi dalam kaitan dengan hak	1 pasal / pasal 7
III	Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran	28 pasal / pasal 8-35
IV	Hak lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler	21 pasal / pasal 36-56
V	Ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya	7 pasal / pasal 57-63
VI	Pemajuan kondisi yang baik, setara, manusiawi, dan sah sehubungan dengan migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya	8 pasal / pasal 64-71
VII	Penerapan konvensi	7 pasal / pasal 72-78
VIII	Ketentuan umum	6 pasal / pasal 79-84
IX	Ketentuan penutup	9 pasal / pasal 85-93
Total		93 pasal

Dalam Konvensi tersebut mengindikasikan tanggungjawab Negara-negara pihak untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran sangat besar. Tanggungjawab Negara pihak, dalam hal ini adalah Indonesia terdapat pada bagian III, IV, V, dan VI yang ekuivalen dengan 61 dari 93 pasal.

Apabila dipersentasekan maka 65% isi dari Konvensi ini menitikberatkan kewajiban Negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan perlindungan menyeluruh atas hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Sehingga perlu dipertanyakan apakah alasan pemerintah Indonesia sehingga bersedia meratifikasi Konvensi ini.

Ditambah lagi dengan cakupan Konvensi ini luas, akibatnya Negara mempunyai tanggungjawab yang luas atas pekerja migran yang berada di wilayah negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah setempat yang telah berkomitmen atas ratifikasi Konvensi ini. Demikian juga dengan definisi dari pekerja migran yang tidak hanya mencakup mereka yang berada dalam kondisi reguler (lengkap administratif), melainkan juga pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengakomodasi pekerja migran dalam kondisi tidak reguler (ilegal). Karena konvensi ini mengamanatkan kepada Negara pihak untuk menjunjung tinggi Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran (bagian III).

Namun demikian Indonesia juga berpeluang untuk menjadi anggota Komite sebagai tim pengawasan atas pelaksanaan Konvensi ini sebagaimana dicantumkan pada bagian IV 'penerapan konvensi'. Posisi ini dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia di forum internasional.

Hal yang perlu diingat yakni konvensi ini memberikan konsekuensi bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan prima kepada pekerja migran di wilayah Indonesia, dalam hal ini TKA di Indonesia. Walaupun ada juga agenda nasional yang direncanakan sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi ini yakni mengadopsi nilai-nilai Konvensi ke dalam RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) sebagai bentuk harmonisasi isi antara Konvensi dengan hukum nasional.

BAB IV

ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN

A. Kronologi Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Sebelum mengetahui lebih lanjut alasan pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi internasional perlindungan hak pekerja migran. Maka pada bagian ini perlu diketahui lebih mendalam terkait kronologi keterlibatan dan kondisi nasional maupun internasional yang turut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan (*decision making*) pemerintah atas Konvensi tersebut.

A.1 Awal Pembahasan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Di forum internasional, Konvensi ini diawali dengan pembentukan kelompok kerja pada tahun 1980 yang diketuai oleh Meksiko, selanjutnya dibahas pada Sidang Pleno Majelis Umum PBB (*UN General Assembly*) pada 18 Desember 1990 kemudian didokumentasikan dalam resolusi nomor 45/158. Pembahasan Konvensi pada Sidang Pleno tersebut menandai dibukanya kesempatan bagi seluruh negara untuk melakukan ratifikasi/aksesi terhadap Konvensi ini. Sebagaimana tercantum pada pasal 86 ayat (1) dan (2) dalam Konvensi tersebut yakni Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi, dan Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara.

Seiring berjalannya waktu, organisasi-organisasi PBB terkait didukung oleh LSM Internasional dalam bidang migrasi dan ketenagakerjaan mulai mengkampanyekan/memperkenalkan Konvensi ini seperti *The United Nations High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR), *International Labour Organization* (ILO), *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), maupun LSM *The International Organization for Migration* (IOM).

Sebelum mulai diberlakukan, Konvensi ini diharuskan untuk memenuhi syarat yang tercantum pada pasal 87 ayat (1) yakni: Konvensi ini mulai berlaku efektif di hari pertama pada bulan setelah periode tiga bulan sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya yang kedua puluh. Diratifikasinya konvensi ini oleh Guatemala dan El Salvador pada tanggal 14 Maret 2003 menandai ambang batas pemberlakuan konvensi ini telah tercapai. Sehingga tercatat 22 negara telah meratifikasi Konvensi ini hingga masuk dalam kategori *entry into force* pada 1 Juli 2003. Berikut 22 negara yang telah meratifikasi konvensi ini dengan tahun ratifikasi:

Tabel 4.1 22 Negara Peratifikasi Konvensi hingga mulai diberlakukan

1993	Mesir, Moroko
1994	Seychelles
1995	Kolombia, Filipina, Uganda
1996	Bosnia & Herzegovina, Sri Lanka
1997	Cape Verde
1999	Azerbaijan, Meksiko, Senegal
2000	Bolivia, Ghana, Guinea
2001	Belize, Uruguay
2002	Ekuador, Tajikistan
2003	El Salvador, Guatemala, Mali

Sumber: UNESCO, 2003.

Setelah konvensi ini secara resmi diberlakukan pada 1 Juli 2003, negara-negara di dunia semakin antusias untuk turut ambil bagian dalam konvensi ini. Hingga September 2012, tercatat 35 negara telah menjadi pihak yang menandatangani konvensi, dan 46 negara telah mengikatkan diri pada konvensi ini yang berarti sudah menjadi negara yang meratifikasi, termasuk didalamnya Indonesia yang menyerahkan dokumen hasil ratifikasi kepada PBB pada 31 Mei 2012.

A.2 Keterlibatan Indonesia dalam Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Setelah reformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2003, rupanya menjadi jalan bagi Indonesia untuk melibatkan diri dalam perjanjian internasional terkait perlindungan terhadap pekerja migran. Pro dan kontra terhadap langkah Indonesia ini seolah tidak menjadi halangan bagi Indonesia untuk mengikatkan diri terhadap konvensi perlindungan hak pekerja migran ini.

Sesi perjanjian tahunan PBB saat sidang Majelis Umum PBB ke-59 yang berlangsung pada 22 September 2004 menjadi momentum penting bagi Indonesia karena pada saat itu, Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda melakukan penandatanganan Konvensi yang merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran.

Keputusan Indonesia untuk menandatangani Konvensi tersebut mempunyai arti tidak lebih daripada bahwa para delegasi (perwakilan pemerintah) telah menyetujui suatu teks dan mau menerimanya, dan kemudian akan menyampaikannya kepada pemerintah masing-masing untuk mendapatkan tindak

lanjut pemerintah mereka yaitu akan menerima perjanjian internasional, dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan diberlakukannya perjanjian internasional yang bersangkutan. Keputusan untuk menandatangani Konvensi ini tentunya telah dipertimbangkan secara strategis oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk mengutus perwakilannya menandatangani Konvensi tersebut.

Sebagai tindak lanjut, maka sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Konvensi tersebut mensyaratkan bahwa ratifikasi oleh pemerintah yang bersangkutan untuk memberlakukan Konvensi ini. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka prosedur pembuatan perjanjian internasional dilalui dengan 5 tahap antara lain: (1) penjajagan, (2) perundingan, (3) perumusan naskah, (4) penerimaan; dan (5) penandatanganan. (Pasal 6 UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional)

Dikarenakan pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang bertandatangan dan tidak terlibat dalam tahap penjajagan, perundingan, perumusan naskah, dan penerimaan. Maka pemerintah hanya melakukan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dipersyaratkan yakni ratifikasi. Terkait dengan prosedur ratifikasi, pemerintah Indonesia dapat mengesahkannya dengan Peraturan Presiden dan Undang-Undang.

Sesuai Pasal 10 UU No. 24/2000 tentang sebab-sebab suatu perjanjian internasional harus diratifikasi dengan Undang-Undang apabila terkait dengan (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah RI; (c) kedaulatan atau hak berdaulat

negara; (d) hak asasi manusia atau lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; dan (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Dikarenakan Konvensi ini tergolong pada poin (d) pada Pasal 10 UU No. 24/2000 yakni hak asasi manusia, maka Konvensi ini harus melalui proses birokrasi hukum Indonesia sebelum dapat diberlakukan. Hal ini mengakibatkan Konvensi ini harus masuk di dalam pembahasan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI). Terkait prosedur pembuatan UU, DPR RI menerangkan bahwa Rancangan UU (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD.

Lebih lanjut, Pasal 12 ayat 13 UU No. 24/2000 menerangkan bahwa prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden. Maka dapat digolongkan bahwa Rancangan UU Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran ini termasuk RUU yang berasal dari Presiden atau RUU usulan pemerintah.

Prosedur terkait RUU yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan surat pengantar Presiden yang menyebut juga menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan tersebut. Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Selanjutnya pembahasan RUU dilakukan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan menteri yang mewakili Presiden, sebagai berikut: (1) Pembicaraan tingkat I salah satunya dilakukan dalam Rapat Komisi dengan cara: (a) pengantar musyawarah, (b) pembahasan daftar inventarisasi masalah dan (c) penyampaian pendapat mini. (2) Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna dengan acara: (a) pengambilan keputusan yang didahului oleh: (1) penyampaian laporan yang beris proses pendapat mini fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I; (2) pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan Rapat Paripurna; dan (b) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa Indonesia pernah menunda pemberlakuan suatu aturan yang urgen yakni UU Ketenagakerjaan hingga 6 tahun. Sehingga tidak mengherankan ketika proses ratifikasi ini juga berjalan sangat lambat. Setelah penandatanganan yang dilakukan pada 20 September 2004, pemerintah baru menindaklanjuti ratifikasi Konvensi internasional ini pada 7 Februari 2012 melalui Amanat Presiden (Ampres) No. R-17/Pres/02/2012. Sebagaimana dipersyaratkan dalam pembahasan RUU bahwa Presiden menyampaikan surat pengantar Presiden kepada Pimpinan DPR RI yang menyebut menteri yang mewakili. Maka melalui Ampres tersebut, Presiden menunjuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membahas dan menyetujui Konvensi ini.

Selanjutnya Ampres Ratifikasi diserahkan kepada Ketua DPR RI pada 9 Februari 2012 dan surat pelimpahan pembahasan ratifikasi kepada Komisi IX baru turun pada 29 Maret 2012. Komisi IX menindaklanjuti dengan menjadwalkan pembahasan Konvensi melalui Rapat Kerja (pembicaraan tingkat I) pada 9 April 2012 pukul 14.00 WIB. Rapat kerja komisi IX pada pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dipimpin oleh Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M. Si. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) serta dihadiri oleh 42 dari 49 anggota Komisi IX DPR RI, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Hukum dan HAM.

Pimpinan Sidang mulai membuka persidangan dengan menyampaikan agenda rapat kerja antara lain: (1) Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak seluruh pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; (2) Pandangan Fraksi terhadap RUU usul Pemerintah; (3) Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM; (4) Pengantar Pimpinan Komisi IX DPR RI; (5) Penyampaian Pendapat Mini Fraksi sebagai sikap akhir; (6) Penandatanganan Naskah RUU; dan (7) Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

Memasuki agenda pertama yakni penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi. Pimpinan Sidang mempersilahkan perwakilan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Poin-poin inti dari penjelasan pemerintah antara lain sebagai berikut:

- 1) Keputusan pemerintah menandatangani Konvensi dimaksud merefleksikan komitmen kuat pemerintah terhadap pemajuan nilai-nilai hak asasi manusia termasuk didalamnya hak-hak pekerja migran. Keputusan yang dimaksud juga mencerminkan prioritas pemerintah RI untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia. Kedua hal inilah yang mendorong Indonesia bertekad untuk meratifikasi Konvensi dimaksud guna menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.
- 2) Pemerintah mengakui bahwa proses persiapan bagi ratifikasi Konvensi telah melalui proses yang seksama dan karenanya memakan waktu yang relatif panjang. Pemerintah juga menyadari bahwa keputusan untuk meratifikasi Konvensi merupakan bagian dari perwujudan tanggung jawab negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia. Langkah ini juga menunjukkan kepedulian dan keberpihakan seluruh elemen bangsa untuk terus memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM di tanah air dan di tingkat global utamanya dalam memperkuat kerangka perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarga mereka.
- 3) Pemerintah menyadari bahwa perangkat internasional untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai kategori pekerja migran dan anggota keluarganya sangat kurang. Terutama lagi perlindungan untuk tenaga kerja migran yang masuk dalam kelompok sangat rentan terutama tenaga kerja migran di sektor

informal dan yang berada dalam situasi ireguler. Pemerintah juga menyadari bahwa konvensi Ini merupakan satu-satunya instrumen HAM internasional yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya secara komprehensif, serta memberikan kerangka perlindungan minimum bagi tenaga kerja migran untuk semua tahapan, baik pada saat pra keberangkatan, masa transit, masa bekerja di luar negeri dan bahkan purna penempatan.

- 4) Pemerintah juga memahami bahwa konvensi ini mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sehingga negara memiliki keleluasaan dalam menerapkan sistem administrasi keimigrasian nasional terkait tenaga asing, harapannya kesempatan kerja warga negaranya sendiri tetap terlindungi.
- 5) Pemerintah juga berharap bahwa di masa mendatang kedudukan konvensi pekerja migran ini di tatanan masyarakat internasional akan terus menguat, ini antara lain disebabkan terus meningkatnya kesadaran global akan pentingnya konvensi ini bagi perlindungan tenaga kerja migran dan anggota keluarganya seiring dengan besarnya jumlah orang bekerja di luar negeri.
- 6) Pemerintah merasa kandungan konvensi ini selaras dengan komitmen nasional Indonesia bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana dimaklumi Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional meletakkan tanggung jawab, pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM sebagai

tanggung jawab negara, secara khusus pemerintah merupakan pengemban tanggung jawab tersebut. Amanat ini tentunya sangat relevan bagi pemajuan dan perlindungan Hak-hak tenaga kerja migran Indonesia, adalah merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan penuh terhadap mereka di semua tahap mulai dari pra penempatan, saat transit, masa bekerja, dan purna penempatan.

- 7) Pemerintah meyakini bahwa Konvensi ini akan dapat membantu memperkuat kerangka nasional, regional, dan global dalam mengatasi masalah perlindungan tenaga kerja migran Indonesia.
- 8) Pemerintah menyadari bahwa ratifikasi konvensi ini akan melahirkan sebuah kewajiban antara lain untuk melakukan upaya harmonisasi hukum nasional terutama yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia dan keluarganya, agar sesuai dengan standar hak asasi pekerja migran sebagaimana diatur dalam konvensi. Isi konvensi ini akan menjadi acuan untuk menciptakan dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja migran Indonesia.
- 9) Pemerintah optimis dengan konvensi ini Indonesia akan mempunyai amunisi untuk bergabung dalam berbagai kampanye global guna mendorong negara-negara lain khususnya negara tujuan pekerja migran untuk juga meratifikasi dan menerapkan norma dan standar yang diatur dalam konvensi ini.

Setelah penjelasan pemerintah terhadap RUU Konvensi dilakukan, pimpinan sidang melanjutkan ke agenda persetujuan terhadap pembahasan tingkat I yang disetujui oleh seluruh fraksi yang hadir dalam rapat kerja dimulai dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Fraksi Partai Golkar (PG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Gerindra.

Setelah persetujuan didapatkan maka pembahasan dilanjutkan ke Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dibahas per-nomor. Pembacaan DIM dilakukan oleh Pimpinan Sidang kemudian menanyakan satu per satu fraksi terkait persetujuan maupun tanggapan terkait DIM tersebut. DIM yang ditawarkan kepada peserta sidang berjumlah 16 poin. Selama pembahasan DIM peserta sidang tidak mempertanyakan Konvensi ini. Seluruh poin atas DIM tersebut disetujui oleh peserta sidang tanpa terkecuali.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pengantar pimpinan Komisi IX DPR RI atas pembahasan DIM RUU Konvensi ini. Poin penting yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi IX DPR RI ini yakni diratifikasinya konvensi pekerja migran ini merupakan sebuah langkah maju bagi negara Indonesia dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap jaminan perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Dengan meratifikasi konvensi ini maka pemerintah Indonesia dapat menyempurnakan sistem perlindungan hak-hak seluruh tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya, mulai dari pra penempatan, selama bekerja dan tinggal di negara penempatan

hingga purna penempatan. Selain itu, ratifikasi konvensi pekerja migran ini adalah sebuah modal negara Indonesia untuk mendesak negara-negara lain, khususnya negara penempatan dan negara transit, untuk mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi perlindungan hak-hak asasi manusia dari tenaga kerja Indonesia.

Seusai pembacaan pengantar dilanjutkan dengan pembacaan pendapat mini fraksi oleh masing-masing perwakilan fraksi terkait RUU Konvensi ini sebagai berikut:

1) Fraksi Partai Demokrat

Fraksi PD menggarisbawahi empat hal yang menjadi urgensi diratifikasi konvensi ini:

Pertama, mengenai hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya masih perlu ditingkatkan baik pada tahap pra penempatan, selama bekerja maupun purna penempatan.

Kedua, mengenai kewajiban negara, fraksi Partai Demokrat menyetujui bahwa negara berkewajiban merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam konvensi kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi. Pemerintah Indonesia masih perlu meningkatkan upaya-upaya perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya berdasarkan norma-norma hak asasi manusia universal. Disamping itu fraksi partai Demokrat juga meminta agar Pemerintah

secara sungguh-sungguh mengkaji dan mempersiapkan diri atas konsekuensi dari ratifikasi ini. Tentunya yang perlu kita cermati baik-baik adalah pasal 54 ayat (2) huruf b.

Ketiga, berkaitan dengan peran komite perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, fraksi Partai Demokrat menyetujui peran komite untuk melakukan kerjasama Internasional dan koordinasi dengan organisasi buruh internasional, badan dan organ khusus perserikatan bangsa-bangsa, organisasi antar negara serta badan terkait lainnya.

Keempat, mengenai pendekatan multilateral sebagai pelengkap pendekatan bilateral, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa konvensi pekerja migran merupakan mekanisme multilateral yang memungkinkan dorongan terhadap negara tujuan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan multilateral terbukti dapat meretas kebuntuan bilateral.

2) Fraksi Partai Golkar

Butir-butir penting yang patut menjadi perhatian bersama dalam Konvensi ini antara lain:

Pertama, pengertian mengenai Perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran. Konsep perlindungan yang diatur dalam konvensi agar diharmonisasikan dengan ketentuan perlindungan hak-hak pekerja migran pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Catatan kami adalah bahwa pengertian perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran pada aturan konvensi terlalu luas nyaris tidak ada batasnya, sementara kondisi keuangan negara

sangatlah terbatas, sehingga apabila perlindungan hak-hak pekerja migran akhirnya mengakibatkan konsekuensi pembiayaan pemerintah akan menyebabkan beban biaya yang terlalu besar ditanggung oleh APBN.

Kedua, konvensi ICMW mengatur, apabila terjadi perselisihan antara dua atau lebih negara yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran maka salah satu pihak dapat mengajukan arbitrase atau ke Mahkamah Internasional atau dalam ini pasal 92 ayat (1), dalam ratifikasi konvensi ICMW melalui pengesahan RUU Konvensi ICMW Fraksi Partai Golkar belum sependapat dengan ketentuan ini dengan pemikiran karena negara tujuan pekerja migran Indonesia pada umumnya merupakan negara yang sudah berkembang sementara Indonesia masih merupakan negara yang sedang berkembang, maka negara tujuan pekerja migran Indonesia umumnya lebih mampu membiayai proses arbitrase, maka besar kemungkinan negara tujuan pekerja migran Indonesia akan memenangkan gugatan di lembaga Arbitrase tersebut, Fraksi Partai Golkar menyarankan dalam RUU Konvensi tersebut diatur bahwa kasus perlindungan pekerja migran hanya dapat dibawa pada proses Arbitrase Internasional apabila disetujui paling sedikit 5 negara yang sudah meratifikasi Konvensi ICMW.

Ketiga, Pasal 92 ayat (2), konvensi ICMW menyatakan bahwa perlindungan atas hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya adalah mengikat. Makna dari ketentuan ini adalah bahwa negara terikat untuk melindungi seluruh hak-hak pekerja migran beserta keluarganya. Apabila Pemerintah tidak mampu melindungi pekerja migran tersebut, besar kemungkinan Pemerintah mendapat sanksi Internasional. Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pasal 92

ayat (2) tidak perlu diratifikasi. Artinya Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya sepanjang Pemerintah mampu melaksanakannya.

Keempat, Pasal 46 Konvensi ICMW menyatakan bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya dalam status reguler menikmati pembebasan pajak impor dan ekspor rumah tangga dan barang pribadi. Pasal 48 menyatakan bahwa pekerja migran tidak akan dikenakan pajak lebih berat dibandingkan dengan warga negara lainnya dalam kondisi kehidupan yang setara. Sedangkan pasal 47 mengatur bahwa pekerja migran berhak untuk mentransfer pendapatan dan tabungan mereka, khususnya dalam hal dana tersebut diperlukan untuk membiayai keluarga mereka yang tinggal di negara asal migran. Dalam hal ini Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa peraturan perpajakan dengan peraturan di bidang, tetap berlaku secara nasional dan tidak mengecualikan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat.

Kelima, kemauan politik pemerintah untuk memastikan perlindungan internasional bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya melalui ratifikasi Konvensi mengenai hak-hak pekerja migran beserta anggota keluarganya harus dapat diterapkan sesuai dengan UU yang berlaku secara nasional. Apabila bertentangan, maka terlebih dahulu dilakukan revisi atas UU tersebut agar mampu menyesuaikan dengan peraturan Internasional Konvensi ICMW.

Selain menitikberatkan dalam 5 poin, Fraksi PG juga menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi alasan pemerintah baru meratifikasi Konvensi ini.

Ditinjau dari perspektif berbagai peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya antara lain melalui payung hukum UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri, nampak bahwa substansi konvensi internasional ini jika dibandingkan dengan kedua UU tersebut menimbulkan beberapa perbedaan ketidaksesuaian. Dari hasil pengkajian dan pembahasan tercatat perbedaan baik dari segi filosofis, tujuan, ruang lingkup dan teknis melalui berbagai ketentuan dalam pasal dan ayat yang mengatur substansi kedua UU tersebut tidak atau belum sejalan dengan konvensi ICMW dan hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap ICMW selama ini.

Alasan utama Pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi selama ini lebih disebabkan karena adanya sejumlah kewajiban yang muncul sebagai konsekuensi jika Indonesia meratifikasinya. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap berbagai peraturan terkait dengan hak-hak pekerja migran yang tercakup dalam ICMW dan ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar, namun perlu pula dicatat apabila Indonesia mampu meratifikasi konvensi tersebut, maka Indonesia dapat menaikkan posisi tawar mengangkat masalah TKI di dunia Internasional yang dapat menggunakan berbagai mediasi dalam mekanisme pengaduan. Berdasarkan pijakan pemikiran tersebut secara umum Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga terkait bersama DPR terus berjuang untuk melakukan ratifikasi konvensi hak-hak seluruh pekerja migran beserta keluarganya.

3) Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan 3 poin catatan penting dari Konvensi tersebut, serta 3 poin atas keberatan dan perdebatan tentang ratifikasi tersebut sudah terjawab. Berikut catatan penting tersebut.

Pertama. Fungsi Konvensi PBB Tahun 1990. Memberikan jaminan perlindungan berada dalam kerangka hukum Internasional, yakni fungsi pencegahan, penanggulangan dan penyelesaian sengketa hukum antar negara yang terkait. Konvensi ini merupakan konvensi yang relatif paling lengkap menyerap berbagai prinsip dari aturan HAM Internasional, seperti hak Sipil, hak ekonomi sosial budaya, anti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan konvensi hak anak.

Kedua. Pentingnya meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990. Mengatur mengenai standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seluruh buruh migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mendorong negara agar menyeleraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub dalam konvensi. Kemudian mengakui adanya kontribusi yang disumbangkan oleh buruh migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja serta pembangunan negara asal mereka. Kemudian mencantumkan serangkaian standar untuk perlindungan buruh migran dan kewajiban negara yang terkait, meliputi negara asal, transit dan negara tempat bekerja. Mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh buruh migran dan Anggota Keluarga di seluruh proses migrasi termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.

Dan yang terakhir yang Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa konvensi ini tidak hanya melindungi para buruh migran tapi juga melindungi kepentingan negara penerima buruh migran terkait dengan pembatasan akses kategori pekerjaan guna melindungi warga negaranya. Pembatasan ini tertuang pada Pasal 52 ayat (2a) : “membatasi akses pada kategori pekerjaan, fungsi pelayanan atau kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan negara tersebut dan diterapkan oleh ketentuan hukum nasional”.

Ketiga. Beberapa pasal perlindungan yang diatur dalam konvensi PBB 1990 yang menjadi catatan dari Fraksi PDI Perjuangan adalah:

1. Mengatur dan mengakui keluarga buruh migran;
2. Adanya kepastian non diskriminasi dalam kaitan dengan hak buruh migran;
3. Bebas keluar-masuk meninggalkan negara manapun termasuk negara asal mereka meskipun akan dibatasi bila diperlukan untuk melindungi buruh migran;
4. Hak atas kehidupan yang dilindungi oleh hukum;
5. Hak tidak menjadi korban penyiksaan atau bentuk tindakan yang tidak manusiawi;
6. Bebas dari perbudakan, kerja paksa, termasuk kerja dalam tahanan;
7. Hak untuk bebas berfikir, menjalankan agama dan berpendapat;
8. Hak untuk memiliki pendapat yang bebas dari intervensi;
9. Hak untuk memiliki property atau barang dan bebas dari perampasan harta yang sewenang-wenang;

10. Hak mendapatkan perlindungan dari negara, baik dari segala macam ancaman dan proses hukum;
11. Hak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial ketika mendapatkan hukuman;
12. Hak mendapatkan bantuan hukum ketika diadili;
13. Hak untuk tidak disita dan dihancurkan dokumen identitasnya atau dokumen izin masuk atau izin tinggal atau izin kerja;
14. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dengan negara tujuan bekerja;
15. Hak mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan negara tujuan bekerja;
16. Hak mendapatkan kesehatan.

Keberatan dan perdebatan mengenai ratifikasi Konvensi ini yang sudah terjawab antara lain:

Pertama, adalah memiliki properti di negara tempat bekerja, perdebatan yang ada mengkhawatirkan jika pekerja asing di Republik Indonesia kemudian akan semena-mena memiliki properti. Hal ini ternyata sudah diatur dalam pasal 15 dengan terjemahan bahasa “tidak seorangpun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh secara sewenang-wenang dirampas harta bendanya, baik yang dimiliki sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain” apabila menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara tujuan kerja, aset pekerja migran atau anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk memperoleh kompensasi yang adil dan memadai. Artinya sudah jelas bahwa bukan memiliki hak kesewenang-wenangan dalam properti di negara tujuan.

Kedua, adalah hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan pada Pasal 28. Pasal ini dapat digunakan sebagai dasar pembuatan MoU dengan negara penerima buruh migran, bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai standar perlindungan sesuai konvensi PBB Tahun 1990 untuk melindungi warga negaranya di luar negeri.

Ketiga, mengenai pajak yang diberikan kepada pekerja migran, Pasal 48, sering dipahami bahwa pekerja migran dikhawatirkan yang ada di Indonesia kemudian bebas dari pajak. Ternyata dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa artinya pekerja migran tidak dikenai pajak ganda atau pajak yang lebih besar dari warga negara tempat mereka bekerja. Oleh karenanya negara pihak wajib menetapkan kebijakan yang tepat.

4) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Terkait Konvensi ini, Fraksi PKS memberikan beberapa penguatan:

1. Memperkuat peran diplomasi Indonesia untuk mendesak negara-negara tujuan pekerja migran dari Indonesia untuk juga meratifikasi konvensi ini;
2. Meminta kepada Pemerintah menyiapkan perangkat yang lebih baik dalam mengawasi tenaga kerja asing yang ada di Indonesia;
3. Meminta kepada Pemerintah untuk menghadirkan komitmen demi kepentingan negara yang ditetapkan oleh ketentuan hukum nasional untuk melindungi pekerja migran
4. Perlindungan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum internasional yang tidak hanya diberikan kepada pekerja migran dalam yurisdiksi Indonesia tetapi juga pekerja migran Indonesia di luar negeri.

5. Hendaknya cakupan pokok-pokok substansi Konvensi dapat memperkuat hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, yakni; hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan serta beragama, serta hak berekspresi, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk membentuk perkumpulan dan serikat pekerja, serta hak atas akses terhadap pendidikan bagi anak-anak pekerja migran.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional

Fraksi PAN mengingatkan beberapa hal terkait konsekuensi dari pelaksanaan Konvensi ini, antara lain:

Indonesia memiliki kebutuhan untuk mengatur dan memajukan mekanisme perlindungan dan penataan manajemen migrasi. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan pekerja dapat memperoleh perlindungan dan haknya lebih baik lagi, mulai dari pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun purna-penempatan.

Dengan meratifikasi konvensi pekerja migran diharapkan Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan upaya-upaya perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya berdasarkan norma-norma hak asasi manusia universal.

Ratifikasi Konvensi Buruh Migran ini sangat penting untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di komunitas internasional. Sehingga penyelesaian kasus yang menyangkut pekerja migran Indonesia di luar negeri berpotensi mendapat

kemudahan. Selama ini, negara tujuan pekerja migran sering menjadikan alasan belumnya Indonesia meratifikasi konvensi itu sehingga negara-negara yang bersangkutan tidak wajib melindungi pekerja migran Indonesia.

Ratifikasi konvensi ini memberi perlindungan terhadap pekerja migran yang tak berdokumen. Keuntungan meratifikasi konvensi ini, sebagai acuan untuk merevisi UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu untuk memaksimalkan perlindungan pekerja migran Indonesia menegaskan pemerintah dapat membangun hubungan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global.

Harapannya Konvensi ini dapat memberantas praktek penyelundupan manusia antar negara karena sudah semakin memprihatinkan. Ratifikasi konvensi ini nantinya akan melindungi warga negara Indonesia dari praktek penyelundupan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan mereka ke negara lain secara ilegal.

Pemerintah diharapkan segera membuat peraturan pelaksanaan dan perangkat lain yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang ini, sekaligus menyiapkan kebijakan anggaran secara proposional sebagai konsekuensi logis dari penetapan Undang-undang ini.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang maka Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada komponen masyarakat terkait sehingga tumbuh persepsi yang sama dan sekaligus mendukung pelaksanaan Undang-Undang ini. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, diharapkan Ratifikasi Konvensi ini dapat mendorong terciptanya ratifikasi

universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global.

6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Fraksi PPP menyampaikan pandangannya dalam konteks praktis dari Konvensi ini, serta dorongan Fraksi PPP terhadap pemerintah dalam hal penanganan migrasi internasional selengkapnya sebagai berikut.

Dalam konteks praktis, konvensi ini memberikan panduan bagaimana struktur organisasi pemerintah harus melindungi pekerja migran, mulai dari pra pemberangkatan sampai kepada purna bekerja, serta kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu kekuatan dari konvensi ini dapat menjadikan alat untuk menekan perubahan domestik di negara yang meratifikasi konvensi dan untuk melobi dunia internasional untuk menegakkan standar HAM bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya.

Di samping itu yang menjadi catatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan adalah setelah ratifikasi konvensi ini disahkan, bahwa tidak secara otomatis perlindungan tenaga kerja migran kita di luar negeri dapat diatasi secara sempurna. Sejauh negara tujuan atau tempatnya bekerja belum ikut serta dalam meratifikasi konvensi ini. Sebagai catatan, dari 45 negara yang telah meratifikasi bisa dikatakan sedikit atau tidak bahwasanya banyak negara tujuan para pekerja kita belum meratifikasi konvensi pekerja migran ini.

Oleh karena itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendesak Pemerintah Indonesia untuk turut secara aktif mendesak negara-negara lain untuk

mengakui dan menghormati perlindungan hak asasi tenaga kerja Indonesia, sekaligus meratifikasi konvensi tersebut, sehingga pemerintah Indonesia dapat membangun kerjasama bilateral, regional maupun multilateral. Di samping itu yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa konvensi ini perlu juga menegaskan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja migran baik yang nantinya bekerja di negeri ini maupun yang akan bekerja di negara lain.

Melalui kesempatan ini, maka Fraksi PPP selanjutnya:

1. Mendesak pemerintah untuk melakukan dan mendorong optimalisasi dampak migrasi bagi kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya.
2. Mendorong terjadinya optimalisasi, sinergi, dan koordinasi antar Instansi dalam menangani masalah pekerja migran.
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam keseluruhan proses migrasi sehingga dapat meminimalkan terjadinya permasalahan yang dihadapi pekerja migran kita.

7) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi PKB dalam pendapatnya mengingatkan pemerintah terkait kewajiban yang diemban serta upaya harmonisasi dengan hukum nasional. Selengkapnya sebagai berikut.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

abadi dan keadilan sosial, oleh karena itu konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional bertanggungjawab untuk memajukan, melindungi dan menghormati serta memenuhi Hak Asasi Manusia. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya berdasarkan norma-norma hak azasi manusia secara universal.

Pekerja migran yang membutuhkan perlindungan tidak hanya pekerja formal akan tetapi banyak pekerja migran Indonesia yang berstatus tidak terdokumentasikan, sehingga dibutuhkan sebuah kerangka normatif universal yang mampu memberikan perlindungan sekaligus menjadi rujukan untuk memperkuat kerangka perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dalam memperkuat ketentuan perundang-undangan nasional, secara bilateral, regional dan global demi untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, maka diperlukan norma-norma hak asasi manusia yang bersifat universal sehingga menyusun sebuah rancangan undang-undang sebagai landasan ratifikasi Indonesia terhadap konvensi pekerja migran internasional menjadi kebutuhan negara yang sangat mendesak.

Selain itu, dalam konvensi pekerja migran internasional termaktub perlindungan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, baik dalam situasi reguler maupun tidak reguler, pekerja di sektor formal maupun informal. Sementara itu Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri belum maksimal mengakomodir seluruh isi dari

konvensi pekerja migran. UU ini masih mengakomodir perlindungan pekerja migran pada pra penempatan dan pasca penempatan. Pada saat penempatan atau saat pekerja belum ada perlindungan maksimal hukum yang menaunginya.

8) Fraksi Partai Gerindra

Fraksi Partai Gerindra dalam pendapatnya menyampaikan bahwa ratifikasi Konvensi ini akan memberikan manfaat antara lain:

1. Mengatur semua jaminan perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya dalam setiap fase migrasi, semua status migrasi baik berdokumen maupun tidak berdokumen, semua area migrasi, area asal, transit, maupun tujuan
2. Menjadi dasar kebijakan penting sebagai pengaturan sistem migrasi tenaga kerja dalam sistem hukum nasional yang melindungi hak asasi manusia pekerja migran dan anggota keluarganya, juga menjadi acuan dasar bagi pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi dan Ketenagakerjaan
3. Membantu mencegah migrasi yang tidak aman dan perdagangan manusia, karena konvensi ini sejak awal sudah mengatur dan menjamin tata cara migrasi yang aman
4. Meningkatkan posisi tawar diplomasi pemerintah untuk menuntut perlindungan maksimal kepada negara penerima pekerja migran.
5. Menjamin kesetaraan antara pekerja lokal dan pekerja migran bukan sebaliknya, untuk konteks Indonesia diskriminasi justru dialami buruh

lokal yang mengalami kesenjangan upah dan hak-hak lain dengan pekerja asing.

9) Fraksi Partai Hanura

Walaupun perwakilan partai ini tidak menghadiri pembahasan RUU, namun berikut poin-poin penting yang hendak disampaikan dalam pendapat mini fraksi antara lain:

Pertama, pengesahan Konvensi Internasional ini sangat penting untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di komunitas internasional. Sehingga penyelesaian kasus yang meyangkut pekerja migran Indonesia di luar negeri berpotensi mendapat kemudahan.

Kedua, pengesahan Konvensi ini penting bagi Indonesia karena dapat memberikan perlindungan komprehensif terutama bagi pekerja di sektor informal. Biasanya peraturan ketenagakerjaan tentang pekerja di sektor informal tidak banyak diatur perlindungannya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah memberi perlindungan terhadap pekerja migran yang tak berdokumen.

Ketiga, sebagai acuan untuk merevisi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Keempat, untuk memaksimalkan perlindungan pekerja migran Indonesia pemerintah dapat membangun hubungan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global. Adanya pengesahan Konvensi ini dapat memperkuat posisi Indonesia di tengah komunitas internasional.

Kelima, pengesahan konvensi ini bukan sebagai tujuan akhir akan tetapi suatu tindakan untuk mengintegrasikan norma dan standar masyarakat internasional ke dalam peraturan nasional.

Setelah penyampaian pendapat mini fraksi, pimpinan kemudian menyimpulkan pada prinsipnya adalah seluruh fraksi menyetujui seluruh muatan materi RUU Konvensi ini. Agenda selanjutnya yakni penandatanganan naskah RUU dari tiap wakil-wakil dari Fraksi. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II.

Interupsi sempat terjadi sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Interupsi tersebut disampaikan oleh perwakilan fraksi PKS Ansyori Siregar yang menyampaikan kekhawatirannya pasca pengesahan UU ratifikasi ini Indonesia akan banjir tenaga kerja asing dan pengangguran justru bertambah. Maka dari itu kemungkinan tersebut harus segera diantisipasi demi bangsa dan negara.

Setelah pimpinan sidang menerima interupsi, pimpinan kemudian mempersilahkan kepada perwakilan pemerintah untuk menyampaikan sepatah dua sebagai penutup. Penyampaian tersebut diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Poin-poin penting yang disampaikan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah mengapresiasi upaya Pimpinan dan Anggota Komisi IX dengan menyegerakan agenda pembahasan ratifikasi konvensi ini merupakan bentuk nyata dari dukungan dan keberpihakan DPR RI di dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Pemerintah percaya bahwa kerjasama yang kita lakukan ini

akan memberikan kontribusi signifikan bagi upaya kita melakukan penghormatan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak para pekerja migran dan anggota keluarganya.

- 2) Pemerintah meyakini bahwa keberhasilan pembahasan RUU pengesahan ini adalah keberhasilan bersama dalam rangka memberikan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak para pekerja migran dan anggota keluarganya. Keberhasilan ini juga merupakan keberhasilan segenap elemen bangsa termasuk para penggiat organisasi kemasyarakatan dan advokasi terhadap perlindungan para tenaga kerja Indonesia dan juga para penggerak HAM nasional yang telah melakukan berbagai upaya agar mendorong pengesahan konvensi ini.
- 3) Pemerintah sepakat bahwa proses ratifikasi ini adalah merupakan langkah awal, namun langkah awal ini sangatlah strategis bagi upaya kedepan yang lebih membutuhkan kerja keras dan komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan di dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang menjadi konsekuensi ratifikasi.
- 4) Pemerintah kembali menyampaikan komitmen dan keberpihakan Pemerintah untuk terus bekerja keras bersama-sama seluruh kalangan untuk terus melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta

upaya kita mengimplementasikan konvensi ini dengan berbagai langkah-langkah yang diperlukan.¹

Atas dasar persetujuan pembicaraan tingkat I tersebut maka pembahasan RUU Konvensi ini dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Tidak selang beberapa hari kemudian Rapat Paripurna yang salah satunya mengagendakan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan Konvensi Internasional perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Rapat paripurna ini diselenggarakan pada 12 April 2012 pukul 10.55-17.05 WIB. Pembahasan RUU Konvensi tersebut masuk dalam agenda pertama. Rapat kali ini dipimpin oleh Ir. H. Pramono Anung Wibowo, M.M (Wakil Ketua DPR RI/Korinbang), serta dihadiri 538 dari 560 anggota, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Dalam Negeri.

Sebagaimana mekanisme DPR RI tentang pembahasan dalam pembicaraan tingkat II dilaksanakan mengikuti urutan berikut: penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I, dilanjutkan dengan pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan Rapat Paripurna; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri.

Agenda pertama yakni penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat I yang diwakili oleh Pimpinan Komisi IX DPR RI Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz. Ia melaporkan proses pembahasan pada pembicaraan tingkat I bahwa berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI dengan Nomor

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012, *Risalah Rapat Kerja Komisi IX pada Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*, hh. 1-51.

R.17/Pres/02/2002 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja migran dan anggota keluarganya (*International Convention on The Protection of The Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families*) tertanggal 7 Februari 2012, presiden telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mewakili pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 2012 telah diadakan Rapat Badan Musyawarah DPR RI yang memutuskan bahwa penanganan pembahasan RUU tersebut diserahkan kepada Komisi IX DPR RI. Selanjutnya Pimpinan Komisi IX DPR RI telah menerima surat dari Pimpinan DPR RI perihal penugasan pembahasan RUU tersebut tertanggal 1 Maret 2012. Dalam melaksanakan tugas pembahasan RUU tersebut, Komisi IX DPR RI telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: (1) Tanggal 29 Maret 2012 mengadakan Rapat Internal Komisi IX DPR RI, dan (2) Tanggal 9 April 2012 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dengan agenda penjelasan pemerintah terhadap RUU, pandangan fraksi terhadap RUU usul pemerintah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, penyampaian pandangan mini fraksi dan diakhiri dengan penandatanganan naskah rancangan undang-undang.

Selanjutnya pimpinan Komisi IX DPR RI ini menyampaikan poin-poin penting terkait hasil yang telah dicapai dari pembicaraan tingkat I yang dapat

menjadi pertimbangan pengesahan RUU menjadi UU sebagai berikut: sebagai salah satu negara asal pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migrannya, sehingga dampak positif migrasi pekerja Indonesia dapat lebih dioptimalkan. Sebagai salah satu negara asal pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem yang lebih baik terhadap para pekerja migrannya.

Persetujuan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat hari ini adalah suatu bukti nyata bahwa Kesatuan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa yang melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain itu dengan diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran oleh Indonesia diharapkan dapat memperkuat landasan hukum bagi kebijakan nasional dalam meningkatkan sistem perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, khususnya hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia.

Setelah penyampaian laporan tersebut peserta sidang kemudian ditanyakan persetujuannya, dan seluruh peserta sidang menyatakan setuju. Rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Presiden diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Poin-poin penting yang disampaikan antara lain:

- 1) Pemerintah menyadari bahwa pengesahan konvensi ini merupakan cerminan komitmen kuat seluruh elemen bangsa terhadap kemajuan nilai-

nilai hak asasi manusia, terutama hak-hak pekerja migran. Hal ini juga mencerminkan prioritas bangsa dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia. Keputusan ini juga merupakan bagian dari perwujudan tanggung jawab negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia. Kepedulian dan keberpihakan seluruh elemen bangsa untuk terus memajukan dan melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya merupakan hal yang mutlak.

- 2) Pemerintah juga memiliki pandangan yang sejalan bahwa ratifikasi konvensi ini pada akhirnya harus secara nyata memberikan nilai tambah bagi upaya nasional dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Bahwa ratifikasi konvensi ini mengharuskan dilakukannya harmonisasi hukum nasional dan menjadikan norma dan standar yang dimuat dalam konvensi sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Bahwa ratifikasi konvensi juga akan memberikan dasar bagi Indonesia untuk mendorong negara lain, khususnya negara tujuan pekerja migran Indonesia, untuk meratifikasi konvensi ini. Indonesia akan terus ikut serta dalam upaya global untuk mencapai universalitas konvensi dimaksud.
- 3) Pemerintah juga telah menyimak dengan seksama pandangan dan catatan Anggota Dewan mengenai implikasi ratifikasi konvensi ini. Merupakan komitmen pemerintah untuk senantiasa memastikan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia tetap terlindungi. Konvensi ini memberikan ruang

gerak yang leluasa bagi Indonesia sebagai Negara Pihak untuk melaksanakan komitmen ini.

- 4) Pemerintah mengakui bahwa keprihatinan dan harapan publik mengenai jaminan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri juga merupakan keprihatinan, harapan dan bahkan terutama komitmen Pemerintah Indonesia. Adalah merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan penuh terhadap mereka di semua tahap, mulai dari pra penempatan, saat transit, masa bekerja dan purna penempatan. Sudah menjadi prioritas pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Ini merupakan tanggung jawab negara, ini merupakan amanat konstitusi.
- 5) Pemerintah menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui pengembangan kerangka legislasi nasional, penguatan kerangka kelembagaan, peningkatan koordinasi, maupun perlindungan langsung yang diberikan oleh perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Pada tingkat nasional, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap, meskipun tentunya masih terdapat ruang untuk terus memperbaikinya, terutama dengan melakukan harmonisasi setelah pengesahan konvensi ini pada waktunya. Pada tingkat bilateral, Indonesia terus memperkuat pengaturan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan tenaga kerja migran Indonesia untuk meningkatkan jaminan perlindungan mereka. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Rapat Kerja Komis IX, sudah menjadi keputusan pemerintah bahwa

Indonesia dengan sangat tegas akan melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja migran ke negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia. Pada tingkat regional, Indonesia merupakan negara yang senantiasa mendorong terciptanya suatu instrumen kerjasama yang kuat untuk perlindungan tenaga kerja migran.

- 6) Pemerintah juga menambahkan Indonesia juga aktif dalam forum *Colombo Process* dan forum Abu Dhabi Dialogue yang membahas upaya perlindungan terhadap tenaga kerja migran. Di forum global, terutama di PBB, komitmen Indonesia tidak dapat disanggah. Indonesia selalu menjadi negara terdepan dalam memperjuangkan perlindungan tenaga kerja migran. Bersama-sama Filipina misalnya, Indonesia telah memprakarsai resolusi di Majelis Umum PBB mengenai upaya masyarakat internasional untuk menanggulangi kekerasan terhadap tenaga kerja migran wanita. Namun demikian kita menyadari masih terdapat peluang untuk terus memperbaiki upaya dimaksud, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Karenanya kita berkeyakinan ratifikasi konvensi ini akan semakin memperkuat kerangka nasional, regional dan global dalam mengatasi masalah perlindungan tenaga kerja migran Indonesia.²

Setelah mendengar penyampaian pendapat akhir Presiden, pimpinan sidang kemudian menanyakan persetujuan peserta sidang atas pengesahan RUU Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran menjadi UU. Seluruh

² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012, *Risalah Rapat Paripurna ke- 25 Tahun Sidang 2011-2012*, hh. 21-29.

peserta sidang menyatakan setuju. Maka berakhirilah rangkaian pembahasan ratifikasi Konvensi sehingga menjadi Undang-Undang.

Ratifikasi Konvensi ini akhirnya menjadi UU No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on the Protection of The Rights Of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Mei 2012. Selanjutnya pasca meratifikasi Konvensi ini, Indonesia berkewajiban untuk menyerahkan hasil ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi.

Setelah hasil ratifikasi diterima oleh PBB melalui badan PBB yang mengurus pengarsipan perjanjian internasional yakni *United Nations Treaty Collection* mencantumkan Indonesia telah meratifikasi pada 31 Mei 2012. Atas diratifikasinya Konvensi ini maka Indonesia harus menerima segala konsekuensi yang timbul sebagaimana telah diingatkan pada Pasal 88 Konvensi tersebut yakni: suatu Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini tidak dapat mengecualikan penerapan bagian mana pun dari Konvensi ini, atau tanpa mengabaikan Pasal 3, mengecualikan kategori tertentu dari pekerja migran dalam penerapannya. Dalam dokumen yang diserahkan kepada PBB, Indonesia sama sekali tidak melakukan eksepsi/pengecualian terhadap isi dari Konvensi tersebut. Hal ini berarti Indonesia menerima seluruh pasal dari Konvensi tersebut.

Pembahasan di atas merupakan pemahaman dasar terkait sikap pemerintah terhadap Konvensi ini. Pandangan tersebut mulai dari perspektif pemerintah

selaku eksekutif, dan perspektif seluruh fraksi di DPR RI selaku legislatif. Bagian selanjutnya akan dibahas rasionalitas pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ini ditinjau dari aspek ekonomi dan politik.

B. Rasionalitas Pemerintah Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait pembuatan keputusan politik luar negeri yang diasumsikan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu ini melalui tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada.

Dengan demikian, maka pemerintah dalam mengambil pilihan-pilihan diasumsikan menelaah terlebih dahulu kepentingan nasional, dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan-perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif tersebut. Dalam memilih pilihan dan alternatif, para pembuat kebijakan menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”.

Jika teori aktor rasional ini (Allison dikutip dalam Sitepu, 2011:94-95) diaplikasikan dalam kasus ratifikasi Konvensi ini, maka Indonesia telah memilih suatu pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain, dimana pilihan tersebut harus optimal dan yang paling menguntungkan bagi pihak Indonesia. Dalam kasus ini, alternatif pilihan yang dihadapkan pada pemerintah Indonesia yakni Indonesia bersedia atau menunda meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak

Pekerja Migran. Adapun keuntungan dan kerugian dari keputusan Indonesia dalam menghadapi alternatif tersebut sebagai berikut.

Keuntungan yang didapatkan Indonesia memutuskan untuk mengadopsi aturan internasional ini dapat meningkatkan dua hal yakni aspek ekonomi, dan juga aspek politik. Peningkatan aspek ekonomi terkait dengan upaya perlindungan TKA di Indonesia yang merupakan penggerak investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan aspek politik, Indonesia mendapatkan apresiasi dari dalam negeri karena telah menaruh perhatian pada pekerja migran yang selama ini di rasa dikesampingkan.

Sedangkan kerugian yang harus ditanggung Indonesia ketika menunda melakukan ratifikasi, maka Indonesia akan terus didesak oleh negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap pekerja migran yang telah ditempatkan oleh negara tersebut. Hal ini didasarkan pada kondisi Indonesia yang dinilai rawan dari sisi sosial, maupun politik. Apabila Indonesia kembali menunda ratifikasi, maka investasi yang telah ditanamkan pada Indonesia diancam akan ditarik, sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang selama ini sudah terbukti mampu menghadapi krisis global.

Tuntutan juga datang dari masyarakat sipil (*civil society*) dan organisasi internasional yang menuntut hadirnya instrumen perlindungan hak pekerja migran di Indonesia. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang timbul pada pekerja migran Indonesia di luar negeri yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah, dengan adanya Konvensi yang mengikat maka pemerintah diharapkan dapat

meningkatkan perannya melindungi warga negaranya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Beban yang ditanggung Indonesia sebagai negara penandatangan pada Konvensi ini turut mendorong Indonesia pada akhirnya harus menentukan sikap apakah meratifikasi atau menunda. Dengan konsekuensi bahwa apabila Indonesia tidak meratifikasi maka negara-negara yang telah meratifikasi dapat memberikan tekanan pada pemerintah Indonesia.

Dari kedua alternatif yang ada dapat dijadikan acuan untuk melakukan suatu perbandingan keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia terkait dengan ratifikasi Konvensi ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, sehingga pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk meratifikasi konvensi ini setelah 8 tahun (2004-2012). Terkait dengan alasan yang digunakan pemerintah sebagai aktor rasional yakni alasan ekonomi dan alasan politik. Selengkapnya dibahas pada bagian berikut.

B.1 Alasan Ekonomi

Logika ekonomi menjadi alasan yang rasional oleh pemerintah ketika diperhadapkan dengan sebuah regulasi atau aturan yang harus diprioritaskan untuk ditindaklanjuti. Terlepas dari pandangan pemerintah (eksekutif) dan DPR RI (legislatif) saat melakukan pembahasan ratifikasi Konvensi yang menitikberatkan pada perlindungan TKI di luar negeri. Pandangan yang disampaikan memang menjadi salah satu tujuan dari pemerintah dan turut berpengaruh. Namun apabila

dilakukan kilas balik selama 8 tahun (2004-2012), maka sepertinya alasan tersebut kurang dapat diterima sebagai alasan utama.

Sesuai dengan teori aktor rasional maka diasumsikan bahwa pemerintah sedang mencari momentum yang tepat untuk meratifikasi Konvensi ini karena “optimalisasi hasil” menjadi pertimbangan utama yang dijadikan kriteria bagi para pembuat kebijakan. Alasan ekonomi menjadi telaah yang tepat untuk menjelaskan tindakan pemerintah tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan fakta-fakta yang mendukung asumsi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi daya tarik bagi investor di dalam maupun di luar negeri. Terbukti pada periode 2004-2008 kinerja perekonomian Indonesia tumbuh cukup baik rata-rata di atas 5% per tahun. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada 2007 dan 2008 berada pada kisaran di atas 6%. Meski tren menurun terlihat pada tahun 2008 yang merupakan dampak meluas dari krisis keuangan global.

Survei Bank Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama krisis keuangan global (2008-2009) yang bertahan di posisi 4-5% ditopang oleh bidang ekspor dan investasi. Jika melakukan komparasi dengan empat negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina maka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam posisi positif dibandingkan dengan keempat negara tersebut. Bahkan Singapura mengalami sentiment negatif pertumbuhan ekonomi mencapai 10%.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya ditopang oleh bidang investasi. Setelah ditelusuri lebih

lanjut terkait investasi tersebut hanya 22% yang merupakan investasi pemerintah, sedangkan 88% lainnya adalah investasi swasta. Hal ini menunjukkan bahwa pihak swasta termasuk investasi asing mendominasi bidang investasi di Indonesia. Asumsi tersebut diperkuat oleh data realisasi nilai dan proyek PMA/PMDN 2000-2008 yang menunjukkan perbedaan nilai yang signifikan antara investasi pemerintah dan asing. Selama periode tersebut proyek pemerintah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi setiap tahunnya berkisar antara 108-300 proyek dengan nilai investasi paling tinggi hanya mencapai 34 miliar rupiah. Sedangkan proyek asing tidak terlalu mengalami fluktuasi yang signifikan, setiap tahunnya proyek yang dilakukan berada pada kisaran di atas 400 proyek bahkan tahun 2008 realisasinya mencapai 1138 proyek dengan nilai investasi tertinggi 14.870 juta USD.

Ringkasan data di atas memperkuat alasan ekonomi pemerintah dan menunjukkan bahwa investasi asing/penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu faktor pendorong bagi pertumbuhan iklim investasi di Indonesia. Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing harusnya berkorelasi positif terhadap peningkatan perhatian pemerintah pada pihak-pihak yang berkepentingan atas penanaman investasi asing di Indonesia.

Menyadari pentingnya menjaga investasi maka pada tahun 2011 pemerintah meluncurkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Tujuan dari program ini yakni mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang

inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan.

Dokumen pemerintah tersebut juga mengakui bahwa pihak swasta memegang peran utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pihak swasta yang dimaksud sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya termasuk investor asing yang turut menyumbangkan proyek yang lebih besar pertahunnya daripada pemerintah.

Dalam dokumen tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan dari sisi sisi regulasi, seperti deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat positif dari pemerintah Indonesia sekaligus juga sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas kontribusi investasi asing yang membantu perekonomian Indonesia.

Salah satu bagian dari dokumen tersebut menjelaskan tentang perbaikan regulasi dan perizinan. Dikemukakan bahwa tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perizinan tersebut adalah sebagai berikut: (1) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang; (2) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga; (3) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI (seperti bea Keluar beberapa komoditi); (4) memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan

ekonomi utama yang sesuai dengan strategi MP3EI; dan (5) mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan.

Salah satu regulasi dan perizinan di tingkat nasional dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi utama yakni UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam dokumen tersebut memang yang disoroti hanya 5 pasal terkait kontrak kerja, *outsourcing*, dan pesangon. Namun demikian seiring dengan komitmen pemerintah dalam melakukan deregulasi maka perubahan-perubahan lainnya terkait bidang Ketenagakerjaan khususnya kemudahan terhadap tenaga kerja asing sangat dimungkinkan.

Proyek asing yang semakin besar di Indonesia tentunya berimplikasi terhadap semakin memperbesar jumlah pekerja asing/TKA di Indonesia. Fakta ini terlihat dari jumlah TKA yang semakin meningkat tahun demi tahun sejak 2005 pada grafik berikut.

Grafik 4.1 Perkembangan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (2005-2012)

Sumber: Diolah dari Data Kemenakertrans

Sejak 2005-2012 setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah TKA dengan komposisi jabatan yang berubah-ubah. Namun jumlahnya masih tetap bertambah dari tahun ke tahun. Seiring dengan besarnya jumlah TKA di Indonesia, maka sebagai negara tujuan kerja Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan TKA beserta anggota keluarganya di Indonesia.

Pemaparan di atas menggambarkan saling keterkaitan antara satu sama lain, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menarik minat investor asing, kemudian ekonomi Indonesia bertumbuh diikuti dengan masuknya TKA ke Indonesia dalam jumlah besar.

Hubungan ini menunjukkan interdependensi (saling ketergantungan) dan penggunaan logika ‘optimalisasi hasil’ sebagai landasan pembuatan kebijakan, dimana pemerintah Indonesia menginginkan ekonomi tetap bertumbuh bahkan mengharapkan pertumbuhan hingga 7-9% per tahun sehingga merancang MP3EI. Ternyata pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia tidak terlepas dari peran investasi asing, maka Indonesia mempunyai kepentingan untuk menjaga investasi asing tersebut. Dikarenakan bertambahnya jumlah TKA di Indonesia maka diperlukan perlindungan yang komprehensif dan berlaku secara universal agar menjaga investasi tetap bergerak. Oleh karena itu Konvensi ini diratifikasi sebagai upaya menjaga investasi asing di Indonesia melalui perlindungan tenaga kerja asing (TKA) yang merupakan penggerak investasi dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Alasan Politik

Secara konstitusional pemerintah memiliki tanggungjawab dalam rangka melindungi warga negaranya sekalipun berada di luar negeri. Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa jumlah TKI di luar negeri jumlahnya tidak dapat dipastikan, hal ini disebabkan kealpaan dari Kemlu RI terhadap pendataan WNI/TKI di luar negeri. Padahal 2,5 juta - 6,5 juta jiwa warga negara Indonesia mengadu nasib dengan bekerja di luar negeri. Besarnya jumlah TKI di luar negeri, sebagaimana konsekuensi logis dari besarnya jumlah TKA di Indonesia seharusnya menghadirkan juga sebuah upaya perlindungan yang menyeluruh. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka kesewenang-wenangan akan timbul dari negara tujuan kerja. Hal inilah yang sekarang dialami oleh TKI di luar negeri yang banyak mengalami permasalahan.

Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menunjukkan kasus yang menimpa TKI selama tahun 2010 sebanyak 60.399 kasus dan tahun 2011 sebanyak 44.573 kasus. Sedangkan data LSM *Migrant Care* mencatat sebanyak 5.314 kasus kekerasan yang dialami TKI di luar negeri selama kurun 2009-2010 dengan rincian Malaysia sebanyak 1.748 kasus, Arab Saudi 1.048 kasus, Yordania 1.004 kasus, Kuwait 84 kasus, Abu Dhabi 533 kasus, Taiwan 103 kasus, Hong Kong 78 kasus, dan Singapura 16 kasus.³

Apabila data di atas dipersentasekan dengan prakiraan jumlah TKI sebesar 2,5juta, maka persentasenya hanya sebesar 1,8-2,4%. Persentase tersebut sangat kecil dan tidak signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk Indonesia.

³ Antara Jatim, (2012), *Kapan Kekerasan TKI akan Berakhir?* - <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/87574/kapan-kekerasan-tki-akan-berakhir->

Namun demikian, tiap individu dari penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan tanggungjawab pemerintah, dan termaktub dalam hak asasi manusia. Pemerintah akan disalahkan ketika ia tidak memberikan perlindungan maksimal kepada warga negaranya.

Bahkan kesalahan terbesar pemerintah apabila ia tidak menjamin hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang kemudian dipertegas kembali dalam UUD 1945 (hasil amandemen kedua) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya dalam pasal 28 I ayat 4 menegaskan bahwa perlindungan (*protection*), pemajuan (*furtherance*), penegakan (*enforcement*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah.

Selain data di atas beberapa kasus permasalahan TKI di luar negeri menjadi sorotan hangat media. Beberapa di antaranya: Arsita asal Taliwang Sumbawa ia bekerja di Arab Saudi (2002), ia mengalami penganiayaan sehingga menyebabkan cacat pada dirinya serta tidak sadarkan diri selama empat bulan; Nirmala Bonat asal Kupang NTT ia bekerja di Malaysia (2004), ia disiksa, disetrika, bahkan disiram air panas, begitu juga yang dialami oleh Sumiati asal Dompu Nusa Tenggara Barat ia bekerja di Arab Saudi (2010), mulutnya digunting majikannya sehingga ia mengalami cacat. Belum lagi TKI yang diancam hukuman serta dalam proses persidangan dikarenakan melakukan tindakan kriminal yang

disebabkan perlakuan majikannya, maupun TKI yang terancam dideportasi karena dikirimkan melalui jalur ilegal.

Serangkaian permasalahan tersebut seringkali mengundang protes dari masyarakat maupun LSM. Aksi yang sering dilakukan hanya demonstrasi maupun aksi damai yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Usaha tersebut tidak berdampak signifikan terhadap permasalahan yang dihadapi TKI, justru permasalahan tersebut terus menerus berulang tanpa ada keseriusan pemerintah. TKI seakan-akan hanya menjadi komoditi ekspor bagi pemerintah yang mendatangkan keuntungan. Sehingga terlihat adanya ketimpangan perlakuan pemerintah terhadap TKI sendiri yang merupakan warga negaranya. Hal inilah yang mengundang reaksi dari berbagai kalangan untuk mendukung reformasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan bagi TKI di luar negeri.

Terkait kapasitas Rieke Diah Pitaloka sebagai Anggota Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan dari Fraksi PDI Perjuangan dan aktivis buruh migran, penulis melakukan wawancara dengan Rieke terkait posisi politik pemerintah Indonesia terhadap ratifikasi Konvensi ini.⁴

Rieke menyampaikan bahwa Indonesia sudah seharusnya meratifikasi Konvensi tersebut, karena Indonesia merupakan negara pengirim TKI yang cukup besar, meskipun tidak hanya Indonesia yang seharusnya meratifikasi tetapi juga negara tujuan kerja utama seperti Arab Saudi, Malaysia, maupun negara yang rawan permasalahan TKI dan pekerja migran asing lainnya di negara tujuan kerja.

“Sebenarnya kita sudah menandatangani, tapi itu zamannya bu Mega di 2004. Waktu itu alasannya karena sebagai negara pengirim TKI kita

⁴ Wawancara Penulis dengan Rieke Dyah Pitaloka pada 27 Agustus 2013 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

harus punya keberpihakan yang lebih jelas. Konvensi itu kan aturan yang berlaku internasional. Jadi sebagai bentuk kepedulian kita terhadap warga negara yang bekerja sebagai buruh migran, kita harus meratifikasi itu. Meskipun seharusnya bukan hanya diratifikasi sebagai negara pengirim, tetapi juga negara penerima. Tapi kan logikanya gimana negara penerima mau meratifikasi kalau negara pengirim saja tidak mau. Itu sebagai bentuk bahwa kita serius dalam memberikan perlindungan” (AZ 1, 1)

Rieke semakin mempertanyakan keseriusan pemerintah ketika ia tidak memberikan perlindungan terhadap proses migrasi dalam hal ini proses penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Kealpaan pemerintah dalam proses tersebut menyebabkan dugaan yang selama ini sudah menjadi ‘rahasia umum’ bahwa di tubuh pemerintah sendiri ada mafia TKI semakin membesar.

“Ketika pertanyaannya kok pemerintah lama banget? Ya itu memperlihatkan berkehendak serius atau tidak memberikan perlindungan terhadap migrasi secara menyeluruh. Karena ada indikasi kuat bahwa mafia TKI ada di tubuh pemerintah sendiri” (AZ 1,4)

Rieke menambahkan bahwa hal ini menjadi ironi ketika pihak non-pemerintah (oposisi) seperti PDI Perjuangan yang justru vokal menyuarakan ratifikasi Konvensi ini. Padahal seharusnya pemerintah yang bertanggungjawab penuh atas keselamatan warga negaranya dalam hal ini TKI di luar negeri. Kepedulian tersebut justru ditunjukkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri.

“Waktu saya ngobrol langsung dengan ibu mega. Beliau bilang, ini tidak bisa kita harus segera meratifikasi karena kondisinya sudah lebih parah dari 9 tahun yang lalu dengan pengiriman yang semakin tidak jelas. Aturan yang simpang siur. Sehingga memunculkan kasus-kasus yang bermuatan pelanggaran kemanusiaan tingkat tinggi” (AZ 4, 2)

Rieke menilai bahwa ada perbedaan pendapat terkait keterlibatan Indonesia pada Konvensi tersebut. Hal ini disebabkan pergantian pimpinan di tingkat eksekutif pasca ditandatanganinya Konvensi tersebut. Akibatnya Konvensi

ini didiamkan, padahal seharusnya apabila ada poin-poin yang dianggap tidak sesuai dapat ditelaah agar dapat ditindaklanjuti karena ada mekanisme dari Konvensi tersebut yang mengatur.

“Sebenarnya ada argumen pemerintah bahwa ada poin-poin yang dianggap tidak sesuai. Padahal dalam Konvensi tersebut dijelaskan bahwa apabila negara yang meratifikasi menganggap ada bagian yang mengganggu kepentingan nasional-nya maka pasal tersebut boleh dikecualikan. Tapi ternyata Indonesia tidak mengungkapkan pasal-pasal yang tidak disetujui” (AZ 1, 6)

Dikarenakan pemerintah tidak sepaham dengan usaha yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran, maka Rieke bersama segenap Kader PDI Perjuangan di DPR RI mensosialisasikan urgensi diratifikasi Konvensi tersebut secara masif.

“Sampai akhirnya untuk memperjuangkan ratifikasi, maka kita membangun desakan yang lumayan besar pada kementerian-kementerian terkait. Ketika sudah diratifikasi, buktinya semua menerima ratifikasinya. Kalau selama ini argumentasinya keberatan, yang mana keberatannya?” (AZ 1, 7)

Kemudian Rieke kembali mempertanyakan ketika itikad pemerintah untuk melindungi warga negaranya bukan alasan utama, lalu apakah sudut pandang yang digunakan hanya kepentingan ekonomi saja.

“Apabila keengganan (ketidakinginan-red) pemerintah ditinjau dari sisi politik justru semakin menunjukkan keengganan pemerintah sendiri untuk serius melindungi warganegaranya. Kita tidak tahu apakah ada alasan ekonomi didalamnya silahkan saja diterjemahkan sendiri” (AZ 4, 3)

Rieke menambahkan bahwa pandangan yang disampaikan dalam pembahasan merupakan komitmen keseriusan koalisi partai pemerintah untuk perlindungan pekerja migran.

“Dari pandangan mini fraksi sebenarnya bisa dilihat siapa yang lebih serius” (AZ 5, 1)

Rieke memaparkan sumber-sumber dukungan yang menyukseskan ratifikasi Konvensi ini. Salah satunya internal PDI Perjuangan sendiri, Rieke mengakui bahwa sejak ratifikasi ini menjadi sikap partai ditambah lagi dukungan secara moril dari Ketua Umum, maka ratifikasi Konvensi ini mutlak dilakukan.

“Setelah sekian lama tidak diratifikasi maka Fraksi PDI Perjuangan melalui hasil rekomendasi partai mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi. Akhirnya kita (Fraksi PDIP-red) bekerjasama dengan ekstra-parlemen untuk mendorong itu” (AZ 1, 3)

Atas dukungan dan rekomendasi dari partai maka seluruh kader PDI Perjuangan diminta untuk turut mendukung ratifikasi Konvensi ini. Hal ini sesuai dengan hubungan hirarki dari Partai ke Anggota yang bersangkutan. Tentunya rekomendasi dari partai selalu berpatok kepada kepentingan rakyat.

“Yang harus dipahami seharusnya bahwa anggota DPR tidak independen. Ia adalah perpanjangan tangan fraksi. Fraksi adalah kepanjangan tangan partai. Jadi apa yang kita dukung melalui Fraksi itu adalah hasil keputusan rapat partai Kongres maupun Rakernas. Jadi ratifikasi ini sudah berulang-ulang dimasukkan ke dalam rekomendasi rapat partai” (AZ 5, 2)

Di samping itu, sumber kekuatan lainnya berasal dari luar partai. Rieke memandang bahwa kerjasama dengan ekstra-parlemen turut menjadi penentu keputusan yang diambil oleh perwakilannya di Dewan.

“Dalam perkembangan politik kami yang sekarang ini, kita memang membangun istilahnya gotong royong, tidak hanya dalam Pilkada tetapi juga dalam kerja sebagai legislasi seperti ini. Kita kerjasama antara parlemen dengan ekstra parlemen, baik itu NGO/LSM atau masyarakat sipil biasa, itu yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita sampaikan inipun merupakan masukan berbagai pihak yang *concern* (peduli-red) terhadap persoalan ini termasuk perwakilan TKI-nya sendiri di negara yang kita lakukan komunikasi. Tidak bisa ketika dalam kondisi politik transaksional seperti ini lalu kemudian DPR dibiarkan sendiri. Kontrol publik dan *active citizenship* (warga negara yang pro-aktif) menjadi penentu keputusan apakah kita meratifikasi. Jadi bukan hanya sekedar kehendak politik dari pemerintah sendiri tapi ini benar-benar dorongan dari koalisi yang kita bangun (koalisi besar) antara masyarakat politik di parlemen dengan masyarakat sipil baik yang bergabung dengan NGO

maupun perorangan. Jadi bukan koalisi untuk kedudukan posisi politik tapi koalisi untuk substansi politik yang harus diperjuangkan dalam hal ini ratifikasi Konvensi PBB” (AZ 6, 1)

Ditanyai tentang dukungan ‘asing’ dalam ratifikasi Konvensi ini, Rieke tidak membantah bahwa organisasi internasional terkait bidang ketenagakerjaan berharap pemerintah Indonesia dapat segera meratifikasi Konvensi tersebut. Namun hal ini hanya terbatas pada kampanye-kampanye di berbagai media bersama LSM dalam negeri untuk menyadarkan publik negara tersebut untuk peduli terhadap isu ketenagakerjaan.

“Mereka kan (organisasi internasional-red) tidak bisa ikut campur politik dalam negeri. Tetapi mereka pengen. Tapi terbatas kali ya, paling dalam *campaign-campaign* (kampanye-red) dengan LSM” (AZ 9, 1)

Pasca ratifikasi Konvensi ini, Rieke memandang bahwa standarisasi pekerja migran mulai memasuki babak baru. Sehingga tahap operasionalisasi ratifikasi ini yakni menjadikannya sebagai rujukan bagi upaya perlindungan TKI di luar negeri.

“UU hasil ratifikasi harus diserap dan menjadi acuan seharusnya ketika kita serius juga menjadi acuan UU yang kita buat. Makanya diupayakan langkah berikutnya dari kita adalah revisi itu juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan Konvensi itu sendiri” (AZ 2, 1)

Bagi Rieke Konvensi ini juga meningkatkan posisi tawar Indonesia bagi negara tujuan kerja atas komitmen yang dimiliki pemerintah melalui ratifikasi Konvensi ini.

“Sebenarnya fungsinya juga kalau ke luar adalah untuk *standing position* (posisi tawar-red) kita, kalau ke dalam adalah untuk memperkuat perangkat hukum kita yang berpihak lebih melindungi warga negaranya yang berprofesi sebagai buruh migran. Harusnya sih prakteknya begitu! Tapi kan juga UUnya sekarang sedang di revisi” (AZ 3, 2)

Rieke menambahkan sebagaimana keinginan kita menjadikan Konvensi ini sebagai acuan dan proses internalisasinya ke dalam, maka perlu dilakukan penguatan perangkat hukum nasional. Karena Konvensi ini secara lengkap menjelaskan mekanisme perlindungan TKI secara menyeluruh.

“Di satu sisi Konvensi itu menjadi acuan bagi perangkat hukum kita untuk memuat aturan-aturan yang ada di Konvensi itu. Jadi di Konvensi itu berisi proses perlindungan dalam migrasi menyeluruh. Jadi mulai ketika dia (TKI-red) direkrut dari keluarganya hingga ia kembali ke keluarganya. Maka perlindungan itu akan jadi komprehensif. Konvensi ini kemudian menjadi dasar pertimbangan mengapa UU yang lama (UU No. 39/2004 tentang PPTKILN-red) harus di revisi. Kita mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan Konvensi itu sendiri. Seharusnya kita memberikan laporan berkala setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban (atas ratifikasi yang telah dilakukan-red)” (AZ 1, 2)

Bagi Rieke UU PPTKILN yang sekarang digunakan sangat berorientasi pada tata niaga, maka revisi yang dilakukan dinilai tepat dan harus segera direalisasikan.

“Dari UU saja (UU No. 39/2004-red) kenapa kami minta direvisi karena hampir seluruh pasalnya berorientasi pada tata niaga TKI bukan perlindungan. Hal ini juga menjadi perdebatan pada judul revisi UU tersebut. Saya mengusulkan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, ketika saya sibuk Pilgub Jabar judulnya jadi ada Penempatannya lagi. Padahal penempatan itu *part of* (bagian dari-red) perlindungan, jadi tidak boleh penempatan itu inti dari perlindungan. Perlindungan itu ada di penempatan/semua sektor. Hal ini dimaksudkan agar produk undang-undang di dalam negeripun tidak boleh bertentangan dengan Konvensi” (AZ 1, 5)

Rieke juga melihat Konvensi ini dapat menjadi ‘alat’ bagi Indonesia untuk mendesak negara tujuan kerja agar meratifikasi Konvensi tersebut sebagai bentuk Komitmen atas perlindungan TKI di negara tersebut.

“Walaupun di luar negeri itu yang berlaku adalah perangkat hukum negara terkait, tapi konvensi ini sebenarnya berlaku internasional dan pada dasarnya apabila pemerintah serius maka kita bisa melakukan konsolidasi dengan negara yang sudah meratifikasi untuk memberikan desakan kepada negara tujuan kerja agar menjadi negara pihak atas konvensi ini” (AZ 5, 3)

Serangkaian pandangan dari Rieke Diah Pitaloka merupakan gambaran umum terkait proses ratifikasi Konvensi yang sebenarnya penuh dengan tarik ulur kepentingan. Hal yang perlu dipastikan adalah apakah yang didahulukan adalah kepentingan publik/masyarakat luas, ataukah hanya kepentingan kelompok tertentu yang mengambil keuntungan atas peristiwa yang terjadi.

Dalam kegiatan salah satu organisasi buruh, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengungkapkan sejumlah alasan pemerintah yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan meratifikasi Konvensi ini. Menurutnya ada tiga alasan mendasar.⁵

Pertama, mempertegas komitmen Indonesia bagi peningkatan perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak asasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

Kedua, memperkuat landasan hukum bagi kebijakan nasional dalam meningkatkan sistem perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak asasi tenaga kerja migran dan anggota keluarganya.

Ketiga, memperkuat mekanisme perlindungan tenaga kerja migran dan penataan manajemen migrasi, baik bilateral maupun multilateral, agar pekerja migran Indonesia dapat menikmati perlindungan dan haknya dengan lebih baik, mulai dari tahap pra penempatan, selama penempatan di luar negeri maupun pasca penempatan.

Di sisi lain, ratifikasi konvensi ini tentunya akan melahirkan sebuah kewajiban, antara lain untuk melakukan upaya harmonisasi hukum nasional,

⁵ Okezone, (2012), *Alasan Pemerintah Ratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran* - <http://economy.okezone.com/read/2012/08/06/320/674027/redirect>

terutama yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia dan keluarganya, agar sesuai dengan standar hak asasi pekerja migran sebagaimana diatur dalam Konvensi.

"Isi Konvensi ini akan menjadi acuan untuk menciptakan dan merevisi berbagai peraturan perundangundangan yang menyangkut tenaga kerja Indonesia"

Pada tingkat nasional, Indonesia telah memiliki peraturan perundangundangan yang cukup lengkap dan komprehensif. Meskipun tentunya masih terdapat ruang untuk terus memperbaikinya.

"Saat ini Revisi mengenai Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri sedang dilakukan pembahasan di DPR, sebagai upaya harmonisasi setelah pengesahan Konvensi ini. Jika tidak ada kendala yang berarti, akhir tahun ini akan ditetapkan Revisi atas UU 39 tahun 2004 tersebut"

Muhaimin mengatakan, keputusan untuk meratifikasi Konvensi ini merupakan bagian dari perwujudan tanggung jawab negara untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja migran Indonesia. Kandungan Konvensi ini selaras dengan komitmen nasional Indonesia bagi pemajuan dan perlindungan HAM.

"Hal tersebut yang mendasari pemerintah untuk meratifikasi Konvensi dengan dimaksud guna menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Pengesahan Konvensi ini merupakan langkah terobosan di tingkat global untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran dan keluarganya"

Muhaimin mengakui bahwa konvensi ini merupakan satu-satunya instrumen HAM internasional yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya secara komprehensif.

"Konvensi ini pula memberikan kerangka perlindungan minimum bagi tenaga kerja migran dalam berbagai kategori beserta keluarganya, untuk

semua tahapan, baik pada saat pra keberangkatan, masa bekerja di luar negeri dan purna penempatan”

Muhaimin menambahkan bahwa di masa mendatang Konvensi Pekerja Migran ini di tatanan masyarakat internasional akan terus menguat dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya Konvensi ini bagi perlindungan tenaga kerja migran dan anggota keluarganya, seiring dengan besarnya jumlah orang bekerja di luar negeri.

Selanjutnya beberapa pernyataan secara umum saat pembahasan ratifikasi Konvensi akan semakin menunjukkan komitmen politik pemerintah secara komprehensif dari sudut pandang eksekutif, maupun legislatif disertai tanggapan singkat dari penulis.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang mewakili Presiden RI menyampaikan keterangan pemerintah senada dengan yang diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang juga turut hadir saat rapat dengar pendapat Konvensi tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa ratifikasi Konvensi ini merefleksikan komitmen pemerintah atas pemajuan HAM termasuk hak-hak pekerja migran. Sehingga Indonesia bertekad untuk meratifikasi Konvensi dimaksud guna menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga ingin mendorong negara-negara lain khususnya negara tujuan pekerja migran melalui kampanye global agar meratifikasi dan menerapkan norma dan standar yang diatur dalam konvensi ini.

Alasan tersebut dapat dipakai bilamana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meratifikasi Konvensi

tersebut tidak berselang lama setelah Konvensi tersebut ditandatangani. Pernyataan di atas menjadi ironi ketika menempatkan kemanusiaan sebagai alasan utama bagi ratifikasi Konvensi ini, atau mungkin alasan tersebut hanya sebagai legitimasi semata atas kealpaan pemerintah selama ini dalam melindungi TKI di luar negeri. Waktu selama 8 tahun yang dibutuhkan untuk meratifikasi Konvensi ini merupakan waktu tunggu yang lama dan tidak rasional, apabila dilihat dari alasan yang diungkapkan. Justru alasan lainnya akan semakin kuat mengingatkan pemerintah cenderung melihat peluang lalu mengaitkannya dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pernyataan yang telah disampaikan oleh Rieke bahwa argumentasi keberatan yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini termasuk partai koalisi pemerintah tidak beralasan. Karena pada saat pembahasan ratifikasi seluruh fraksi koalisi pemerintah menyatakan setuju dengan ratifikasi Konvensi ini dan tidak ada penolakan. Berikut kutipan pernyataan fraksi saat pembahasan ratifikasi tersebut.⁶

Fraksi Partai Demokrat dalam pernyataannya secara tersirat mengungkapkan bahwa Konvensi ini dapat menjadi alat tawar politik dengan negara lain terkait perlindungan yang diberikan kepada TKI di negara tujuan kerja. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Fraksi ini melihat manfaat yang dapat diambil Indonesia dari aspek politik luar negeri.

“Mengenai pendekatan multilateral sebagai pelengkap pendekatan bilateral, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa konvensi pekerja migran merupakan mekanisme multilateral yang memungkinkan dorongan terhadap negara tujuan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012, *Risalah Rapat Kerja Komisi IX pada Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*, hh. 1-51.

pekerja migran. Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan multilateral terbukti dapat meretas kebuntuan bilateral”

Fraksi Partai Golkar dalam pernyataannya memandang bahwa dengan diratifikasinya Konvensi ini maka posisi tawar Indonesia akan meningkat. Ungkapan ini menunjukkan optimisme fraksi atas tindak lanjut pasca ratifikasi dan juga merupakan bentuk dukungan bagi pemerintah.

“Alasan utama Pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi selama ini lebih disebabkan karena adanya sejumlah kewajiban yang muncul sebagai konsekuensi jika Indonesia meratifikasinya. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap berbagai peraturan terkait dengan hak-hak pekerja migran yang tercakup dalam ICMW dan ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar, namun perlu pula dicatat apabila Indonesia mampu meratifikasi konvensi tersebut, maka Indonesia dapat menaikkan posisi tawar mengangkat masalah TKI di dunia Internasional yang dapat menggunakan berbagai mediasi dalam mekanisme pengaduan”

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pernyataannya mendukung Konvensi ini. Hal ini juga didasarkan pada basis massa PDI Perjuangan yang berasal dari masyarakat akar rumput (*grassroot*) yang banyak berasal dari golongan buruh migran/TKI di luar negeri. Fraksi ini menyadari bahwa beberapa fungsi dari Konvensi tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan hak-hak TKI di luar negeri. Maka keputusan meratifikasi Konvensi ini sangat tepat.

“Fungsi Konvensi PBB Tahun 1990. Memberikan jaminan perlindungan berada dalam kerangka hukum Internasional, yakni fungsi pencegahan, penanggulangan dan penyelesaian sengketa hukum antar negara yang terkait. Konvensi ini merupakan konvensi yang relatif paling lengkap menyerap berbagai prinsip dari aturan HAM Internasional, seperti hak Sipil, hak ekonomi sosial budaya, anti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan konvensi hak anak”

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa Konvensi ini dapat memperkuat posisi Indonesia untuk mendesak negara tujuan pekerja migran.

Ungkapan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan atau landasan bagi upaya perlindungan menyeluruh TKI di luar negeri.

“[Fraksi ini berkeyakinan bahwa Konvensi ini dapat] memperkuat peran diplomasi Indonesia untuk mendesak negara-negara tujuan pekerja migran dari Indonesia untuk juga meratifikasi konvensi ini”

Fraksi Partai Amanat Nasional memiliki pandangan bahwa Konvensi ini mampu untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di pergaulan internasional. Ungkapan ini merupakan harapan yang disampaikan terkait manfaat politik yang didapatkan oleh Indonesia.

“Ratifikasi Konvensi buruh migran ini sangat penting untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di komunitas internasional. Sehingga penyelesaian kasus yang menyangkut pekerja migran Indonesia di luar negeri berpotensi mendapat kemudahan. Selama ini, negara tujuan pekerja migran sering menjadikan alasan belumnya Indonesia meratifikasi konvensi itu sehingga negara-negara yang bersangkutan tidak wajib melindungi pekerja migran Indonesia”

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan merespon positif diratifikasinya Konvensi ini. Fraksi ini melihat konvensi ini pada manfaat praktis yang didapatkan Indonesia yakni dapat melakukan lobi internasional. Ungkapan ini memaparkan manfaat politik yang diperoleh Indonesia secara langsung/praktis.

“Dalam konteks praktis, konvensi ini memberikan panduan bagaimana struktur organisasi pemerintah harus melindungi pekerja migran, mulai dari pra pemberangkatan sampai kepada purna bekerja, serta kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan dari konvensi ini dapat dijadikan alat untuk menekan perubahan domestik di negara yang meratifikasi konvensi dan untuk melobi dunia internasional untuk menegakkan standar HAM bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya”

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menempatkan Konvensi ini sebagai kebutuhan negara yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa ratifikasi Konvensi bagi fraksi ini merupakan sesuatu yang urgen dan patut mendapatkan

dukungan berbagai pihak. Ungkapan ini merupakan bentuk dukungan dari PKB terhadap langkah-langkah pemerintah yang akhirnya meratifikasi Konvensi ini.

“Dalam memperkuat ketentuan perundang-undangan nasional, secara bilateral, regional dan global demi untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, maka diperlukan norma-norma hak asasi manusia yang bersifat universal sehingga menyusun sebuah rancangan undang-undang sebagai landasan ratifikasi Indonesia terhadap konvensi pekerja migran internasional menjadi kebutuhan negara yang sangat mendesak”

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya memandang bahwa ratifikasi Konvensi ini dapat meningkatkan posisi tawar diplomasi pemerintah untuk menuntut perlindungan maksimal bagi negara penerima pekerja migran. Ungkapan ini menunjukkan sikap Fraksi yang memandang Konvensi ini memberikan manfaat bagi Indonesia salah satunya manfaat politik luar negeri.

“[Fraksi ini melihat bahwa Konvensi ini dapat] meningkatkan posisi tawar diplomasi pemerintah untuk menuntut perlindungan maksimal kepada negara penerima pekerja migran”

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menilai bahwa negara penerima/tujuan kerja pekerja migran diharapkan akan memberikan perlindungan maksimal seiring meningkatnya posisi tawar diplomasi Indonesia. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa secara politik, Indonesia harus menggunakan Konvensi ini sebagai alat tawar politik.

“[Fraksi ini memandang bahwa Konvensi ini dapat] meningkatkan posisi tawar diplomasi pemerintah untuk menuntut perlindungan maksimal kepada negara penerima pekerja migran”

Pernyataan dari 9 fraksi di atas menunjukkan euforia atas Konvensi yang akhirnya diratifikasi. Bahkan 7 dari 9 fraksi menilai bahwa Indonesia dapat memanfaatkan pendekatan politik luar negeri untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia. Hal tersebut diungkapkan dengan berbagai pendapat yang diajukan.

Sedangkan 2 partai lainnya yakni PDI Perjuangan dan PKB menyikapi Konvensi ini lebih dititikberatkan pada konteks kemanusiaan. Sebagaimana diketahui bahwa sikap politik PDI Perjuangan yang juga memperjuangkan Konvensi ini agar diratifikasi tentunya memiliki ikatan psikologis yang tinggi dengan ratifikasi Konvensi ini. Sedangkan PKB dalam pernyataannya tidak menyinggung alasan politik seperti yang diungkapkan fraksi lainnya, justru menganggap Konvensi ini sebagai sesuatu yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya PKB di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan.

Berdasarkan paparan di atas, seperti pernyataan keberatan yang diajukan oleh pemerintah semakin tidak beralasan. Pernyataan yang diungkapkan di atas justru mendukung langkah pemerintah agar meratifikasi Konvensi tersebut. Maka alasan politik dalam hal ini semakin kuat, karena mayoritas fraksi secara implisit menyatakan bahwa dengan diratifikasinya Konvensi ini Indonesia memperlihatkan kepedulian terhadap nasib pekerja migran dengan meningkatkan posisi tawar terhadap negara tujuan kerja untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Seperti telah disebutkan dalam wawancara dengan Rieke bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil turut menyukseskan ratifikasi Konvensi ini. Maka berikut pernyataan LSM yang diwakili oleh LSM Migrant Care dan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan).

LSM Migrant Care mencatat bahwa sejarah kebijakan migrasi tenaga kerja di Indonesia menunjukkan bahwa eksploitasi, diskriminasi, stigmatisasi,

indoktrinasi dan kriminalisasi yang dihadapi dan dialami oleh buruh migran Indonesia saat ini tak lepas dari sejarah panjang produksi/reproduksi kebijakan migrasi tenaga kerja yang dibuat (tepatnya disediakan) oleh negara kepada institusi bisnis yang menikmati keuntungan dari pengerahan dan perekrutan buruh migran Indonesia.

Namun setelah Konvensi perlindungan hak pekerja migran diratifikasi sesungguhnya merupakan awal baru untuk menata kembali kebijakan mengenai buruh migran yang berbasis HAM melalui harmonisasi kembali kebijakan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi buruh migran. Langkah ini harus ditindaklanjuti dengan melakukan dorongan lebih kuat kepada pemerintah untuk segera mengimplementasikan ratifikasi Konvensi tersebut, salah satunya melalui revisi UU No. 39/2004

Bagi LSM Migrant Care inisiatif legislasi ini patut diapresiasi karena memang telah menjadi agenda advokasi dari kalangan masyarakat sipil sejak tema buruh migrant menjadi salah satu fokus advokasi gerakan masyarakat sipil di awal dekade 1990-an.⁷

Sejalan dengan keinginan dari LSM Migrant Care, Komnas Perempuan yang lebih spesifik berbicara tentang hak-hak perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa TKI di luar negeri juga didominasi oleh perempuan. Komnas Perempuan pasca penandatanganan Konvensi ini merilis publikasi tentang alasan utama pentingnya meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran⁸, antara lain:

⁷ Migrant Care, (2012), Wujudkan Payung Hukum bagi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya! - Selebaran Informasi

⁸ Komnas Perempuan, (2006), *Pentingnya Meratifikasi Konvensi Migran 1990* - <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/08/Lembar-Info-1.pdf>

Pertama, dari sisi substansi: (1) Konvensi ini memandang pekerja migran tidak hanya sebagai buruh atau entitas ekonomi semata tetapi juga sebagai makhluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia secara utuh, (2) definisi dan kategori yang terdapat dalam Konvensi ini menyediakan salah satu departemen pemerintah yang menetapkan standarisasi perlakuan internasional melalui elaborasi pekerja migran dan anggota keluarganya, (3) dasar-dasar mengenai HAM diterapkan pada seluruh kategori buruh migran baik yang bekerja secara legal maupun yang berada dalam situasi tidak reguler, (4) konvensi ini memiliki peran untuk mencegah dan membatasi eksploitasi pekerja migran dan anggota keluarga mereka dan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan ilegal yang akhirnya masuk pada perdagangan manusia, (5) konvensi ini berupaya untuk menciptakan standar minimum bagi perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya yang bersifat universal dan diketahui oleh masyarakat internasional. Konvensi ini juga digunakan sebagai alat untuk mendorong bagi negara-negara yang belum memiliki standar mengenai hal ini agar dapat melaksanakannya.

Kedua, dari sisi mekanisme: (1) konvensi internasional yang sudah diratifikasi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi karena konvensi mengatur kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional, (2) konvensi ini akan menjadi acuan bagi perbaikan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pekerja migran dengan melakukan standarisasi terhadap HAM internasional yang terdapat dalam Konvensi, dan (3) pemerintah Indonesia akan

memiliki posisi tawar yang kuat untuk bekerja sama dengan pemerintah negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia dengan standar HAM Internasional.

Pandangan yang sama terhadap upaya ratifikasi Konvensi ini yakni dalam kerangka Hak Asasi Manusia tentunya semakin memperkuat desakan LSM kepada pemerintah untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Sehingga tidak mengherankan perjuangan bertahun-tahun LSM dalam mendorong pemerintah sebagai ekstra-parlemen sebagaimana diungkapkan Rieke dapat terwujud.

Walaupun organisasi internasional seperti ILO tidak bisa ikut campur politik dalam negeri sebagaimana diungkapkan Rieke. Tetapi dalam laporannya ILO Country Office Jakarta justru mengklaim ikut berkontribusi terhadap perlindungan TKI yang tercantum dalam capaian penting ILO.

Publikasi dari ILO (2013) tentang 10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia menyangkut capaian penting ILO dalam komitmen politik dan perubahan kebijakan menunjukkan kontribusi nyata ILO melalui bantuan teknis terhadap pemerintah maupun LSM di bidang perburuhan. Berikut pencapaian yang telah dilakukan oleh ILO.

ILO memahami bahwa kesenjangan dalam peraturan perundangan dan kebijakan hukum terkait perlindungan pekerja migran di negara asal maupun negara tujuan mengakibatkan penempatan tenaga kerja yang eksploitatif dan perlindungan yang kurang memadai. Sehingga ILO menyediakan bantuan bagi para mitra dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah untuk mengkaji dan merevisi kebijakan dan kerangka hukum yang ada serta mengembangkan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan dan imigrasi.

Di tingkat ASEAN, partisipasi Indonesia dalam penyusunan dan finalisasi Deklarasi ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran tahun 2007 –yang merupakan instrumen pengikat untuk perlindungan pekerja migran– memperlihatkan adanya komitmen pemerintah terhadap persoalan ini di tingkat regional. Sejak Deklarasi ini ditetapkan, para menteri tenaga kerja ASEAN telah melembagakan rapat tahunan yang disebut Forum ASEAN tentang Pekerja Migran. Forum ke-4 telah diselenggarakan pada tahun 2011 di Bali, Indonesia. Forum ini menyediakan sarana terbuka untuk diskusi dan bertukar pendapat serta ide di kalangan pemangku kepentingan terkait di negara-negara anggota ASEAN tentang masalah migrasi kerja.

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia yang baru terpilih mengakui bahwa masih ada ruang untuk melakukan perbaikan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk itu, ILO telah mendukung pemerintah memastikan bahwa masalah pekerja migran tetap dijadikan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 serta Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pemerintah telah berupaya memperkuat kerangka kebijakan tentang penempatan dan perlindungan TKI, termasuk melalui amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

ILO menyediakan masukan teknis dan mendukung berbagai kampanye publik serta berbagai rapat pemangku kepentingan yang menghasilkan persetujuan Presiden untuk merevisi UU No. 39 Tahun 2004. Persetujuan ini menandakan awal dari diskusi parlemen secara resmi tentang usulan revisi UU antara

pemerintah dengan parlemen, di mana organisasi-organisasi pemangku kepentingan terkait diundang untuk memberikan kontribusi mereka (Mandat Presiden untuk merevisi UU No. 39/2004 ditandatangani pada 8 Agustus 2012). Revisi UU ini kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional untuk tahun 2012.

Komitmen ILO penting untuk mendorong Pemerintah Indonesia mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan rencana yang mendukung pekerja migran. Sejak awal kegiatan ILO Jakarta terkait masalah migrasi pekerja, ILO telah mendukung dan mendorong pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (1990) melalui berbagai kampanye dan rapat pemangku kepentingan, yang berujung pada ratifikasi yang dilakukan pemerintah pada bulan Mei 2012.

Sebagai badan PBB yang memiliki spesialisasi di bidang ketenagakerjaan, ILO memiliki pengalaman luas dalam menetapkan standar-standar internasional dan mempromosikan pekerjaan layak dan kondisi kerja yang adil untuk semua. Selama bertahun-tahun, ILO di Indonesia telah menjalin kerjasama erat dengan para mitranya dalam meningkatkan kondisi TKI sesuai standar internasional.

Selama 10 tahun menangani persoalan migrasi kerja di Indonesia dan negara-negara tujuan, ILO dan para mitranya telah membantu meningkatkan komitmen politik dan perubahan kebijakan terkait persoalan ini di Indonesia. Sepuluh tahun lalu, UU ketenagakerjaan Indonesia tidak mencakup pekerja migran. Namun, perkembangan kebijakan saat ini mencerminkan kepentingan nasional dalam memperkuat sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran.

Standar-standar ketenagakerjaan internasional tentang pekerja migran telah dikembangkan, dengan meningkatkan keterkaitan antara standar internasional dan kebijakan nasional dengan peraturan dan kebijakan daerah. Advokasi kegiatan dan bantuan teknis telah disediakan oleh para pemangku kepentingan utama di negara asal dan negara tujuan, dan ILO telah bekerja sama dengan para mitra kelembagaan dalam memperkuat kerangka hukum tentang perlindungan pekerja migran, termasuk PRT, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kegiatan ILO terkait migrasi kerja di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi hak-hak pekerja, HAM, masalah gender dan kesehatan dalam menyusun kebijakan nasional tentang pekerja migran menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat migrasi kerja, baik dari perspektif perekonomian nasional maupun pekerja migran itu sendiri.⁹

Berdasarkan pernyataan yang dikutip dari publikasi ILO menunjukkan bahwa organisasi internasional ini selalu memastikan bahwa pemerintah Indonesia masih di jalur yang benar dalam penerapan dan perencanaan kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan khususnya pekerja migran. Hal ini semakin menunjukkan signifikansi ‘desakan’ yang diberikan oleh organisasi internasional ini melalui pendekatan bantuan teknis agar pemerintah berkomitmen atas pekerja migran.

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian ini, bahwa pada dasarnya pemerintah itikad politik menjadi salah satu prasyarat bagi keberhasilan proses legislasi suatu aturan tidak terkecuali ratifikasi Konvensi. Salah satu penyebab lambatnya proses birokrasi yakni 8 tahun (2004-2012) cukup memberikan

⁹ International Labour Organization, (2013), *Laporan ILO: 10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia* - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf, h.11-15.

pembenaran bahwa itikad politik para pembuat kebijakan masih kurang atas ratifikasi Konvensi ini.

Maka dari itu dorongan yang diinisiasi oleh salah satu anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka seperti yang telah dipaparkan di atas sangat diperlukan. Demikian juga dengan usahanya berkomunikasi dengan kementerian-kementerian untuk memberikan pemahaman agar menerima Konvensi ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Tidak dapat juga dilupakan peran dari LSM dan organisasi internasional turut mendukung suksesi ratifikasi Konvensi.

Atas dorongan dari berbagai pihak maka pemerintah akhirnya membulatkan tekad untuk melakukan ratifikasi pada tahun 2012. Walau demikian keputusan politik ini diambil atas dasar momentum yang tepat bagi pemerintah. Karena sesuai dengan teori aktor rasional maka diasumsikan bahwa pemerintah sedang mencari momentum yang tepat untuk meratifikasi Konvensi ini serta mempertimbangkan untung-rugi pemerintah ketika memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ini. Bahkan untuk menandatangani Konvensi ini pada tahun 2004 pemerintah harus memiliki pegangan politik yang kuat karena pengikatan diri Indonesia terhadap suatu perjanjian internasional memiliki konsekuensi yang luas. Berikut dipaparkan pilihan politik pemerintah Indonesia yang melatarbelakangi ratifikasi Konvensi ini sebagai berikut.

Tabel 4.2 Rasionalitas Politik Pemerintah Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Keuntungan	Kerugian
Meningkatnya investasi asing atas komitmen pemerintah dalam perlindungan pekerja migran di wilayah yurisdiksinya	Indonesia terus didesak oleh negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap pekerja migran di wilayahnya.

Apresiasi dari dalam dan luar negeri termasuk masyarakat Indonesia secara luas, LSM, dan organisasi internasional serta negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini	Masyarakat sipil (<i>civil society</i>) Indonesia dan organisasi internasional terus menuntut hadirnya instrumen perlindungan hak pekerja migran di Indonesia. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang timbul akibat kurangnya perhatian negara terhadap TKI di luar negeri.
	Indonesia dibebani oleh desakan dari negara-negara peratifikasi untuk segera melakukan ratifikasi sebagai perwujudan komitmen

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dapat berakibat pada Indonesia apabila menunda ratifikasi lebih lama lagi cukup banyak dan vital. Walaupun juga dari sisi keuntungan pemerintah tidak terlalu banyak mendapatkan untung dari ratifikasi Konvensi tersebut. Maka berdasarkan kriteria ‘optimalisasi hasil’ yang merupakan argumentasi dari teori aktor rasional, maka apabila Indonesia diperhadapkan pada suatu pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain, dimana pilihan tersebut harus optimal dan yang paling menguntungkan bagi pihak Indonesia. Berdasarkan asumsi ini, maka ratifikasi Konvensi ini merupakan sarana untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia terhadap negara-negara tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri. Di samping itu, apresiasi dari LSM maupun organisasi internasional menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang peduli terhadap pekerja migran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

C. Konsekuensi Pemerintah terhadap TKA atas Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Maka dari itu pemerintah kedepannya harus siap menerima konsekuensi atas keputusan yang telah diambil berdasarkan asas hukum *lex loci delicti*. Asas ini menerangkan bahwa hukum yang dikenakan terhadap orang asing yang berada di luar batas yurisdiksi negaranya akan mengacu pada aturan yang berlaku di negara tempat terjadinya peristiwa (*the law of the place in which a delict is committed*¹⁰).

Oleh karena itu, implementasi atas pengesahan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran akan memberikan tanggungjawab kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang berada di wilayah yurisdiksinya. Berikut pandangan yang berkaitan dengan konsekuensi yang dipikul oleh pemerintah terhadap TKA di Indonesia atas implementasi Konvensi tersebut.

Rieke Diah Pitaloka masih dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis menyatakan bahwa ratifikasi Konvensi ini memiliki konsekuensi terhadap dua pihak yakni TKI di luar negeri dan TKA di Indonesia. Namun hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dan sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melindungi keduanya dalam rangka pemenuhan HAM.¹¹

¹⁰ Oxford Index, *Lex Loci Delicti Commissi* - <http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100103416>

¹¹ Wawancara Penulis dengan Rieke Dyah Pitaloka pada 27 Agustus 2013 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

“Itulah dualismenya di situ. Konsekuensi yang dihadapi yakni di satu sisi membuka kran pasar bebas melalui kesepakatan pemerintah terintegrasi dalam ASEAN Community, di sisi lain kenapa ketika berbicara tentang investasi tentang modal mereka (pemerintah-red) tidak menyinggung kekhawatiran. Maksudnya toh juga tidak diatur serius sama pemerintah kita. Kenapa giliran ini persoalan proteksi, kok bicaranya soal kepentingan asing? Kenapa itu soal keuntungan modal/kapital tidak alergi. Tapi bicara soal proteksi. Lebih banyak orang kita di luar negeri, dibandingkan orang asing yang bekerja di sini (Indonesia-red). Dan walaupun ada kekhawatiran properti. Kita tidak boleh diskriminatif dengan warga negara asing, demikian juga warga negara kita tidak diperlakukan diskriminatif di negara orang. Ini lebih kepada proteksi hak dasarnya sebagai manusia” (AZ 11, 1)

Dalam pembahasan Konvensi beberapa fraksi sempat menyinggung perihal konsekuensi pemerintah yang salah satunya yang tanggungjawab yang diberikan terhadap pekerja migran asing di Indonesia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera justru meminta pemerintah memanfaatkan Konvensi ini sebagai ‘alat’ untuk mengawasi pergerakan TKA di Indonesia.

“[Fraksi ini] meminta kepada Pemerintah menyiapkan perangkat yang lebih baik dalam mengawasi tenaga kerja asing yang ada di Indonesia”

Fraksi PKS juga mengisyaratkan tanggungjawab pemerintah terhadap pekerja migran asing dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia.

“Perlindungan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum internasional yang tidak hanya diberikan kepada pekerja migran dalam yurisdiksi Indonesia tetapi juga pekerja migran Indonesia di luar negeri”

Fraksi Partai Gerindra menanggapi bahwa diskriminasi justru dialami oleh pekerja lokal dibandingkan TKA di Indonesia.

“[Fraksi ini mengharapkan peran pemerintah dalam] menjamin kesetaraan antara pekerja lokal dan pekerja migran bukan sebaliknya, untuk konteks Indonesia diskriminasi justru dialami buruh lokal yang mengalami kesenjangan upah dan hak-hak lain dengan pekerja asing”

Di luar pernyataan fraksi, salah satu anggota fraksi PKS Ansyori Siregar dalam interupsinya dalam pembahasan ratifikasi tersebut menyampaikan

kekhawatirannya terkait konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah pasca pengesahan UU hasil ratifikasi.

“Memang segala sesuatu yang baik itu pasti kita dukung semua, cuma kita menginginkan kepada Pemerintah, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Menlu untuk mengantisipasi jangan sampai nanti dengan Undang-Undang ini banjir tenaga asing, pengangguran bertambah. Ini sekedar antisipasi saja, kita sudah setuju semua sudah kita lihat, yang intinya sekedar kita dan antisipasi-antisipasi yang lainnya, dengan adanya ratifikasi ini. Ya mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita musyawarahkan disini untuk bangsa dan negara kita”

Apabila melihat pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi pemerintah atas TKA di Indonesia telah disadari oleh pemerintah dan legislatif pada saat pembahasan ratifikasi Konvensi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan langsung Rieke yang meletakkan Konvensi ini pada dualisme yakni tanggungjawab atas TKI di luar negeri dan TKA di Indonesia. Sehingga klausul-klausul yang menjadi hak TKA di Indonesia harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai wujud tanggungjawab atas keputusan yang telah diambil.

Maka klausul-klausul dalam Konvensi yang telah disimpulkan dalam ringkasan Konvensi seperti besarnya tanggungjawab Negara-negara pihak untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran harus dijalankan dengan baik. Tanggungjawab tersebut termaktub pada bagian III, IV, V, dan VI yang ekuivalen dengan 61 dari 93 pasal. Apabila dipersentasekan maka 65% isi dari Konvensi ini menitikberatkan kewajiban Negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan perlindungan menyeluruh atas hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya di wilayah hukumnya.

Secara umum hak-hak dasar yang dimiliki oleh seluruh pekerja migran baik yang dalam kondisi reguler maupun tidak reguler sebagaimana definisinya

telah dijelaskan dalam ringkasan Konvensi antara lain sebagai berikut: hak hidup yang harus dilindungi oleh hukum (pasal 9); pelarangan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (pasal 10); pelarangan diperbudak, atau diperhamba melakukan kerja paksa (pasal 11); hak atas kebebasan berfikir, berpendapat dan beragama (pasal 12); hak untuk mengungkapkan pendapat tanpa campur tangan (pasal 13); hak untuk tidak dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang (pasal 15); hak mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, mendapat perlindungan yang efektif dari negara terhadap tindak kekerasan dan tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang (pasal 16); hak mendapatkan bantuan hukum ketika diadili (pasal 18 ayat 3d); hak untuk tidak disita atau dihancurkan dokumen identitas, atau dokumen izin masuk atau izin tinggal atau izin kerja. (pasal 21); hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan konsuler dari negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan negara tersebut (pasal 23); hak untuk diakui di depan hukum (pasal 24); hak mendapatkan perlakuan sama dengan negara tujuan bekerja (pasal 25 ayat 1); hak untuk berserikat dan berkumpul dalam serikat pekerja (pasal 26); hak mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan negara tujuan bekerja (pasal 27 ayat 1); hak mendapatkan perawatan kesehatan (pasal 28); kewajiban negara pihak untuk menjamin penghormatan pada identitas budaya para pekerja migran (pasal 31); hak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan pekerja migran, serta ketentuan hukum yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan (pasal 32); hak untuk diberitahu Negara asal, Negara tujuan kerja, atau Negara transit mengenai: (a)

hak-hak mereka yang ditimbulkan oleh Konvensi ini; (b) ketentuan mengenai penerimaan, hak-hak dan kewajiban mereka menurut hukum dan praktik di Negara yang bersangkutan serta hal lain yang serupa yang memungkinkan mereka untuk menaati ketentuan administratif dan ketentuan lain di Negara tersebut (pasal 33 ayat 1), serta informasi tersebut wajib diberikan secara cuma-cuma, dan sejauh mungkin dalam bahasa yang mereka pahami (pasal 33 ayat 3).

Kedepannya Indonesia sudah harus memikirkan persaingan yang semakin ketat, kompetitif, dan terbuka dalam rangka menghadapi pasar tenaga kerja kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia Pasifik, bahkan kawasan global. Pada 2015 mendatang pasar tenaga kerja ASEAN melalui *ASEAN Economic Community* (AEC) akan semakin mempertipis batas-batas wilayah sehingga pekerja migran dari berbagai negara anggota ASEAN dapat mencari kerja dimanapun ia bersyarat. Sedangkan pada 2020 perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) akan semakin membuka kran pasar bebas tenaga kerja dimana pemerintah tidak dapat lagi memproteksi pasar domestiknya.

Maka langkah yang seharusnya diambil pemerintah yakni mendorong pasar tenaga kerja produktif untuk meningkatkan kapasitas guna mempersiapkan diri menghadapi pasar tenaga kerja bebas dalam waktu dekat yakni 2015 dan 2020. Karena itu langkah-langkah yang diambil pemerintah pasca ratifikasi Konvensi ini sangat menentukan nasib pasar tenaga kerja Indonesia di masa yang akan datang.

D. Perbandingan Sikap Negara Pihak Lainnya Merespon Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

Seperti yang telah di bahas pada bagian sebelumnya bahwa alasan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut berlandaskan logika ekonomi dan citra politik. Sebagai negara yang besar, maka seharusnya Indonesia kembali mengevaluasi 8 tahun penundaan ratifikasi Konvensi ini dan kedepannya tidak diulangi lagi.

Selain sumber kekuatan yang telah dipaparkan dalam paparan di atas, negara-negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi ini sebenarnya turut berkontribusi sebagai pihak yang ‘mendesak’ pemerintah Indonesia agar menyatakan sikap secara politik untuk menyegerakan ratifikasi. Pasca ratifikasi negara-negara pihak tersebut menyambut dengan antusias keputusan pemerintah Indonesia yang meratifikasi Konvensi ini pada 2 Mei 2012 melalui UU No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on the Protection of The Rights Of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) lalu kemudian diakui oleh PBB pada 31 Mei 2012.

Apabila ingin membandingkan negara-negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi, maka hal yang harus diperhatikan salah satunya mekanisme hukum nasional yang dimiliki. Karena setiap negara tentunya memiliki mekanisme hukum nasional yang berbeda-beda terkait proses meratifikasi suatu aturan internasional. Sehingga waktu yang dibutuhkan tiap negara berbeda-beda untuk menjadikan suatu hukum internasional dengan

melakukan pengesahan menjadi hukum nasional. Perbedaan waktu tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini terkait durasi waktu yang dibutuhkan suatu negara sejak penandatanganan hingga ratifikasi.

Tabel 4.3 Perbandingan Waktu Penandatanganan dan Ratifikasi Antar Negara Pihak

No.	Negara	Penandatanganan	Ratifikasi	Durasi Waktu
1.	Argentina	10 Aug. 2004	23 Feb. 2007	2 Y 6 M
2.	Bangladesh	7 Okt. 1998	24 Aug. 2011	12 Y 10 M
3.	Burkina Faso	16 Nov. 2001	26 Nov. 2003	2 Y
4.	Chili	24 Sept. 1993	21 Mar. 2005	11 Y 4 M
5.	El Salvador	13 Sept. 2002	14 Mar. 2003	6 M
6.	Ghana	7 Sept. 2000	7 Sept. 2000	-
7.	Guatemala	7 Sept. 2000	14 Maret 2003	2 Y 6 M
8.	Guyana	15 Sept. 2005	7 Jul. 2010	4 Y 9 M
9.	Indonesia	22 Sept. 2004	31 Mei 2012	7 Y 8 M
10.	Jamaika	25 Sept. 2008	25 Sept. 2008	-
11.	Lesotho	24 Sept. 2004	16 Sept. 2005	1 Y
12.	Meksiko	22 Mei 1991	8 Mar. 1999	7 Y 10 M
13.	Moroko	15 Aug. 1991	21 Jun. 1993	1 Y 10 M
14.	Paraguay	13 Sep. 2000	23 Sep. 2008	7 Y
15.	Peru	22 Sept. 2004	14 Sept. 2005	1 Y
16.	Filipina	15 Nov. 1993	5 Jul. 1995	1 Y 7 M
17.	Tajikistan	7 Sept. 2000	8 Jan. 2002	1 Y 4 M
18.	Turki	13 Jan. 1999	27 Sept. 2004	4 Y 8 M

Sumber: Diolah dari *United Nations Treaty Collection Status on International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (2012)¹²

Data di atas menunjukkan 18 dari 63 negara yang terlibat dalam Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran sebagai penandatanganan/*signatories* dan peratifikasi. Apabila dilakukan perbandingan, maka Indonesia termasuk ke dalam golongan negara-negara yang membutuhkan waktu cukup lama hingga meratifikasi Konvensi ini. Durasi waktu penandatanganan ini juga dapat menjadi tolok ukur kepedulian negara terhadap upaya perlindungan pekerja migran.

¹² United Nations Treaty Collection, (2012), Status on International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families - http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en

Maka dari itu dibutuhkan perbandingan dengan salah satu negara pihak yang juga telah meratifikasi Konvensi ini. Negara yang patut dijadikan telaah lebih lanjut yakni Meksiko. Negara ini merupakan salah satu penyusun utama Konvensi ini. Usahanya dalam mendorong negara-negara lain di PBB dapat dijadikan percontohan sikap atas tingginya perhatian yang diberikan terhadap hak-hak pekerja migran.

Belajar dari Meksiko

Meksiko meratifikasi Konvensi ini pada tahun 1999. Meksiko, sebagai salah satu negara berkembang di Amerika Selatan merupakan salah satu inisiator dan penyusun utama konvensi ini melalui pengajuan resolusi di PBB. Negara ini sangat berkepentingan dengan masalah buruh migran, mengingat Meksiko adalah negara transit, pengirim, dan sekaligus negara penerima buruh migran dari negara-negara Amerika Latin lainnya. Meksiko adalah negara yang dianggap telah melibatkan diri dengan baik dalam upaya diplomasi untuk memperluas ratifikasi Konvensi.

Bagi Pemerintah Meksiko, semua hak asasi manusia, baik individu dan migran khususnya, harus dihormati dan dilindungi, tanpa memandang status imigrasi mereka. Hal inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Meksiko tentang hak asasi buruh migran. Sekretaris Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Meksiko di Luar Negeri melakukan dan mempromosikan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak warga negara Meksiko di luar negeri.

Secara singkat, Meksiko melakukan usaha yang ekstensif dalam menjalin kerjasama melalui perjanjian-perjanjian bilateral dengan Negara-negara tetangga yang memang berhubungan dengan isu migran atau para imigran dari daerah Amerika Tengah. Kerjasama berbentuk MoU (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman) yang dibuat Meksiko dengan Amerika Serikat, Guatemala dan Kanada, yang membahas isu spesifik tentang ketentuan-ketentuan repatriasi migran, baik buruh migran yang berdokumen atau tidak. Jika diperhatikan, semangat perlindungan yang dilakukan oleh Meksiko tergambar dari MoU yang dibuat dengan negara penerima. Bahkan Meksiko juga membuat MoU dengan Amerika Serikat dalam bidang perlindungan ke konsuleran seperti, *Consular Convention between the United Mexican States and the United States of America*, 1942; *Memorandum of Understanding on Consular Protection of United States and Mexican Nationals*, 1996; *Memorandum of Understanding on Consultation Mechanisms on Immigration and Naturalization Service Functions and Consular Protection*, 1998; Meskipun Amerika Serikat atau Kanada tidak meratifikasi Konvensi Migran 1990, Meksiko menggunakan Konvensi Perlindungan Buruh Migran sebagai dasar argumen dalam memasukkan pasal-pasal yang dapat melindungi buruh migran mereka. Selain itu juga terdapat beberapa MoU yang telah dibuat oleh Meksiko terkait perlindungan buruh migran di negara penerima, di antaranya adalah:

- a. *Memorandum of Understanding for the Protection of Women and Minors from Trafficking in Persons on the Border*. Meksiko-Guatemala, ditandatangani 23 April 2004; berlaku efektif 22 Februari 2005.

- b. *Mexico-El Salvador Memorandum of Understanding for the Protection of Persons, Especially Women and Minors, Victims of Illicit Trafficking*, 17 Mei 2005.
- c. Juni 2002, diperbaharui 2 Juli 2004, Kementrian Migrasi Guatemala dan NIM menandatangani *Agreement for the Safe and Orderly Repatriation of Central Americans on the Borders of Mexico and Guatemala*. Perjanjian ini mengatur prosedur, tempat, dan waktu yang telah ditentukan untuk repatriasi Guatemala dan kebangsaan Amerika Tengah lainnya.
- d. 17 Mei 2005, El Salvador dan Meksiko, *Agreement for the Orderly, Swift and Safe Repatriation of Salvadoran Nationals by Land from Mexico*. Perjanjian ini mengatur prosedur, tempat, dan waktu yang telah ditentukan untuk repatriasi bagi kelompokkelompok yang paling terancam seperti perempuan, anak dibawah umur, orang tua, dan orang cacar.
- e. 3 Agustus 2004, Ministry of the Interior dan International Organization for Migration menandatangani *Memorandum of Understanding on the Voluntary and Assisted Return of Extraregional Migrants*, membantu Meksiko menghemat biaya tiket pesawat hingga 50% untuk repatriasi dan mendapatkan dokumen migran yang negaranya tidak mempunyai perwakilan diplomatik di Meksiko.
- f. *North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC)*: melakukan dorongan yang efektif dan promosi atas hukum perburuhan dan regulasinya. Selain memperbanyak perjanjian kerjasama yang lebih bersifat pada perlindungan hak-hak buruh migran, Meksiko juga

memperbanyak jaringan konsuler untuk mempermudah perlindungan terhadap buruh migrannya. Terdapat sekitar 145 representasi konsuler. Di Amerika Serikat terdapat 50 konsulat dan 16 Konsulat Meksiko di beberapa negara bagian lainnya. Di Kanada terdapat 4 konsulat (Vancouver, Toronto, Montreal, Leamington, Ontario), dan sisanya 70 bagian Konsuler Kedutaan Besar Meksiko atau Konsulat Kehormatan. 29 Perlindungan Konsuler merupakan semua tindakan konsuler yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak warga negara Meksiko, bahkan jika buruh migrannya berada dalam situasi migrasi yang tidak teratur. Jaringan perlindungan konsulat memiliki beberapa program yaitu; Program Perlindungan Hukum, Konsultasi Hukum, Pemberian Perhatian terhadap Tahanan, Perawatan kepada korban kejahatan kekerasan, Kompensasi untuk korban luka-luka, Pemulihan upah, Kunjungan ke tahanan di penjara, advokasi kasus Hukuman Mati di AS, Perlindungan anak, Repatriasi orang sakit, dan penerbitan kamus bahasa di negara tempat bekerja.

Di samping itu, Meksiko juga merupakan negara penerima buruh migran yang berasal dari negara-negara Amerika lainnya. Jumlah pekerja migran di Meksiko sebesar 493.000 jiwa (data sensus 2000). Mayoritas hampir 70% berasal dari Amerika Serikat lalu diikuti negara-negara dari Amerika Tengah, dengan mayoritas dari Guatemala. Menurut *Initial Report* Meksiko yang dikirimkan ke Komite Buruh Migran, mayoritas dari pekerja migran ini bekerja di sektor jasa (68,8%), lalu 21,1 % dalam sektor *processing*, dan 10,1% dalam sektor primer.

Migran dari Guatemala ini adalah mereka yang bekerja dalam bidang pertanian seperti kopi, pisang, mangga, gula, dll. Seperti pada industri kopi di Chiapas, 90% hasil produksi tergantung pada pekerja Guatemala.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Meksiko seharusnya diikuti oleh Indonesia melalui serangkaian kebijakan turunan agar manfaat yang diterima Indonesia semakin besar atas ratifikasi Konvensi yang telah dilakukan. Perbedaan yang signifikan antara Meksiko dan Indonesia yakni sektor pekerjaan dari pekerja migran asing. Di Indonesia seperti yang telah dipaparkan pada Bab II tentang Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia diketahui bahwa TKA yang bekerja Indonesia berada di sektor-sektor formal sehingga dampak langsung yang ditimbulkan dari ratifikasi Konvensi ini terhadap hak-hak pekerja migran tersebut dapat dipenuhi dengan sendirinya. Namun demikian Indonesia harus tetap hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait TKA di Indonesia.

Hal yang patut kita contoh dari Meksiko yakni cara pandang dan sikap Meksiko dalam melihat pekerja asing (yang mayoritas bekerja di sektor perkebunan) di Negaranya tidak membedakan pelayanan hukum yang diberikan kepada pekerja asing maupun pekerja dalam negeri di negara itu. Artikel 123 dari Konstitusi Meksiko menjamin hak pekerja sebagai hak konstitusional, termasuk untuk berorganisasi, bekerja dengan aman, hak untuk upah yang adil, dll. Bahkan jika pekerja migran di Meksiko merasa hak-haknya telah dilanggar seperti upah yang tidak dibayar ataupun diperlakukan secara tidak adil berdasarkan jenis kelamin dan ras, maka dapat mengajukan keluhan kepada PROFEDET (*Public Labor Defender*) (*Procuraduría de la Defensa del Trabajo*).

Upaya pemerintah Meksiko untuk melindungi hak-hak fundamental buruh migran dengan status apapun (reguler dan tidak reguler), baik di negaranya maupun terhadap terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri, dilakukan dengan berbagai upaya, misalnya memperbanyak perjanjian kerjasama dengan negara lain serta memperkuat bantuan konselor. Ini adalah salah satu inti dari Konvensi Perlindungan Buruh Migran yang seharusnya bisa jadi contoh terbaik bagi Indonesia.¹³

¹³ M. Gaussyah dkk, 2012, *Menagih Janji Ratifikasi: Analisis Terhadap Ratifikasi Empat Konvensi Internasional di Bidang HAM*, Jakarta: Kemitraan Partnership, hh. 38-43.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa alasan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dikarenakan alasan ekonomi dan politik.

Alasan ekonomi menjadi alasan utama atas diratifikasinya Konvensi ini. Karena pemerintah Indonesia menggunakan rasionalitas dalam menempatkan prioritas regulasi atau aturan untuk ditindaklanjuti. Hal ini tercermin dari waktu yang dibutuhkan Konvensi ini untuk diratifikasi yakni selama 8 tahun. Pemerintah Indonesia mencari momentum yang tepat untuk meratifikasi Konvensi ini agar mendapatkan hasil yang optimal dikarenakan rasionalitas yang digunakan.

Momentum yang dimaksud yakni pemerintah sadar bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak terlepas dari dukungan investasi asing yang sangat besar di Indonesia. Sehingga TKA di Indonesia yang merupakan pekerja migran dari negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap Indonesia harus mendapatkan kepastian hukum.

Maka dari itu, pemerintah merancang suatu acuan bagi pembangunan ekonomi Indonesia kedepannya yakni *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Dokumen ini mulai diluncurkan pada tahun 2011. Salah satu sikap yang ditunjukkan pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam

dokumen tersebut yakni dilakukannya tindakan-tindakan yang memperlancar investasi yang masuk ke Indonesia, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing).

Pasca diluncurkannya dokumen tersebut, maka proses yang sempat terhenti terhadap upaya ratifikasi Konvensi ini mulai berjalan kembali. Sehingga pada tahun 2012, proses ratifikasi Konvensi ini mencapai babak akhir yakni disampaikannya Amanat Presiden kepada DPR RI untuk pembahasan ratifikasi Konvensi. Proses tersebut bergulir hingga dibahasnya Konvensi ini pada 9 dan 14 April 2012 yang akhirnya menghasilkan produk hukum yakni UU No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on the Protection of The Rights Of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

Berdasarkan simpulan alasan ekonomi di atas maka bisa dimaknai bahwa pemerintah Indonesia mendapatkan keuntungan ekonomi atas diratifikasinya Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran yakni pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran asing di Indonesia sebagai bentuk menjaga investasi asing di Indonesia melalui perlindungan tenaga kerja asing (TKA) yang merupakan penggerak investasi dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Alasan politik dalam hal ini ikut menyertai alasan utama (ekonomi) yang bersifat implisit (tidak langsung/tersirat). Alasan politik lebih bersifat eksplisit (langsung) yang disampaikan dalam pernyataan-pernyataan politis pemerintah

pada pembahasan ratifikasi Konvensi ini. Dalam hal ini, pemerintah menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara (pemerintah) untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia. Kalimat ini seharusnya dimaknai bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi warga negaranya di dalam maupun di luar negeri. Tingginya jumlah kekerasan yang menimpa warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seharusnya menjadi pertanyaan besar atas peran pemerintah yang seharusnya dijalankan.

Permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri kemudian memunculkan respon dari berbagai pihak disertai desakan-desakan agar pemerintah menjalankan perannya. Namun demikian, pemerintah merasa tidak berdaya atas perlindungan TKI di luar negeri, karena daya ikat aturan suatu negara tidak dapat mengikat negara lainnya. Hal inilah yang seringkali menjadi alasan pemerintah ketika diminta tanggungjawab untuk melindungi TKI di luar negeri.

Ketidakberdayaan pemerintah ini seharusnya disikapi dengan upaya-upaya yang dapat memberikan kekuatan yang lebih bagi hukum nasional yang sudah ada. Salah satu upayanya yakni meratifikasi konvensi internasional yang bersifat universal sehingga dapat menjadi posisi tawar yang bergengsi bagi Indonesia di kancah internasional. Maka dimulailah upaya-upaya politik dari berbagai pihak untuk mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran agar dikemudian hari Konvensi ini dapat diharmonisasikan dengan UU tentang TKI di luar negeri yang sudah ada, maupun nota kesepahaman yang dibangun antara Indonesia dengan negara tujuan kerja.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa desakan-desakan kepada pemerintah kemudian bermunculan dari kalangan politisi, LSM, organisasi internasional, hingga negara-negara pihak yang meratifikasi Konvensi ini. Desakan ini sebagai bentuk penyadaran kepada pemerintah akan kewajibannya serta representasi itikad politik atas perlindungan TKI di luar negeri.

Desakan-desakan yang telah dilakukan sejak tahun 2004 hingga diratifikasinya Konvensi ini pada tahun 2012 akhirnya berhasil dilakukan. Dalam pembahasan ratifikasi Konvensi ini seluruh fraksi (9 fraksi) di Komisi IX DPR RI menyambut positif diratifikasinya Konvensi ini. Demikian juga dengan LSM Migrant Care dan Komnas Perempuan yang mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah atas keputusan yang diambil. Tidak lupa ILO juga mendukung langkah yang diambil pemerintah dengan meletakkan sikap pemerintah meratifikasi Konvensi ini sebagai capaian penting dalam komitmen politik dan perubahan kebijakan.

Berdasarkan simpulan alasan politik di atas maka bisa dimaknai bahwa pemerintah Indonesia mendapatkan keuntungan politik atas diratifikasinya Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran yakni meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia terhadap negara-negara tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri.

B. Saran dan Rekomendasi

Melalui skripsi ini penulis berharap dapat menginspirasi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional ditinjau dari perspektif akademis dengan melakukan telaah ilmiah dan berlandaskan teori yang tepat.

Di samping itu, penulis juga berharap dengan skripsi ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah agar mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk hal-hal yang bersifat urgen dan merupakan tanggungjawab konstitusional negara. Penundaan yang dilakukan pemerintah atas kebijakan yang bersifat mendesak sesungguhnya dapat berakibat meluas bagi kesewenangan yang dialami pihak-pihak yang menggantungkan nasibnya pada sikap pemerintah yang dinyatakan dalam pengesahan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Mukti, Takdir. (2013). *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Asyhadie, Zaeni. (2007). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burchill, Scott dan Andrew Linklater. (2011). *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Burhan Tsani, Mohd. (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PAU- Studi Sosial UGM.
- Gaussyah, M. dkk. (2012). *Menagih Janji Ratifikasi: Analisis Terhadap Ratifikasi Empat Konvensi Internasional di Bidang HAM*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Husni, Lalu. (2012). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Holsti, K.J. dan M. Tahir Azhary. (2000). *Politik Internasional Edisi Keempat Jilid I Kerangka Khusus untuk Analisis*. Yogyakarta: UGM Press.
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oed, Mochtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mas'oed, Mochtar. (1998). *Studi Ilmu Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM.
- Morgenthau, Hans J. (1999). *Politik Antar Bangsa*. Terjemahan Cecep Sudrajat direvisi oleh J.Thomson Buku III, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sitepu, P. Anthonius. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyadi, Dedi. (2013). *Hukum Internasional: Dari Konsepsi sampai Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsuddin, Aziz. (2013). *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Trijono, Rachmat. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Yustika, Ahmad Erani. (2009). *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuwono, Iswantoro Dwi. (2011). *Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Dokumen/Laporan

Hukum Nasional

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

_____. (2010). *Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Bandung: Fokus Media.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*

Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang *Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2012* - <http://www.dpr.go.id/id/undang-undang/2012/6/uu/PENGESAHAN-INTERNATIONAL-CONVENTION-ON-THE-PROTECTION-OF-THE-RIGHTS-OF-ALL-MIGRANT-WORKERS-AND-MEMBERS-OF-THEIR-FAMILIES-KONVENSI-INTERNASIONAL-MENGENAI-PERLINDUNGAN-HAK-HAK-SELURUH-PEKERJA-MIGRAN-DAN-ANGGOTA-KELUARGANYA>

Lembaga Pemerintah/Kementerian

Bank Indonesia. (2009). *Laporan Survei Nasional Pola Remitansi TKI Tahun 2008*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2010). *Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2009*. Jakarta: Bank Indonesia.

BNP2TKI. (2008). *Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri* - <http://bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html>

BNP2TKI. (2012). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per. 13/KA/VII/2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI.

- Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
Kemenakertrans. *Peraturan Penggunaan TKA* - <http://hrmkeys.files.wordpress.com/2012/02/peraturan-penggunana-tka.pdf>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2012). *Selayang Pandang Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI Biro Humas dan Pemberitaan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2012. *Risalah Rapat Kerja Komisi IX pada Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2012. *Risalah Rapat Paripurna ke- 25 Tahun Sidang 2011-2012*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2011). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 09 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.
- Presentasi Direktur Hukum Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Diar Nurbiantoro “*Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional*”.
- Pusdatinaker Kemenakertrans. (2010). *Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun 2010* - <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/katalog/xdownload.php?f=247>.
- Pusdatinaker Kemenakertrans. (2011). *Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun 2011* - <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/katalog/xdownload.php?f=265>.
- Pusdatinaker. (2012). *Penempatan TKI di Luar Negeri Menurut Negara dan Jenis Kelamin November 2012* - <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/katalog/xdownload.php?f=372>.
- Tatang Budie Utama Razak. (2012). *Penguatan Peranan Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri RI dalam Rangka Meningkatkan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri* pada Seminar “Revisi UU No. 39/2004 sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan TKI di Luar Negeri”, Jakarta, 29 Februari 2012.

Tatang Budie Utama Razak. (2013). *Memaksimalkan Fungsi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sinergitas Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah* pada 2nd Congress of Indonesian Diaspora, Jakarta, 19 Agustus 2013.

Wawancara dengan Rieke Dyah Pitaloka pada 27 Agustus 2013 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Internasional

Human Right Watch. (2012). *DPR Setujui Konvensi Buruh Migran* – <http://www.hrw.org/id/news/2012/04/12/dpr-setujui-konvensi-buruh-migran>

International Labour Organization. (2013). *Laporan ILO: 10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia* - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf.

International Organization for Migration. (2010). *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*. Jakarta: IOM.

Iredale, Robyn, Nicola Piper, dan Amelia Ancog. (2005). *Impact of Ratifying the 1990 UN Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family: Case Studies of the Philippines and Sri Lanka*. Penelitian Didanai UNESCO, Asia Pacific Migration Research Network.

Komnas Perempuan. (2006). *Pentingnya Meratifikasi Konvensi Migran 1990* – <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/08/Lembar-Info-1.pdf>

Migrant Care. (2012). *Wujudkan Payung Hukum bagi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya!* - Selebaran Informasi

United Nations. (2012). *Secretary-General's Report on International Migration and Development* - <http://daccess-ods.un.org/TMP/500607.416033745.html>

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. (2003). *United Nations Convention on Migrants' Rights*. New York: UNESCO.

United Nations Human Rights. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* - <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx>

United Nations Treaty Collection. (2003). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*- http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en

Karya Tulis Ilmiah/Skripsi

- Ardiani, Natasha Karina. (2009). *Penyebab Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya*. Skripsi, Prodi Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya.
- Diniawati, Febri. (2013). *Kepentingan Indonesia dalam Meratifikasi Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 2011*. Skripsi, Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Zulfikar, Achmad, Suleman, dan Aan Febriadi. (2013). *Penguatan Kapasitas Tenaga Kerja Internasional Indonesia dalam Aspek Etika dan Hukum di Kalangan Penyalur Jasa TKI di Yogyakarta*. Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian Didanai DIKTI Tahun 2013, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Media Massa Online

- Antara Jatim. (2012). *Kapan Kekerasan TKI akan Berakhir?* – <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/87574/kapan-kekerasan-tki-akan-berakhir->
- Antara News. (2013). *Kemlu bentuk 11 Kelompok Kerja Kongres Diaspora* – <http://www.antarane.ws.com/berita/384634/kemlu-bentuk-11-kelompok-kerja-kongres-diaspora>
- Bisnis. (2013). *Indonesia Segera Batasi Tenaga Kerja Asing* – <http://m.bisnis.com/manajemen/read/20130930/56/166147/indonesia-segera-batasi-tenaga-kerja-asing>
- Detik Finance. (2013). *Jumlah TKI Capai 6,5 juta, Tersebar di 142 negara* – <http://finance.detik.com/read/2013/03/14/174040/2194313/4/jumlah-tki-capai-65-juta-tersebar-di-142-negara>
- Kompas. (2010). *Remitansi TKI Terus Meningkat* - <http://nasional.kompas.com/read/2010/12/11/03132240/Remitansi.TKI.Terus.Meningkat>
- Kontan Online. (2012). *Kemlu tidak punya data WNI di luar negeri* – <http://nasional.kontan.co.id/news/kemlu-tidak-punya-data-wni-di-luar-negeri>.
- Tempo. (2012). *China Dominates Foreign Worker in Indonesia* – www.tempo.co/read/news/2012/03/07/055388615/China-Dominates-Foreign-Workers-in-Indonesia.
- Okezone. (2012). *Alasan Pemerintah Ratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran* - <http://economy.okezone.com/read/2012/08/06/320/674027/redirect>
- Okezone. (2013). *Daftar Gaji TKI di Luar Negeri* – <http://economy.okezone.com/read/2013/06/24/20/826788/nih-daftar-gaji-tki-di-luar-negeri>

LAMPIRAN 1 Ringkasan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran

PEMBUKAAN/PREAMBLE: Bagian ini terdiri atas 16 Daftar Inventaris Masalah yang menjadi pertimbangan disepakatinya Konvensi ini. Berikutnya akan dipaparkan beberapa hal yang mendasari pembentukan Konvensi ini.

- Konvensi ini mendasarkan urgensi pemberlakuannya berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Resolusi 217 A III), dimana salah satunya adalah hak untuk bekerja serta aturan-aturan lainnya yang terkait.
- Konvensi ini juga menyadari pentingnya masalah migrasi yang mempengaruhi bidang ketenagakerjaan dan melibatkan sejumlah besar Negara.
- Konvensi ini juga mendasarkan urgensi pemberlakuannya dengan argumentasi bahwa pekerja migran yang bekerja di luar negaranya rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif di Negara tempat ia bekerja, sehingga pekerja migrant tersebut perlu mendapatkan perlindungan, salah satunya melalui Konvensi Internasional ini.
- Konvensi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Negara pihak landasan dalam menjalin perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral dalam bidang migrasi internasional dan ketenagakerjaan, serta menjadi standar internasional maupun norma-norma yang diakui universal dalam memperlakukan pekerja migran secara manusiawi.

BAGIAN I: bagian ini terdiri atas 6 pasal (Pasal 1-6) tentang “ruang lingkup dan definisi”. Beberapa hal yang dibahas pada bagian ini antara lain pengertian/definisi pekerja migran yakni: “seseorang yang akan, tengah atau telah

melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warga negara”. Kemudian beberapa kondisi pekerja didefinisikan juga pada bagian ini seperti: (a) pekerja lintas batas, (b) pekerja musiman, (c) pelaut, (d) pekerja pada instalasi lepas pantai, (e) pekerja keliling, (f) pekerja proyek, hingga (g) pekerja dengan pekerjaan tertentu.

Bagian ini juga menjelaskan kategori pemberlakuan Konvensi, khususnya bagi pihak-pihak yang tidak dimaksud dalam Konvensi ini, seperti: (a) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh organisasi dan badan-badan internasional, atau oleh suatu Negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh hukum internasional umum atau oleh perjanjian internasional atau konvensi khusus; (b) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atau atas nama Negara di luar wilayahnya, yang berpartisipasi dalam program pembangunan dan program kerja sama lain, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh perjanjian dengan Negara tujuan kerja, dan yang sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak dianggap sebagai pekerja migran; (c) orang-orang yang bertempat tinggal di Negara yang berbeda dengan Negara asalnya sebagai penanam modal; (d) pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali ketentuan tentang hal ini ditetapkan dalam ketentuan hukum nasional, atau dalam instrumen internasional yang berlaku bagi Negara Pihak tersebut; (e) pelajar dan peserta pelatihan; dan (f) pelaut dan pekerja pada suatu instalasi lepas pantai yang belum memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja.

Selanjutnya pengertian “anggota keluarga” yakni: “orang-orang yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang menjadi tanggungan dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang diakui sebagai anggota keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-Negara yang bersangkutan”.

Di samping itu. Konvensi ini juga mengatur dua kondisi yang dialami oleh pekerja migran dan anggota keluarganya, yakni: (a) dianggap telah memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler apabila mereka diizinkan masuk, bertempat tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja, sesuai dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian-perjanjian internasional yang Negara tersebut menjadi pihak; dan (b) dianggap tidak memiliki dokumen atau berada dalam situasi tak-reguler apabila mereka tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam sub-ayat (a) Pasal ini.

Konvensi ini juga menjelaskan perihal istilah ‘negara asal’, ‘negara tujuan’, dan ‘negara transit’ yakni sebagai berikut: (a) istilah “Negara asal” berarti negara dimana orang yang bersangkutan merupakan warga Negara; (b) istilah “Negara tujuan kerja” berarti negara dimana pekerja migran akan, tengah atau telah melakukan aktivitas yang dibayar, sebagaimana adanya; dan (c) istilah “Negara transit” adalah negara yang disinggahi oleh orang yang bersangkutan dalam perjalanan ke negara tujuan kerja atau dari negara tujuan kerja ke negara asal atau tempat tinggalnya.

BAGIAN II: Bagian ini terdiri atas 1 pasal khusus yang mengatur tentang ‘non-diskriminasi dalam kaitan dengan hak’ (Pasal 7). Komitmen atas kebijakan non-diskriminasi merupakan suatu keharusan yang diupayakan oleh seluruh negara Pihak yang terikat dengan Konvensi ini agar menghormati dan memastikan semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya memperoleh hak-hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain.

BAGIAN III: Bagian tiga ini terdiri atas 28 pasal (pasal 8-35) tentang “Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran”. Hak-hak yang dimaksud meliputi cakupan yang luas, maka peneliti melakukan kategorisasi terhadap hak-hak tersebut.

Hak-hak asasi dalam kategori SIPOL (Sipil dan Politik) bagi pekerja migran termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) meliputi: (a) hak bebas menentukan meninggalkan negara termasuk negara asal; (b) hak hidup; (c) hak atas kebebasan berfikir, berpendapat, dan beragama; (d) hak mengungkapkan pendapat; (e) hak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial ketika mendapatkan hukuman; (f) hak mendapatkan bantuan hukum ketika diadili; (g) hak untuk tidak disita atau dihancurkan dokumen identitas, atau dokumen izin masuk atau izin tinggal atau izin kerja; (h) hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan konsuler dari negara asalnya

atau Negara yang mewakili kepentingan negara tersebut; (i) hak untuk diakui di depan hukum; (j) hak mendapatkan perlakuan sama dengan negara tujuan bekerja; (k) hak untuk berserikat dan berkumpul dalam serikat pekerja; (l) pelarangan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; dan (m) pelarangan diperbudak, atau diperhamba melakukan kerja paksa.

Sedangkan hak-hak dalam kategori EKOSOSBUD (Ekonomi, Sosial, dan Budaya) bagi pekerja migran meliputi: (a) hak untuk tidak diganggu dalam hal privasi, keluarga, rumah tangga, dan komunikasi; (b) hak untuk tidak dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang; (c) hak mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi; (d) Hak mendapatkan perawatan kesehatan; (e) hak mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan negara tujuan bekerja; (f) kewajiban negara pihak untuk menjamin penghormatan pada identitas budaya para pekerja migran; (g) hak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan pekerja migran, serta ketentuan hukum yang berlaku di Negara-negara yang bersangkutan; dan (h) hak untuk diberitahu Negara asal, Negara tujuan kerja, atau Negara transit mengenai hak-hak mereka yang ditimbulkan oleh Konvensi ini.

Selain itu, ada juga hak-hak bagi anggota keluarga pekerja migran meliputi: (a) hak anak pekerja migran untuk suatu nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan; (b) hak anak pekerja migran atas akses pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara yang bersangkutan;

BAGIAN IV: Bagian empat ini terdiri atas 21 pasal (pasal 36-56) tentang “Hak lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki

dokumen atau berada dalam situasi regular”. Bagian IV merupakan bagian yang spesifik memberikan nilai tambah bagi pekerja migran yang termasuk pekerja migran regular sebagaimana telah dijelaskan statusnya pada Bagian I. Hak-hak yang dimaksud meliputi cakupan yang luas, maka peneliti melakukan kategorisasi terhadap hak-hak tersebut.

Hak-hak asasi dalam kategori SIPOL (Sipil dan Politik) meliputi: (a) hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asal salah satunya dalam Pemilihan Umum yakni memilih dan dipilih, serta Negara bersangkutan wajib memfasilitasi pelaksanaan hak ini; (b) Negara pihak wajib untuk menetapkan prosedur-prosedur atau lembaga-lembaga yang dapat memberikan perhatian baik di Negara asal maupun di Negara tujuan kerja terkait kebutuhan khusus, aspirasi, dan kewajiban para pekerja migran dan anggota keluarganya, serta pekerja migran berhak menikmati hak-hak politik di Negara tujuan kerja apabila hak-hak politik tersebut diberikan; (c) hak untuk membentuk serikat kerja di Negara tujuan kerja dengan maksud pemajuan dan perlindungan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain; dan (d) hak untuk melakukan aktivitas berbayar sesuai dengan izin tinggal, apabila pemberian izin tinggal dan izin kerja dilakukan secara terpisah, bahkan pekerja migran tidak boleh dianggap kehilangan izin tinggal semata-mata karena diberhentikan dari aktivitas yang dibayar sebelum habisnya masa berlaku izin kerja atau izin sejenis.

Hak-hak asasi dalam kategori EKOSOSBUD (Ekonomi, Sosial, dan Budaya) meliputi: (a) hak untuk cuti sementara tanpa mempengaruhi izin tinggal atau izin kerja; (b) hak untuk memilih tempat tinggal di Negara tujuan kerja; (c)

hak untuk menikmati pembebasan bea dan pajak impor ekspor berkenaan dengan barang milik pribadi, dan rumah tangga selama berada di Negara tujuan kerja; (d) hak untuk mendapatkan informasi oleh negara asal atau negara tujuan bekerja atas ketentuan yang berlaku bagi penerimaan pekerja migran tersebut meliputi masa tinggal, aktivitas yang dibayar (perjanjian kerja), serta persyaratan yang harus dipenuhi di Negara tujuan kerja; (e) hak untuk mentransfer pendapatan dan tabungan dari Negara tujuan kerja ke Negara asal atau Negara lain sesuai prosedur yang ditetapkan dan ketentuan di Negara yang bersangkutan, serta Negara yang bersangkutan wajib memfasilitasi transfer tersebut; dan (f) hak untuk bebas dari pajak berganda terkait dengan pendapatan pekerja migran di Negara tujuan kerja.

Selain itu, ada juga hak-hak bagi anggota keluarga pekerja migran meliputi: (a) hak untuk memfasilitasi reunifikasi/kesatuan keluarga para pekerja migran melalui peran Negara pihak/tindakan yang diperlukan atau berlaku di Negara tujuan kerja terkait dengan hubungan perkawinan; (b) hak bagi anggota keluarga pekerja migran untuk mendapatkan kesetaraan perlakuan. Di samping itu Negara tujuan kerja wajib memfasilitasi hak anak-anak pekerja migran atas: sistem pendidikan, dan pengajaran bahasa Ibu dan budaya Negara asal yang difasilitasi oleh Negara tujuan kerja, maupun melalui skema khusus dalam rangka penyelenggaraan pendidikannya; (c) hak untuk pertimbangan izin tinggal, apabila pekerja migran bercerai atau meninggal, apabila tidak diberikan izin tinggal maka anggota keluarga pekerja migran harus diberikan waktu yang cukup guna menyelesaikan urusan-urusan di Negara tujuan kerja; (d) hak anggota keluarga pekerja migran yang memiliki izin tinggal atau izin masuk tanpa batas waktu atau

secara otomatis dapat diperpanjang untuk mendapatkan izin secara bebas memilih aktivitas yang dibayar; dan (e) hak untuk perlindungan atas pengusiran dari Negara tujuan kerja, kecuali untuk alasan-alasan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum nasional, dan rambu-rambu yang dicantumkan dalam bagian III konvensi ini.

Bagian ini juga menyertakan kewajiban Negara pihak untuk memberikan kesetaraan dengan warga negara dari Negara tujuan kerja dalam hal: (a) akses pada lembaga-lembaga dan pelayanan-pelayanan pendidikan; (b) akses pada bimbingan kejuruan dan pelayanan penempatan; (c) akses pada pelatihan kejuruan serta fasilitas dari lembaga pelatihan-ulang; (d) akses pada perumahan, termasuk skema perumahan sosial, dan perlindungan terhadap eksploitasi dalam hal penyewaan; (e) akses pada pelayanan sosial dan kesehatan, dengan ketentuan persyaratan keikutsertaan dalam skema-skema tersebut dipenuhi; (f) akses pada perusahaan-perusahaan koperasi dan swakelola yang tidak boleh mengakibatkan perubahan dalam status migrasi mereka, dan harus tunduk pada peraturan dan ketentuan dari badan yang bersangkutan; (g) akses dan partisipasi pada kehidupan budaya; (h) perlindungan terhadap pemecatan; (i) tunjangan pengangguran; (i) akses pada skema pekerjaan umum yang dimaksudkan untuk memberantas pengangguran; dan (j) akses pada pekerjaan alternatif dalam hal hilangnya pekerjaan atau pemberhentian aktivitas yang dibayar lainnya. Namun demikian hak kesetaraan perlakuan tersebut diperoleh bilamana persyaratan masa kerja sebagaimana diizinkan oleh Negara tujuan kerja memenuhi persyaratan yang tepat

Di samping itu Negara pihak diberikan kesempatan untuk membatasi aktivitas yang dibayar terhadap pekerja migran mengikuti ketentuan berikut: (a) membatasi akses pada kategori pekerjaan, fungsi, pelayanan atau kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan Negara tersebut dan ditetapkan oleh ketentuan hukum nasional; dan (b) membatasi kebebasan dalam memilih aktivitas kerja yang dibayar sesuai dengan ketentuan hukum mengenai pengakuan atas kualifikasi pekerjaan yang diperoleh di luar wilayah Negara tersebut. Namun, Negara-Negara pihak yang bersangkutan wajib mengusahakan untuk memberikan pengakuan atas kualifikasi semacam itu.

BAGIAN V: Bagian lima ini terdiri atas 7 pasal (pasal 57-63) tentang “Ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya”. Maka bagian V ini akan menjelaskan hak-hak yang diperoleh oleh mereka yang berada dalam golongan tertentu. Berikut hak-hak lain yang dimaksud: (a) Hak bagi pekerja lintas batas; (b) hak bagi pekerja musiman; (c) hak bagi pekerja keliling; (d) hak bagi pekerja proyek; (e) hak bagi pekerja dengan pekerjaan tertentu; dan (f) hak bagi pekerja mandiri.

BAGIAN VI: Bagian enam ini terdiri atas 8 pasal (Pasal 64-71) tentang “Pemajuan kondisi yang baik, setara, manusiawi, dan sah sehubungan dengan migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya”.

Bagian enam ini mengungkapkan hal-hal terkait upaya yang dapat dilakukan oleh Negara pihak Konvensi untuk memajukan kondisi migrasi internasional bagi pekerja migran dan anggota keluarganya agar lebih baik, berikut upaya yang dapat dilakukan oleh Negara pihak: (a) memberikan perhatian

terhadap kebutuhan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya atas pekerja migran dan anggota keluarganya; (b) menetapkan kebijakan mengenai kepulangan yang tertib para pekerja migran dan anggota keluarganya ke Negara asal apabila mereka memutuskan untuk pulang, atau jika izin tinggal atau izin kerja mereka telah habis masa berlakunya, atau jika mereka berada dalam situasi tak-reguler di Negara tujuan kerja; (c) apabila di wilayah Negara pihak terdapat pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada dalam situasi tak-reguler, maka Negara pihak wajib mengambil kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa situasi demikian tidak terus berlangsung; (d) apabila Negara-Negara Pihak yang bersangkutan mempertimbangkan kemungkinan menjadikan situasi regular orang-orang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku, pertimbangan yang tepat harus diambil terkait situasi masuknya mereka ke dalam Negara tersebut, lamanya mereka tinggal di Negara tujuan kerja, dan pertimbangan lain, khususnya yang berkenaan dengan situasi keluarga mereka; dan (e) Negara-Negara Pihak wajib mengambil kebijakan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diterapkan pada warga negaranya untuk memastikan bahwa kondisi kerja dan kehidupan para pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada dalam situasi regular memenuhi standar kebugaran, keselamatan, kesehatan dan prinsip-prinsip martabat manusia.

Konvensi ini juga bahkan mengatur tentang kewajiban Negara pihak untuk memfasilitasi pemulangan jenazah pekerja migran atau anggota keluarganya ke Negara asal jika diperlukan; serta berkenaan dengan masalah kompensasi terkait dengan meninggalnya seorang pekerja migran atau anggota keluarganya, Negara-

Negara Pihak wajib, jika perlu, menyediakan bantuan bagi orang-orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Penyelesaian masalah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum nasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi ini dan perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan.

Amanat dari Konvensi juga mewajibkan Negara pihak untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang tepat untuk menangani masalah-masalah migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya. Fungsi pelayanan ini mencakup, antara lain: (a) perumusan dan penerapan kebijakan mengenai migrasi semacam ini; (b) pertukaran informasi, konsultasi, dan kerjasama dengan pejabat yang berwenang dari Negara-Negara Pihak lain yang terlibat dalam migrasi semacam ini; (c) penyediaan informasi yang sesuai, khususnya bagi para majikan, pekerja dan organisasi mereka mengenai kebijakan, hukum dan peraturan yang berkenaan dengan migrasi dan pekerjaan, perjanjian yang telah dibuat dengan Negara lain mengenai migrasi dan hal lain yang relevan; (d) penyediaan informasi dan bantuan yang sesuai bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya mengenai perizinan dan tata cara yang dipersyaratkan serta pengaturan keberangkatan, perjalanan, kedatangan, tempat tinggal, aktivitas yang dibayar, keluar dan kembali, juga mengenai kondisi kerja dan kehidupan di Negara tujuan kerja dan mengenai kepabeanan, nilai tukar uang, pajak serta hukum dan peraturan lain yang relevan.

BAGIAN VII: Bagian tujuh ini terdiri atas 7 pasal (Pasal 72-78) tentang “Penerapan konvensi”. Bagian tujuh ini menjelaskan tindak lanjut dari penerapan

konvensi bagi Negara-negara yang telah meratifikasi/mengaksesi Konvensi ini menjadi hukum setempat. Implikasi yang ditimbulkan diringkas dalam beberapa kategori sebagai berikut.

Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

- Dibentuk dalam rangka mengkaji ulang penerapan Konvensi ini.
- Komite ini wajib terdiri atas 10 orang pakar hingga 14 orang pakar.
- Anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara oleh Negara pihak dari orang-orang yang dicalonkan oleh Negara pihak.
- Pemilihan (anggota komite) pertama wajib diselenggarakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal Konvensi ini berlaku efektif, dan pemilihan berikutnya dilakukan setiap tahun kedua.
- Pemilihan anggota Komite wajib diselenggarakan pada pertemuan Negara-negara pihak yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar PBB.
- Anggota Komite wajib bertugas untuk masa jabatan empat tahun, serta anggota Komite berhak dipilih kembali apabila dicalonkan kembali.

Laporan Tindak Lanjut atas Konvensi kepada Sekretaris Jenderal PBB

Tahap Penyusunan

- Laporan berisi kebijakan legislatif, yudisial, pemerintah, dan kebijakan lain yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan dalam Konvensi ini untuk dipertimbangkan oleh Komite.

- Laporan pertama diserahkan dalam kurun waktu satu tahun setelah Kovenensi ini berlaku efektif bagi Negara Pihak yang bersangkutan, selanjutnya setiap lima tahun dan jika Komite memintanya.
- Laporan yang dibuat oleh Negara pihak harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada, yang memengaruhi implementasi Konvensi ini dan harus mencakup informasi mengenai karakteristik arus migrasi yang Negara Pihak bersangkutan terlibat di dalamnya.
- Komite wajib menetapkan pedoman lebih lanjut mengenai isi dari laporan tersebut.

Tahap Penyebarluasan

- Negara-Negara Pihak wajib menjadikan laporan-laporan mereka tersedia secara luas kepada publik di negaranya sendiri.

Tahap Evaluasi

- Komite wajib memeriksa laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap Negara pihak dan wajib menyampaikan komentar-komentar yang dianggap tepat kepada Negara pihak yang bersangkutan.

Keterlibatan Organisasi Internasional

- Komite dapat mengundang badan dan organ khusus PBB dan organisasi antar negara, serta badan terkait lain untuk menyampaikan, untuk dipertimbangkan oleh Komite, informasi tertulis mengenai hal yang ditangani Konvensi ini yang masuk dalam cakupan kegiatan mereka.

- Organisasi Buruh Internasional wajib diundang oleh Komite untuk menunjuk perwakilannya untuk berpartisipasi, dalam kapasitas konsultasi, pada pertemuan-pertemuan Komite.
- Suatu Negara Pihak Konvensi ini sewaktu-waktu dapat mendeklarasikan berdasarkan Pasal ini bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi sehingga suatu Negara Pihak dapat menggugat Negara Pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.

BAGIAN VIII: Bagian delapan ini terdiri atas 6 pasal (Pasal 79-84) tentang “Ketentuan umum”. Bagian delapan ini mengatur tentang posisi Negara pihak dengan ketentuan yang terantum dalam Konvensi ini. Berikut ketentuan yang dimaksud:

- Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh memengaruhi hak setiap Negara Pihak untuk menetapkan kriteria yang mengatur penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya. Mengenai masalah lain berkenaan dengan situasi dan perlakuan hukum sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-Negara Pihak wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dicantumkan dalam Konvensi ini.
- Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari badan-badan khusus yang menetapkan tanggung jawab masing-masing Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, berkenaan dengan permasalahan yang diatur dalam Konvensi ini.

- Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh memengaruhi hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang lebih baik yang diberikan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal: (a) hukum atau praktik di Negara Pihak; atau (b) segala perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan.
- Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menyiratkan bahwa suatu Negara, kelompok, atau individu mempunyai hak untuk melakukan aktivitas atau menjalankan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang ditentukan dalam Konvensi ini.
- Hak-hak para pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditentukan dalam Konvensi ini tidak dapat dicabut. Tidak dibolehkan untuk melakukan segala bentuk tekanan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya dengan maksud agar mereka melepaskan atau menghilangkan segala hak-hak di atas. Tidak dimungkinkan untuk mengurangi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini melalui perjanjian. Negara-Negara Pihak wajib mengambil kebijakan yang tepat untuk memastikan dihormatinya prinsip-prinsip ini.
- Setiap Negara Pihak berupaya untuk mengambil kebijakan legislatif dan kebijakan lain yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan dalam Konvensi ini.

BAGIAN IX: Bagian sembilan ini terdiri atas 9 pasal (Pasal 85-93) tentang “Ketentuan penutup”. Bagian sembilan ini mengatur hal-hal terkait tindak lanjut Negara untuk mengadopsi aturan/konvensi ini ke dalam hukum setempat

melalui mekanisme ratifikasi/aksesi, serta kemungkinan perubahan pasal-pasal dalam Konvensi ini, bahkan Negara pihak bisa menarik diri dari Konvensi ini. Selanjutnya dibahas sebagai berikut:

- Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara; Konvensi ini tunduk pada ratifikasi; Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara; Instrumen ratifikasi atau aksesinya disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Konvensi ini mulai berlaku efektif di hari pertama pada bulan setelah periode tiga bulan sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya yang kedua puluh.
- Bagi setiap negara yang meratifikasi atau mengaksesi setelah Konvensi ini berlaku efektif, Konvensi ini mulai berlaku efektif di hari pertama pada bulan setelah periode tiga bulan sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.
- Suatu Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini tidak dapat mengecualikan penerapan bagian mana pun dari Konvensi ini, atau tanpa mengabaikan Pasal 3, mengecualikan kategori tertentu dari pekerja migran dalam penerapannya.
- Setiap Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini, tidak lebih awal dari lima tahun sejak Konvensi ini mulai berlaku efektif di Negara yang bersangkutan melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- Penarikan diri semacam itu mulai berlaku efektif di hari pertama pada bulan setelah periode dua belas bulan berakhir sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Lima tahun setelah Konvensi ini berlaku efektif, Negara Pihak dapat mengusulkan perubahan Konvensi ini sewaktu-waktu melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Segala sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, atas permintaan salah satu dari mereka, wajib diajukan kepada arbitrase.

LAMPIRAN 2 Surat Keterangan Wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rieke Diah Pitaloka

Jabatan : Anggota Komisi IX
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. A-339

Fraksi : PDI Perjuangan

Benar telah menjadi responden dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka melengkapi data primer pada skripsi mahasiswa S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Achmad Zulfikar

NIM : 20100510137

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional
Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Agustus 2013

Rieke Diah Pitaloka

RIWAYAT HIDUP

Achmad Zulfikar, akrab dipanggil Fikar, lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada 22 Mei 1992, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari ayah bernama Ir. Baharuddin Nur, Dipl.Env. dan Ibu bernama Dr. Sitti Rabiah, M.Hum.

Ia menghabiskan masa kecil dan sebahagian masa remajanya di kota kelahirannya, dimana Ia menyelesaikan pendidikan dasar tahun 2003 di Sekolah Dasar Inpres Perumnas Antang II, Makassar dan tahun 2006 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Makassar. Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Makassar pada tahun 2009, Ia memilih melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bidakara, Jakarta, karena ketertarikannya di bidang komputer. Di sekolah binaan Bank Indonesia tersebut, ia mengambil jurusan Teknik Informatika yang ditekuninya selama tiga semester, sebelum kemudian tersadar kalau Ia sebenarnya lebih tertarik pada pemanfaatan komputer (teknologi) sebagai media komunikasi daripada mendalami ilmu komputer secara teknis. Kesadaran itu membawanya hengkang ke Yogyakarta mencari ilmu yang sesuai dengan minatnya di bidang komunikasi. Ia kemudian menjatuhkan pilihannya ke jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun ajaran 2010.

Selama menempuh studi di Yogyakarta, Ia yang hobi membaca, menulis dan berorganisasi menemukan lingkungan yang kondusif. Maka dari itu, selain berusaha meraih nilai akademik yang baik, Ia juga melibatkan diri dalam kegiatan berorganisasi dimulai dari tingkat jurusan sebagai anggota Divisi Pers Mahasiswa di Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UMY (2010-2013), Ia juga aktif sebagai Staf Divisi Pers dan Multimedia di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIPOL UMY (2010-2011). Setahun kemudian (2011-2012), Ia sudah mendapat kepercayaan sebagai Ketua Divisi Media dan Informasi BEM FISIPOL UMY dan Ketua Divisi Jaringan dan Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Pers dan Penerbitan 'Nuansa' UMY.

Sambil terus mempertahankan Indeks Prestasi (IP) Kumulatifnya di atas 3,8, setahun berikutnya tepatnya di tahun 2012, Ia menjajal kemampuan berorganisasinya dengan mencoba mencalonkan diri sebagai Gubernur BEM FISIPOL pada Pemilu FISIPOL 2012 untuk mencoba mendalami dan memahami kehidupan berdemokrasi di kalangan mahasiswa. Meski tidak berhasil terpilih, tetapi Ia banyak menimba pengalaman bagaimana mahasiswa mempersepsikan demokrasi dan menerapkannya dalam kehidupan kampus. Menyadari potensi kepemimpinannya, maka pasca pencalonannya tersebut, Ia menerima tanggungjawab sebagai Sekretaris Umum UKM Lembaga Pers dan Penerbitan 'Nuansa' UMY. Untuk menyeimbangkan aktivitasnya, Ia juga bergabung di UKM Paduan Suara Mahasiswa 'Sunshine Voice' sebagai Anggota Tenor. Melihat kiprahnya di tingkat jurusan dan fakultas, Presiden Mahasiswa BEM KM UMY periode 2012-2013 mempercayakannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam jajaran Kabinet Karya Bakti Nyata.

Di luar kesibukan organisasi intra-kampus, ia juga mengembangkan diri melalui berbagai aktivitas. Di Jurusan, ia mengelola situs web Hubungan Internasional selama periode 2011-2013, dan menjadi Koordinator Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2012 yang diajukan ke Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) yang berhasil meloloskan 10 proposal yang didanai pada tahun 2013. Prestasinya di bidang akademik membuatnya mendapatkan kepercayaan dari salah seorang dosennya yakni bapak Sugito, S.IP., M.Si. untuk menjadi asisten mata kuliah Kajian Uni Eropa di semester ganjil 2013/2014.

Rekam jejaknya di bidang kegiatan ilmiah membuatnya diberi kepercayaan untuk mengawal proses pengajuan proposal Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2013 di tingkat Universitas yang akan didanai di tahun 2014 di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY. Selain berkiprah di dalam kampus, ia tak melupakan eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat. Ia memilih berkiprah di Keredaksian Swara Kampus Koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, bahkan sebenarnya Ia telah menjadi Kontributor

tulisan sejak 2010. Ia juga salah seorang dari perintis terbentuknya Komunitas Blogger Jogja yang dirintis sejak tahun 2011.

Kegiatan ilmiah yang Ia lakukan tidak sebatas di lingkungan kampus dan di lingkungan perguruan tinggi di Yogyakarta. Sejumlah kegiatan ilmiah di tingkat nasional dan internasional aktif diikutinya. Beberapa diantaranya, pada 19 Maret 2013, ia mempresentasikan gagasannya tentang Peran Media Sosial sebagai Katalisator Integrasi Komunitas ASEAN 2015 dalam *4th Social, Development, and Environmental Studies International Conference 2013* di Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian pada 9-12 September 2013, ia bersama kelompoknya terpilih mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-26 yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat oleh Dirjen DIKTI Kemendikbud atas pencapaiannya dalam menjalankan program penelitiannya pada Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2012 dengan mengangkat penelitian berjudul Penguatan Kapasitas TKI dalam Aspek Etika dan Hukum di Kalangan Penyalur Jasa TKI di Yogyakarta. Selain itu, pada 28-31 Oktober 2013 ia terpilih mempresentasikan gagasannya tentang “Bahasa Indonesia sebagai Embrio Bahasa ASEAN: Peluang dan Tantangan Menuju Komunitas ASEAN 2015” dalam Kongres Internasional Bahasa Indonesia (KBI) X yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud di Jakarta.

Setelah merampungkan skripsi Strata Satu Ilmu Hubungan Internasional berjudul “Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012” di penghujung tahun 2013, ia berhasil melewati ujian dengan predikat sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Proses penyelesaian skripsinya ternyata membawa aspirasi dan inspirasi baru dalam dirinya. Ia semakin tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses penyusunan hingga implementasi Kebijakan Publik. Ia kemudian berharap dapat melanjutkan pendidikannya di bidang tersebut di perguruan tinggi yang memiliki reputasi. Ia akan sangat senang berbagi ilmu dan pengalaman dengan siapa saja yang memiliki ketertarikan yang sama di bidang tersebut. Ia bisa dihubungi lebih lanjut melalui surel: **apa@kabarfikar.com**, atau twitter **@kabarfikar**.

BIOGRAPHY

Achmad Zulfikar, Fikar fondly called, was born in Makassar, South Sulawesi, on May 22, 1992, is the first child of four children of a father named Ir. Baharuddin Nur, Dipl.Env. and mother named Dr. Sitti Rabiah, Hum.

He spent most of his childhood and teenage years in his hometown, where he finished primary school in *SD Inpres Perumnas Antang II*, Makassar in 2003 and Junior High School at *SMP Negeri 6 Makassar* in 2006. After completing high school in *SMA Negeri 1 Makassar* in 2009, he decided to pursue his higher education at the School of Informatics Management and Computer (STMIK) Bidakara, Jakarta, since his interest in computers. He majored in Informatics Engineering in the college assisted by the Bank of Indonesia, and practiced for three semesters, before then realized that he is actually more interested in the use of computers (technology) as a medium of communication rather than deep technical computer science. That realization took him off to Yogyakarta seek knowledge in accordance with his interests in the field of communication. He then dropped his choice to major in International Relations at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIPOL), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) in the academic year 2010.

During studying in Yogyakarta, he who like to reading, writing and social activities find the conducive environment. Therefore, in addition to trying to achieve good academic grades, he was also involved in organizational activities started in the lowest level as a member of the Division of Student Press Corps of Student of International Relations of UMY (2010-2013), he was also active as a Staff in the Division of Press and Multimedia of Student Executive Board (BEM) in the Faculty of Social and Political Sciences (FISIPOL) of UMY (2010-2011). A year later (2011-2012), he had got trust as Chief of the Division of Media and Information of *BEM* of *FISIPOL UMY* and Chief of the Division of Network and Information Student Activity Unit (UKM) Institute of Press and Publishing '*Nuansa*' of UMY.

While continuing to maintain a grade point (IP) cumulative above 3.8, precisely in the next year in 2012, he tested his organizational skills to try to run for Governor Election of BEM of FISIPOL UMY. Another reason behind this is for trying to explore and understand the democratic life among the students. Although not successfully elected, but he accumulated extensive experience of how students perceive democracy and apply them in campus life. Recognizing his potential for leadership, then after the nomination, he accepts responsibility as Secretary General of Institute of Press and Publishing '*Nuansa*' of UMY. To balance his activities, he also joined the *UKM* Student Choir of 'Sunshine Voice' as a Tenor Member. Seeing his track record in the department and faculty level, the President of Student Association (*BEM UMY*) entrust him as Minister of Communications and Informatics in the Cabinet of *Karya Bakti Nyata*.

Beyond the bustle of intra-campus organizations, he also develop himself through various activities. In the Department, he manages the website of International Relations during the period of 2011-2013, and became Coordinator of Student Creativity Program for 2012 who actively submitted research proposal to the Director General of Higher Education of Educational and Cultural Ministry to get funding. In 2013, his department successfully passed 10 proposals to be funded. His achievements in the academic field earned him the trust of one of his teachers, Sugito, S.IP, M.Si. to be his assistant. He is then become assistant to the European Union Studies subject in the first semester of 2013/2014.

His track record in the field of scientific activity makes entrusted to oversee the process of soliciting proposals Student Creativity Program in 2013 at the university level that will funded in 2014 under the coordination of the Institute for Student Development and Alumni of *UMY*. In addition to his activity within his campus, he did not forget his existence as a part of the community. He then actively take part as an editor for *Kedaulatan Rakyat* newspaper especially for Campus Voice page where actually he has been a contributor for news and opinions since 2010. Apart from those activities he was also one of the pioneers of establishment of *Jogja Blogger Community* (KBJ) which is initiated since 2011.

For scientific activities, he did not merely on campus and in universities in Yogyakarta. He also actively participated in a number of scientific activities both national and international levels. Some that can be mentioned, on March 19, 2013, he presented his paper about 'The Role of Social Media as the Catalyst of ASEAN Community 2015 Integration' in the 4th Social, Development, and Environmental Studies International Conference 2013 at *Universiti Kebangsaan Malaysia*, then on September 9 to 12, 2013, he is selected to follow the National Science Week 26th held in West Nusa Tenggara, Indonesia, by the Directorate General of Higher Education of Ministry of Education and Culture (*Kemdikbud*) for his achievements in implementing research programs on Student Creativity Program Year 2012 on Strengthening Capacity of Migrant Workers in Ethics and Legal Aspects among Migrant Workers Agent in Yogyakarta. In addition, on 28-31 October 2013 he was selected to present his paper on 'Indonesian as a ASEAN's Language Embryos: Opportunities and Challenges towards the ASEAN Community 2015" in the International Congress of *Bahasa Indonesian* (KBI) X in Jakarta organized by the The Center of Language Learning and Research, Ministry of Education and Culture.

At the end of 2013, after completing his bachelor degree thesis in International Relations entitled "The Reason of Indonesian Government to Ratify the International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in 2012", he successfully passed the exam with honors and earned the title Bachelor of Political Science (S.IP). During completion of his thesis process, brought in him new aspirations and inspirations. He is increasingly interested in studying more about the process of preparation and implementation of Public Policy. He then hopes to pursue his post-graduate education in the field of public policy in a reputable college somewhere and sometime. He would be very happy to share his knowledge and experience with anyone who has the same interest in the field. He can be contacted further by email: **apa@kabarfikar.com**, or twitter **@kabarfikar**.